

10 LAPORAN UTAMA

Penataan  
Organisasi BJBC

20 OPINI

Buku dan  
Revolusi Mental

55 FEATURE

“...BOTAN OOH BOTAN..!”  
(Di Laut Kita Mencari Prestasi)



# w a r t a bea cukai

Informasi Terpercaya Kepabeanan dan Cukai



## BERBENAH MENUJU BEA CUKAI YANG MAKIN BAIK





**KELUARGA BESAR DIREKTORAT JENDERAL  
BEA DAN CUKAI MENGUCAPKAN**

---

# Isra Mi'raj

**Nabi Muhammad SAW**

( 2 7 R a j a b 1 4 3 7 H )



# DARI REDAKSI

**S**ejalan dengan program Nawa Cita yang telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, salah satu langkah yang diambil dalam mengawal pembangunan nasional adalah memperkuat kementerian, lembaga atau pemerintah daerah. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai instansi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan agenda Nawa Cita, tengah berbenah memperkuat institusi menuju instansi Bea Cukai yang makin baik.

Setelah melakukan penataan kembali organisasi (reorganisasi) instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada tahun 2014, kini Bea Cukai melakukan reorganisasi di lingkungan Kantor Pusat Bea Cukai Jakarta. Beberapa perubahan yang dilakukan diantaranya adalah pembentukan Direktorat Kepatuhan Internal dan Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis sebagaimana tindak lanjut atas rekomendasi Tim Quality Assurance dan Reformasi Birokrasi Nasional (QA RBN) Tahun 2011, pembentukan unit yang berperan dalam mengawal skema Free Trade Agreement (FTA) dan Authorized Economic Operator (AEO), serta penambahan eselonisasi untuk mengefisienkan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu yang berkembang seiring dengan dinamisasi lingkungan. Bahasan Reorganisasi Bea Cukai akan kami ulas dalam rubrik Laporan Utama kali ini.

Selain rubrik Laporan Utama, rubrik Galeri Foto juga tak kalah inspiratif. Familiarkah Anda dengan Fahombo? Fahombo atau Hombo Batu (Lompat Batu) adalah olah raga tradisional Suku Nias. Olahraga yang sebelumnya merupakan ritual pendewasaan Suku Nias ini banyak dilakukan di Pulau Nias dan menjadi objek wisata tradisional unik yang teraneh hingga ke seluruh dunia. Mereka harus melompati susunan bangunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm. Foto-foto cantik nan *breathhtaking* bisa Anda nikmati di rubrik Galeri Foto bulan ini.

Bagi para pelaku usaha patut menilik rubrik Kebijakan, di mana kami hadirkan ulasan terkait PMK 67/PMK.04/2016 tentang Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*) atas Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk. Pemberlakuan Deklarasi Inisiatif diharapkan dapat meningkatkan *voluntary compliance* importir, suatu hal yang sangat penting dilakukan dalam rangka mewujudkan rasa saling percaya (*trust*) antara importir dengan Bea Cukai selaku pemilik otoritas dibidang kepabeanan.

Masih banyak informasi menarik lainnya yang kami kemas dalam berbagai rubrik. Kiriman artikel dan foto Anda akan selalu kami tunggu setiap bulannya untuk mengisi lembar-lembar halaman majalah ini. Tentunya sumbangan ide dan kritik yang membangun pun masih kami nantikan untuk kemajuan majalah Warta Bea Cukai.

**Selamat membaca!**



**Pimpinan Redaksi  
Deni Surjantoro**

Majalah Warta Bea dan Cukai diterbitkan oleh Subdirektorat Komunikasi dan Publikasi Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai – Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Redaksi menerima kiriman foto, artikel dan surat untuk keperluan konten majalah ini. Setiap pengiriman dialamatkan melalui surat elektronik ke majalah.wbc@customs.go.id dan majalah\_wbc@yahoo.com dengan disertai identitas lengkap pengirim dan nomor telepon yang dapat dihubungi. Agar menuliskan nama kolom dalam subyek surat elektronik.

## ALAMAT REDAKSI

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai  
Jl. Jend. Ahmad Yani (By Pass) Jakarta Timur  
Telp: (021) 478 60504, (021) 478 65608, (021) 489 0308 ext. 820-821-822  
e-Mail : majalah\_wbc@yahoo.com dan majalah.wbc@customs.go.id

Follow:  @Warta\_BeaCukai  WartaBeaCukai

**DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**  
Heru Pambudi, S.E., LL.M

**PENASEHAT**

**SEKRETARIS DITJEN BEA DAN CUKAI**  
Drs. Kushari Suprianto, M.M., M.E

**DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN**  
Oza Olavia, S.Si., Apt., M.Si.

**DIREKTUR FASILITAS KEPABEANAN**  
Robi Toni, S.E., M.M.

**DIREKTUR TEKNIS DAN FASILITAS CUKAI**  
Drs. Marisi Zainudin Sihotang, SH, M.M.

**DIREKTUR KEBERATAN BANDING DAN PERATURAN**  
Ir. Rahmat Subagio, M.A.

**DIREKTUR INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI**  
Ir. B. Wijayanta Bakti Mukarta, M.A

**DIREKTUR KEPATUHAN INTERNAL**  
Hendra Prasmono, S.H., M.IH

**DIREKTUR AUDIT KEPABEANAN DAN CUKAI**  
Muhammad Sigit, Ak, MBA

**DIREKTUR PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN**  
Ir. Harry Mulya, M.Si

**DIREKTUR PENERIMAAN DAN PERENCANAAN STRATEGIS**  
Sugeng Apriyanto, S.Sos., M.Si.

**TENAGA PENGKAJI BIDANG PELAYANAN DAN PENERIMAAN KEPABEANAN DAN CUKAI**  
Dwijo Muryono

**TENAGA PENGKAJI BIDANG PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM KEPABEANAN DAN CUKAI**  
Dwi Teguh Wibowo, S.E.

**TENAGA PENGKAJI BIDANG PENGEMBANGAN KAPASITAS KINERJA ORGANISASI KEPABEANAN DAN CUKAI**  
M. Agus Rofudin, S. Kom., M.M.

**KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BEA DAN CUKAI**  
Ir. Agus Hermawan, MA

**PENGARAH  
DIREKTUR KEPABEANAN INTERNASIONAL DAN ANTAR LEMBAGA**  
DR. Robert Leonard Marbun, SIP, MPA

**PEMIMPIN REDAKSI  
KASUBDIT KOMUNIKASI DAN PUBLIKASI**  
Deni Surjantoro

**WAKIL PEMIMPIN REDAKSI**  
Muchamad Ardani, Imam Sarjono, Sudiro, Devid Yohannis Muhammad

**REDAKTUR**  
Isro'ah Laeli Rahmawati, Intania Riza Febrianti, Wahyuddin, Yella Meisha Indika, Dara Rahmania, Sumardian Wahyudiati, Muparrih, Jiwo Narendro P, Zulfaturrahmi

**FOTOGRAFER**  
Abdur Razaq Aghni, Wahyu Valti Raja Monang, Deo Agung Sembada, Rahmad Pratomo Digdo, Dovan Wida Perwira, Irfan Nur Ilman

**REPORTER**  
Piter Pasaribu, Aris Suryantini, Desi Andari Prawitasari, Supomo, Andi Tria Saputra, Kitty Hutabarat, Syahroni, Supriyadi Widjaya.

**SEKRETARIAT**  
Indah Widaryati, Rudi Andrian

# Daftar Isi

Mei 2016

## ■ Laporan Utama

- 6 Berbenah Menuju Bea Cukai yang Makin Baik
- 10 Penataan Organisasi DJBC
- 15 Reorganisasi Sesuai Kebutuhan Sekretaris DJBC – Kushari Suprianto



## ■ Opini

- 20 Buku dan Revolusi Mental  
oleh: Yudhi Dharma Naully

## ■ Reportase

- 22 Pemerintah Kontinu Perbaiki Kemudahan Berusaha
- 23 Bea Cukai Gagalkan 14 ton Ekspor Ilegal Pasir Timah
- 24 Narkotika Hasil Operasi Bersinar 2016 Dimusnahkan



- 26 Patroli Laut Terpadu “Operasi Gerhana 2016” Hadang Arus Penyelundupan Di Perairan Selat Malaka



## ■ Galeri Foto

- 18 Tradisi Lompat Batu Nias

## ■ Profil Kantor

- 28 KPPBC Semarang Keluar dari Zona Nyaman





## 32 Bea Cukai Menjawab

## 33 Ruang Kesehatan

### ■ Sisi Pegawai

34 Kesungguhan Berbuah Hasil  
Rangga Julyan Rakhman



## 38 Infografis

### ■ Travel Notes

40 Menyaksikan Keekstriman Tomohon,  
Menikmati Keindahan Bunaken



## 43 Kicauan

## 44 Event

### ■ Peraturan

46 Dirjen Bea Cukai Tegaskan Transaksi *Sale and Lease Back* Tidak Masuk dalam Kategori Pemindahtanganan

## 47 Berbagi Pengetahuan

### ■ Sejarah

51 KAPAL PATROLI BEA CUKAI PERTAMA  
UNTUK DAERAH I TANJUNG PRIOK

### ■ Hobi dan Komunitas

52 CCC Tour De Kawah Putih Ranca Buaya  
"Obat Kangen Goweser Sejati"

### ■ Feature

55 "...BOTAN OOH BOTAN..!"  
(Di Laut Kita Mencari Prestasi)

### ■ Kebijakan

60 DEKLARASI INISIATIF

### ■ ENGLISH PAGE

#### THE MAIN REPORT

62 Improvement for a Better Directorate General of  
Customs and Excise

65 DGCE Reorganization

#### 69 Interview:

**Kushari Suprianto**, Executive Secretary of  
Directorate General of Customs and Excise  
**Reorganization of DGCE**

#### POLICY

72 VOLUNTARY DECLARATION

#### REPORTAGE

73 The Government Continuously Improves the  
Ease of Doing Business

74 Destruction of Confiscated Narcotics from  
Operasi Bersinar 2016

76 Integrated Sea Patrol "Operasi Gerhana 2016"  
Prevent Smugglings in Strait of Malacca

78 Indonesian Customs prevented the Illegal  
Exportation of 14 tonnes of Tin Ore

#### FEATURE

79 "... Botan ooh Botan..!"  
(On the Sea, We're Looking for Achievement)

# Berbenah Menuju Bea Cukai yang Makin Baik

*Dari sembilan program Nawa Cita yang diagendakan pemerintah, terdapat empat butir yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Butir pertama, yaitu memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Kedua, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Ketiga, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. Keempat, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.*

Untuk mewujudkan program pemerintah ini, tentu DJBC sebagai salah satu ujung tombak pemerintah harus mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai *trade facilitator* – memfasilitasi perdagangan, *industrial assistance* – memberikan dukungan terhadap perkembangan industri, *community protector* – melindungi masyarakat dari pemasukan barang-barang ilegal dan berbahaya, serta sebagai *revenue collector* – menghimpun penerimaan negara secara optimal.

Sekretaris Direktorat Jenderal **Kushari Suprianto** mengatakan bahwa untuk menuju DJBC yang lebih baik dapat didorong paling tidak dari tiga aspek, pembenahan organisasi, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur. Etos kerja dan karakter pegawai bea cukai secara berkesinambungan

terus dibina dan diarahkan supaya memiliki integritas tinggi. Karena, sehebat apapun strategi dan konsep yang diciptakan, pada akhirnya karakter pegawai yang melaksanakan menjadi kunci dari keberhasilan yang dicapai.

“Memang tidak mudah untuk merubahnya, tetapi pimpinan DJBC mulai dari Direktur Jenderal, Direktur, Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan dengan tegas memberikan arahan kepada pegawai supaya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya penuh dengan integritas,” ujar Kushari.

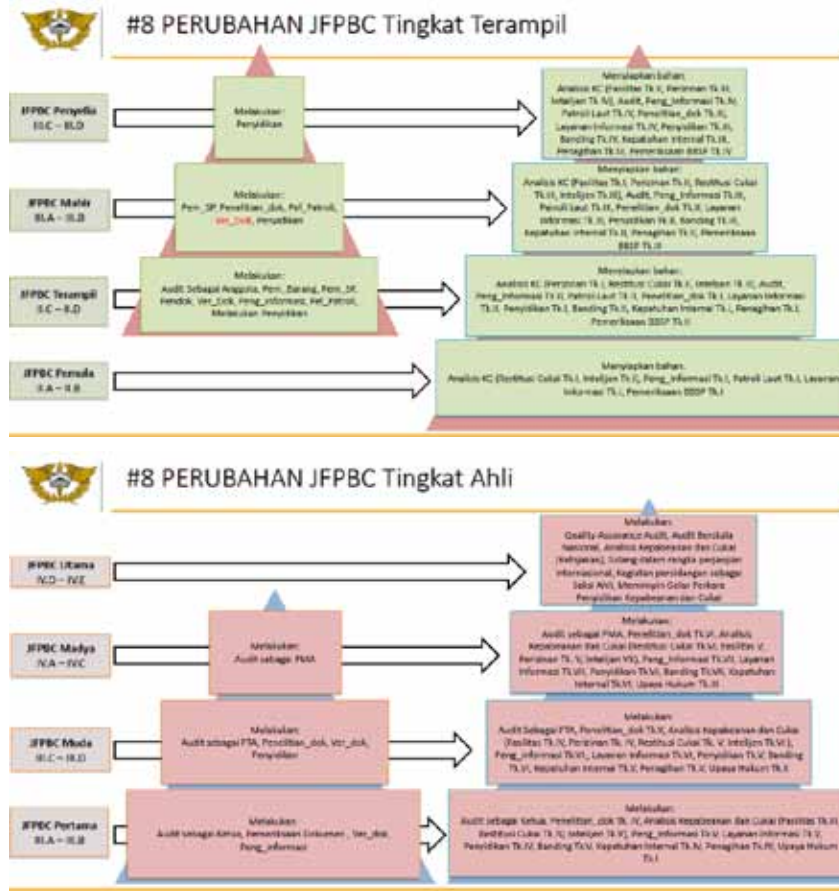
Program pengembangan pegawai yang dilakukan DJBC supaya memiliki kualitas dan integritas tinggi sudah banyak dilakukan, baik yang sifatnya memotivasi maupun memberikan efek jera sesuai dengan pemberlakuan system *reward* dan *punishment*. Arahan untuk membentengi pegawai



**untuk menuju DJBC yang lebih baik dapat didorong paling tidak dari tiga aspek, pembenahan organisasi, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur.**

**Kushari Suprianto**  
Sekretaris Direktorat Jenderal

dari perbuatan yang tidak terpuji pun sering dilakukan seperti pada acara Hari Anti Korupsi, pengendalian gratifikasi serta berupa seminar/forum diskusi



dengan menghadirkan pembicara para pakar akademisi, profesional maupun dari pemuka agama.

Di sisi lain, pimpinan DJBC tidak hanya menuntut pegawai untuk bekerja dengan integritas tinggi, tetapi mereka juga terus berjuang melalui pengambilan keputusan atau kebijakan-kebijakan baru yang bertujuan agar pegawai dapat bekerja dengan aman dan nyaman. Salah satu wujud upaya tersebut adalah memenuhi kebutuhan dan memperhatikan jenjang karir pegawai.

Menurut Kushari, dalam memenuhi kebutuhan pegawai, telah disusun langkah-langkah yang lebih baik, terutama terkait pemenuhan kebutuhan dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawab di lapangan. Sebagai contoh yakni berupa penambahan uang berlayar anak buah kapal (ABK), uang kumandah

maupun dalam bentuk insentif atau premi lainnya.

**Jabatan Fungsional**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang ASN serta Grand Design dari Reformasi Birokrasi yang menuntut keberadaan Aparatur Sipil Negara yang profesional, maka sejalan dengan salah satu program di dalam Renstra DJBC Tahun 2015-2019 adalah melalui pengembangan jabatan fungsional DJBC. Jabatan fungsional merupakan kebutuhan yang mendesak untuk diwujudkan sehubungan dengan terus berkembangnya tantangan dalam menjalankan tugas dan fungsi DJBC serta keterbatasan formasi jabatan struktural yang tersedia. Selain itu, boleh dikatakan bahwa pegawai bea cukai termasuk orang-orang pilihan yang memiliki kualitas dan kemampuan di atas rata-rata,

sehingga keinginan setiap pegawai untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi baik melalui kedinasan maupun pribadi sangat tinggi. Sedangkan jenjang karir dalam struktur organisasi DJBC sangat terbatas.

Permasalahan ini secara tidak langsung membuat komposisi pegawai DJBC menggelembung di tengah, dalam arti pegawai yang memiliki golongan tiga ke atas melebihi kapasitas. Dari 14.108 pegawai di seluruh lingkungan DJBC, sebanyak 10.379 orang merupakan jabatan fungsional umum (JFU), dengan 4.607 pegawai (pangkat III/b sd IV/d). Untuk ruang struktural Eselon V sampai dengan Eselon I hanya sejumlah 2.693 pegawai. Selanjutnya formasi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) saat ini hanya berjumlah 326 pegawai, sehingga terdapat 1.588 pegawai pada pangkat dan golongan ini belum menduduki jabatan struktural maupun fungsional.

Sedangkan dalam struktur organisasi yang baku (tradisional) sebaiknya komposisi pegawai berbentuk piramida atau mengerucut dari bawah ke atas, mulai dari pegawai pelaksana hingga pegawai yang memiliki golongan tertinggi. Kondisi klasik ini belum ada jalan keluarnya dan secara tidak langsung dikhawatirkan akan berdampak kepada menurunnya motivasi pegawai, yang lebih jauh berdampak terhadap kinerja organisasi.

Untuk itu, DJBC melalui Kementerian Keuangan sedang memperjuangkan agar organisasi DJBC memiliki wadah jenjang karir melalui jalur fungsional. Menurut Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (OTL) **Deny Isworo Makirtyo Tustowardoyo**, selama ini DJBC telah memiliki jabatan fungsional yaitu pejabat fungsional pemeriksa dokumen (PFPD) dan





Situasi rapat di Kementerian PAN-RB.

Auditor. Namun apabila pejabat yang bersangkutan sudah tidak menjabat lagi khususnya PFPD dengan sendirinya kembali ke struktural menjadi pegawai pelaksana. Hal ini secara tidak langsung merugikan organisasi DJBC, karena dapat memperburuk karakter dan etos kerja pegawai.

Jabatan fungsional pada Auditor sudah lebih baik, bentuknya mengerucut sampai ke atas, tetapi belum sampai pada jabatan fungsional utama yang setingkat dengan golongan IV/d-IV/e, hanya sampai pada jabatan fungsional ahli madya dengan golongan IV/a-IV/c yaitu Pengawas Mutu Audit (PMA). Sedangkan PFPD hanya sampai pada ahli muda yang setingkat dengan golongan III/c-III/d.

Apabila usulan DJBC dalam mengembangkan jabatan fungsional berhasil diwujudkan, jenjang karir jabatan fungsional akan lebih pasti dan ruang jabatan

akan lebih banyak karena jabatan pada struktural sangat terbatas. Apalagi kondisi saat ini masih banyak unsur kegiatan DJBC yang seharusnya dikerjakan fungsional tetapi belum sepenuhnya dikerjakan, hanya dua diantaranya yang dilaksanakan yaitu audit dan penelitian dokumen. Semua jabatan fungsional nantinya akan disebut sebagai Pejabat Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, ada yang tugasnya sebagai auditor, pemeriksa dokumen, pemeriksa barang, pemeriksa jasa titipan, pemeriksa keberatan banding, pengelolaan informasi, dan analisis kepabeanaan dan cukai termasuk fasilitas, perizinan, keberatan, data base nilai pabeaan dan intelijen.

Jabatan Fungsional DJBC ini akan diisi dengan formasi jenjang jabatan fungsional mulai dari Jabatan Fungsional Ahli Pertama (Golongan III/a-III/b) setara dengan Kepala Sub Seksi (Kasubsi) atau Eselon V, Jabatan Fungsional

Ahli Muda (Golongan III/c-III/d) setara dengan Kepala Seksi (Kasi) atau Eselon IV, Jabatan Fungsional Madya (Golongan IV/a-IV/c) setara dengan Kepala Bagian (Kabag) atau Eselon III, Jabatan Fungsional Ahli Utama (Golongan IV/d-IV/e) setara dengan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) atau Eselon II.

Kelebihan jenjang karir pada jabatan fungsional jika dibandingkan dengan jabatan struktural, kemungkinan besar kenaikan pangkat atau golongan lebih terjamin pada jabatan fungsional. Pangkat atau golongan pada jabatan struktural tidak akan naik apabila yang bersangkutan tidak naik jabatan. Misalnya pangkat atau golongan seorang Kepala Seksi (Eselon IV) akan berhenti pada golongan IV/a sampai pensiun kalau tidak ada kenaikan jabatan ke Eselon III. Itupun kalau yang bersangkutan sudah meraih gelar sampai S-2.





**DBJC telah memiliki jabatan fungsional yaitu pejabat fungsional pemeriksa dokumen (PFPD) dan Auditor. Namun apabila pejabat yang bersangkutan sudah tidak menjabat lagi khususnya PFPD dengan sendirinya kembali ke struktural menjadi pegawai pelaksana.**

**Deny Isworo Makirtyo Tusthowardoyo**  
Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (OTL)

Begitu juga pejabat Eselon III akan terhenti pangkatnya pada golongan IV/b sampai pensiun apabila tidak ada kenaikan jabatan ke Eselon II.

Akan tetapi pada jabatan fungsional, seorang pejabat bisa mencapai pangkat golongan sampai dengan IV/e, apabila pejabat tersebut terus melakukan pekerjaannya dengan baik dan lulus dalam uji kompetensi sehingga memperoleh pengakuan jabatan (*inpassing*). Dengan demikian ada pilihan dan jabatan fungsional akan semakin diminati pegawai, tergantung dari pejabat yang bersangkutan, mau berkarir di jabatan struktural atau di jabatan fungsional.

Secara kelembagaan keuntungan dari jabatan fungsional ini menciptakan butir kegiatan pemeriksa bea dan cukai di setiap unit instansi vertikal DJBC yang akan berdampak terhadap dapat diminimalisasinya perpindahan pegawai secara diagonal dari jabatan struktural

ke jabatan fungsional dan sebaliknya. Selain itu akan memberikan dampak positif terhadap DJBC karena diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja pegawai dan yang pada akhirnya dapat meningkatkan potensi penerimaan negara dari DJBC.

Selain mengusulkan pengembangan jabatan fungsional, saat ini juga sedang diperjuangkan perkembangan organisasi instansi vertikal DJBC sesuai dengan terealisasinya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan dengan menambah direktorat baru dan bidang-bidang kerja pada direktorat yang ada di kantor pusat dan akan dibahas pada tulisan kedua.

Sarana dan prasarana kerja pun perlu mendapat perhatian. Tuntutan dunia usaha terhadap pelayanan kepabeanan dan cukai yang cepat dan murah dalam menghadapi persaingan harus mendapat dukungan DJBC. Terutama kinerja bea dan cukai perlu ada terobosan baru menuju perubahan yang lebih baik. Sarana dan prasarana kerja disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan kerja, termasuk penggunaan komputerisasi dan

teknologi informasi yang selama ini sudah digunakan terus diperbaharui dan dikembangkan dengan inovasi-inovasi baru. Begitu pula mengenai penambahan kapal patroli, bahkan dulu DJBC pernah memiliki beberapa unit pesawat udara dalam mendukung tugas dan fungsinya di lapangan, hal ini mungkin perlu dipertimbangkan kembali pengadaannya.

Apalagi setelah kesepakatan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) diberlakukan, persaingan bisnis, investasi dan tenaga kerja antar negara di kawasan ASEAN semakin ketat. Semua negara berbenah diri untuk memanfaatkan kesepakatan ini sehingga dapat memenangkan persaingan. Pengusaha sebagai pelaku pasar tentu harus mendapat dukungan positif dari pemerintah sebagai regulator yang menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan dan juga sebagai fasilitator. Di kawasan ASEAN, Indonesia termasuk negara yang memiliki jumlah penduduk paling besar. Jangan sampai negara ini hanya menjadi market bagi negara lain dan produk-produknya kalah bersaing dengan negara tetangga.

**(Piter)**



# Penataan Organisasi DJBC

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) melakukan penataan organisasi secara berkesinambungan dalam merespon perubahan lingkungan yang dinamis. Pada tahun 2015, salah satu penataan organisasi yang telah dilakukan adalah menambah kantor pelayanan baru, peningkatan status kantor pratama menjadi kantor madya, serta peningkatan status kantor madya menjadi kantor pelayanan utama.



## REORGANISASI DJBC



NOMENKLATUR		ESELONISASI PMK 206/2014		ESELONISASI PMK 234/2015	
PMK 206/2014	RPMK 2015	III	IV	III	IV
1. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL	1. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL	5	19	6	22
2. DIREKTORAT TEKNIS KEPABEANAN	2. DIREKTORAT TEKNIS KEPABEANAN	4	16	6	23
3. DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN	3. DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN	3	10	5	18
4. DIREKTORAT CUKAI	4. DIREKTORAT TEKNIS DAN FASILITAS CUKAI	3	10	4	13
5. DIREKTORAT PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN	10. DIREKTORAT PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN	5	18	6	23
6. DIREKTORAT AUDIT	9. DIREKTORAT AUDIT KEPABEANAN DAN CUKAI	3	10	4	14
7. DIREKTORAT KEPABEANAN INTERNASIONAL	5. DIREKTORAT KEPABEANAN INTERNASIONAL DAN ANTAR LEMBAGA	3	10	5	21
8. DIREKTORAT PENERIMAAN DAN PERATURAN KEPABEANAN DAN CUKAI	6. DIREKTORAT KEBERATAN BANDING DAN PERATURAN	4	11	4	13
9. DIREKTORAT INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI	7. DIREKTORAT INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI	5	15	4	14
10. PUSAT KEPATUHAN INTERNAL KEPABEANAN DAN CUKAI	8. DIREKTORAT KEPATUHAN INTERNAL	3	10	4	13
	11. DIREKTORAT PENERIMAAN DAN PERENCANAAN STRATEGIS	0	0	3	10
	<b>JUMLAH</b>	<b>38</b>	<b>129</b>	<b>51</b>	<b>184</b>

### SEKRETARIAT DJBC

D i penghujung tahun 2015, Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Implikasi

dari peraturan tersebut bagi DJBC adalah penambahan jabatan struktural, serta penguatan tugas dan fungsi DJBC di lingkungan kantor pusat. Reorganisasi ini diharapkan dapat menjawab tantangan dalam mengimplementasikan visi dan misi DJBC serta



**Bea Cukai adalah armada yang kedua setelah Angkatan Laut di NKRI sejak kemerdekaan. Sehingga tugas-tugas negara yang dibebankan terkait dengan kegiatan di laut termasuk patroli dan pengawasan sejak Indonesia merdeka, bea cukai sudah aktif di sana.**

**Agus Yulianto**  
Kasubdit Patroli Laut

meningkatkan sinergi antar unit dalam pelaksanaan tugas.

Menurut Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (OTL) **Deny Isworo Makirtyo Tustowardoyo**, selain mengikuti perubahan lingkungan yang dinamis, hal yang menjadi latar belakang dilakukannya penataan organisasi DJBC adalah untuk mengkomodir usulan cetak biru Transformasi Kelembagaan dan usulan setiap unit di kantor pusat DJBC. Hampir semua direktorat mengalami perubahan baik perubahan nomenklatur, pergeseran beberapa tugas dan fungsi dari satu unit ke unit lain, serta pengelompokan tugas dan fungsi yang memiliki karakteristik serupa.

Pada reorganisasi itu, ada juga peningkatan eselonisasi dari Eselon IV menjadi setingkat dengan Eselon III serta penambahan beberapa unit Eselon IV. “Perubahan dan penambahan

eselonisasi dilakukan dengan pertimbangan efektifitas kinerja organisasi serta mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu yang berkembang seiring dengan dinamisasi lingkungan,” ujar Deny Isworo.

Kantor pusat yang sebelumnya memiliki 8 Direktorat beserta 1 Sekretariat Direktorat Jenderal dan 1 Pusat Kepatuhan Internal, setelah dilakukan reorganisasi sesuai dengan PMK 234/PMK.01/2015, maka Kantor Pusat DJBC memiliki 1 (satu) Direktorat baru yaitu Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis dan perubahan Pusat Kepatuhan Internal yang sebelumnya berada di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan menjadi Direktorat Kepatuhan Internal.

Berdasarkan reorganisasi tersebut, diketahui bahwa 5 (lima) direktorat tidak mengalami perubahan nomenklatur yaitu, Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Teknis Kepabeanan, Direktorat Fasilitas Kepabeanan, Direktorat Penindakan dan Penyidikan dan Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai. Namun demikian dari kelima direktorat ini 4 (empat) direktorat diantaranya mengalami penambahan pada unit Eselon III dan Eselon IV, sedangkan satu direktorat yaitu Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai (IKC) bahkan mengalami pengurangan, yang tadinya memiliki lima unit Eselon III menjadi empat unit.

IKC sebelumnya membawahi fungsi manajemen risiko dan registrasi, fungsi ini dianggap tidak sesuai dengan rumpunnya, sehingga dikeluarkan. Subdirektorat manajemen risiko dimasukkan ke Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis, karena perencanaan dan risiko harus berjalan bersama-sama. Kemudian Subdirektorat Registrasi Kepabeanan

dimasukkan ke Direktorat Teknis Kepabeanan. “Ini berkurang, tapi ada yang baru. Jadi IKC sekarang *full* masalah IT, semua pelayanan data, bisa dilihat pada strukturnya,” ujar Deny Isworo.

Sekretariat Direktorat Jenderal yang semula membawahi 5 (lima) unit Eselon III menjadi 6 (enam) unit yaitu pemekaran Bagian Kepegawaian menjadi dua, yakni Bagian Administrasi Kepegawaian dan Bagian Pengembangan Pegawai. Pada Direktorat Teknis Kepabeanan yang tadinya membawahi 4 (empat) subdit bertambah 2 (dua) subdit yaitu Subdit Registrasi Kepabeanan dan Subdit Program Prioritas dan AEO (*Authorized Economic Operator*).

Menurut Kasubdit Program Prioritas dan AEO **Muhamad Mufti Arkan**, subdit ini memiliki 2 (dua) program andalan yang diharapkan menjadi ujung tombak DJBC dalam membantu percepatan pergerakan pertumbuhan ekonomi nasional dan ikut berperan aktif menjaga stabilitas perdagangan internasional dengan menerapkan standarisasi yang tinggi dan diakui oleh dunia. Program tersebut adalah Mitra Utama (MITA) Kepabeanan dan AEO.

MITA Kepabeanan, dulunya adalah Jalur Prioritas berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 11/BC/2005 dan perubahannya Nomor 6/BC/2006, merupakan program yang diciptakan dalam rangka memperbaiki iklim investasi yang berdampak positif akibat kelancaran pemasukan barang impor. Selain itu DJBC beranggapan bahwa importir dan eksportir yang memiliki reputasi yang sangat baik dirasa perlu untuk diberikan pelayanan kepabeanan khusus yang adil, cepat, dan sederhana melalui Jalur Prioritas. Saat ini terdapat 113 (seratus tiga belas) Jalur Prioritas dan 167 (seratus enam puluh tujuh) Jalur Non-Prioritas





Menteri PAN-RB meninjau Bea Cukai.

yang mana penetapannya adalah melalui permohonan kepada Direktorat Teknis Kepabeanan. Seiring berjalannya waktu, lahirlah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2015 tentang Mitra Utama Kepabeanan yang menyebutkan bahwa Jalur Prioritas dan Non-Prioritas akan melebur menjadi MITA Kepabeanan setelah melewati evaluasi yang mendalam dari Subdit Program Prioritas dan AEO.

AEO merupakan program yang diakui secara internasional karena merupakan inisiatif dari *World Customs Organizations (WCO)* yang dituangkan dalam bentuk sebuah standar yang disebut WCO SAFE FoS (*Framework of Standard*) pada tahun 2005. Untuk memperoleh pengakuan sebagai AEO tidak mudah, perusahaan harus dapat memenuhi 13 (tigabelas) persyaratan yang berhubungan dengan kepatuhan kepabeanan dan *security supply chain*. Oleh karena itu, AEO

merupakan jaminan yang diberikan pemerintah Indonesia melalui DJBC dan diakui oleh dunia. Perlu dipahami bahwa AEO bukan sebuah fasilitas melainkan sebuah *brand image* bagi pemiliknya sehingga secara totalitas mendapatkan kepercayaan secara nasional maupun internasional.

Subdit Program Prioritas dan AEO memiliki tugas yang sangat menantang di kemudian hari, sebagai contoh 2 (dua) program ini akan bisa menjadi salah satu solusi dalam masalah *dwelling time* yang melibatkan banyak kementerian dan lembaga. Berdasarkan data, dari Januari 2015 s.d April 2016, dihitung rata-rata/bulan, perusahaan-perusahaan Jalur Prioritas/MITA dan AEO waktu *dwelling time*-nya lebih cepat 1,5 hari dibandingkan jalur hijau. Ke depan AEO akan menjadi program sekelas Peraturan Pemerintah dan dapat diadopsi oleh seluruh kementerian lembaga yang

berhubungan dengan rantai pasok barang.

Selain Pengembangan Program AEO, DJBC melalui Direktorat Fasilitas Kepabeanan mengembangkan Pusat Logistik Berikat (PLB). “Presiden beberapa saat yang lalu telah meluncurkan PLB yang berorientasi pada kemudahan bisnis dan biaya logistik. Sinergi dengan AEO akan menjadi tolak ukur yang mengakomodasi rantai pasok barang dengan *speed* dan *security* skala internasional. Juga semoga akan menjadi salah satu langkah untuk mewujudkan bea cukai Indonesia menjadi *world class customs*,” ujar Mufti Arkan.

Sedangkan Direktorat Fasilitas Kepabeanan yang tadinya membawahi tiga subdit bertambah menjadi 5 (lima) subdit. Subdit kemudahan impor tujuan ekspor dan tempat penimbunan berikat dipecah menjadi dua subdit yaitu Subdit Tempat Penimbunan Berikat dan Subdit Fasilitas Impor



Tujuan Ekspor. Subdit yang baru pada direktorat ini adalah Subdit Fasilitas Kawasan Khusus.

Subdit Fasilitas Kawasan Khusus mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, pelaksanaan di bidang fasilitas kawasan perdagangan bebas dan kawasan ekonomi khusus. Pemberian perijinan dan fasilitas serta evaluasi dan harmonisasi kebijakan di bidang kawasan perdagangan bebas, pelabuhan bebas dan kawasan ekonomi khusus.

Hal yang tidak kalah penting adalah penambahan satu unit Eselon III pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan yakni

Subdit Patroli Laut. Menurut Kasubdit Patroli Laut, **Agus Yulianto**, sebelumnya, tugas dan fungsi patroli laut ada di bawah Subdit Penindakan. Namun, dengan perkembangan yang ada serta harapan-harapan besar supaya eksistensi dan efektivitas patroli laut bea cukai dalam pengawasan laut NKRI semakin kuat, penting adanya *dedicated maritime unit*, jadi unit yang khusus dedikasinya murni untuk melakukan pengawasan dan patroli di laut.

“Bukan sekedar dipisahkan dari Subdit Penindakan, tetapi dengan adanya subdit baru ini diberikan penguatan sehingga ada unit yang konsen tentang pengawasan di laut. Patroli laut bea cukai

memiliki sejarah panjang, Bea Cukai adalah armada yang kedua setelah Angkatan Laut di NKRI sejak kemerdekaan. Sehingga tugas-tugas negara yang dibebankan terkait dengan kegiatan di laut termasuk patroli dan pengawasan sejak Indonesia merdeka, bea cukai sudah aktif di sana,” ujar Agus Yulianto.

Selama ini, bea cukai telah hadir di sebagian wilayah Indonesia yang tingkat kerawannya tinggi, seperti Selat Malaka dan Singapura melalui keberadaan Kanwil Khusus Kepri yang tugas utamanya untuk melakukan pengawasan. Hanya saja itu dinilai bersifat mandiri, sporadis dan belum terintegrasi apalagi kalau bicara seluruh wilayah NKRI. Sehingga dipandang perlu adanya satu unit yang *dedicated* di kantor pusat untuk melakukan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan patroli dan operasi di laut dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai.

Diharapkan dengan penambahan subdit ini, fungsi pengawasan patroli laut bea dan cukai semakin kuat. Apalagi saat ini pelaksanaan tugas pengawasan laut DJBC belum berjalan dengan optimal. Indikasi tersebut dapat dilihat dari indikator makro yang terlihat atau dapat dirasakan oleh publik seperti isu kebocoran penerimaan negara dan penyelundupan, maupun indikator operasional yaitu tingkat aktivitas yang masih tidak sebanding dengan potensi pelanggaran dan tingkat utilisasi asset pengawasan laut yang masih rendah.

Ke depan, impian dan harapan besar DJBC dapat diwujudkan. Saat ini sedang mengembangkan dan berjuang untuk satu inisiatif strategis tambahan untuk bea cukai.



Rapat internal Kasubdit Program Prioritas dan AEO.

Inisiatif strategis itu adalah revitalisasi pengawasan laut bea dan cukai. Revitalisasi ini konsepnya nanti betul-betul ingin membentuk *dedicated maritime unit* yang kemudian punya pola organisasi, pola komunikasi yang komprehensif untuk pelaksanaan patroli laut.

“Inisiatif strategis yang akan dikerjakan dalam tiga-empat tahun ke depan ini, nanti menjadikan patroli bea dan cukai semakin kuat, khususnya untuk patroli di laut. Nah, untuk mengawali itu semua, menjadi tugas kerja dan tanggung jawab Subdit Patroli Laut,” ujar Agus Yulianto.

Sementara lima unit Eselon II kantor pusat yang mengalami perubahan nomenklatur adalah; Direktorat Cukai menjadi Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai, Direktorat Audit menjadi Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Kepabeanan Internasional menjadi Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga, Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai menjadi Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan, serta Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai yang sebelumnya dipimpin Kepala Pusat (Kapus) berubah nomenklatur menjadi Direktorat Kepatuhan Internal yang dipimpin Direktur.

Deny Isworo mengatakan, pertimbangan untuk merubah nomenklatur Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai menjadi Direktorat Kepatuhan Internal agar lebih mengefektifkan koordinasi dengan unit di lingkungan DJBC. Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Keuangan supaya di dalam struktur organisasi masing-masing unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan terdapat unit kontrol internal.

Sedangkan pembentukan Direktorat Penerimaan dan

Perencanaan Strategis di kantor pusat DJBC merupakan unit kerja yang terkait transformasi kelembagaan dan perencanaan tersendiri agar tercipta fungsi organisasi dengan baik yaitu organisasi yang mempunyai fungsi perencanaan (*planning*), fungsi pengorganisasian (*organizing*), fungsi pelaksanaan (*actuating*), dan fungsi pengendalian (*controlling*).

“Pembentukan Direktorat Kepatuhan Internal dan Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis ini juga untuk menindaklanjuti rekomendasi Tim *Quality Assurance* dan Reformasi Birokrasi Nasional (QA RBN) tahun 2011,” ujar Deny Isworo menjelaskan.

Sementara itu penataan organisasi Direktorat PPKC menjadi Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan bertujuan agar dalam rangka penguatan tugas dan fungsi di bidang keberatan, banding dan peraturan dapat menjadi langkah strategis dalam perwujudan *regulatory reform* (pembenahan aspek legalitas) yang menjadi salah satu prioritas Reformasi Birokrasi Jilid II.

“Hal ini merupakan upaya DJBC dalam menjawab tantangan dan hambatan dalam rangka memberikan pelayanan dan melakukan pengawasan optimal melalui peningkatan kualitas peraturan, harmonisasi peraturan, dan pemberian bantuan hukum yang efektif dan efisien, sehingga diharapkan berdampak signifikan terhadap peningkatan persepsi kepercayaan pemangku kepentingan kepada DJBC,” jelas Deny Isworo.

Di sisi lain, fungsi penerimaan yang sebelumnya melekat pada Direktorat PPKC yang bergabung dengan fungsi perencanaan menjadi direktorat tersendiri yakni Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis. Karena kegiatan perencanaan pada dasarnya dilakukan untuk

mengoptimalkan penerimaan negara yang diemban oleh DJBC sebagai *revenue collector*.

Begitu juga dengan Subdit Humas yang sebelumnya termasuk salah satu subdit di PPKC dipindahkan ke Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga. Pindahkan subdit ini dipandang perlu karena sesuai dengan cetak biru transformasi kelembagaan bahwa keduanya memiliki karakteristik yang serupa yakni melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak eksternal DJBC.

Dengan adanya reorganisasi di kantor pusat DJBC ini otomatis akan berpengaruh terhadap jumlah sumber daya manusia serta jumlah jabatan yang cukup signifikan. Pejabat inti atau Eselon II menjadi 10 orang, pejabat Eselon III yang sebelumnya 38 orang bertambah 13 jabatan baru menjadi 51 orang. Sedangkan jabatan di tingkat Eselon IV yang tadinya hanya 129 orang bertambah sebanyak 55 jabatan baru menjadi 184 orang, (lihat tabel).

Menurut Deny Isworo, dengan adanya perubahan organisasi yang begitu signifikan pada kantor pusat DJBC, dengan sendirinya akan mempengaruhi agenda penataan organisasi instansi vertikal DJBC ke depan. “Adapun pada tahun 2016, agenda penataan organisasi instansi vertikal DJBC adalah melakukan pembahasan bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dan Biro Organisasi Ketatalaksanaan (Organta) Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Sementara untuk penyusunan naskah akademis terkait patroli laut DJBC sudah selesai dan saat ini menunggu pembahasan dengan Kementerian PAN-RB dan Biro Organta Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan,” ujarnya Deny Isworo.

**(Piter)**

# Reorganisasi Sesuai Kebutuhan

Kushari Suprianto, Sekretaris DJBC



**S**etelah beberapa kali melakukan reorganisasi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) secara bertahap terus melakukan pembenahan organisasi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Beberapa tahun sebelumnya, DJBC melakukan reorganisasi instansi vertikal melalui penambahan kantor pelayanan dan peningkatan status kantor pratama menjadi madya atau kantor madya menjadi kantor pelayanan utama.

Baru-baru ini, reorganisasi DJBC khusus dilakukan di Kantor Pusat. Apa saja yang menjadi latar belakang perubahan, maksud dan tujuannya serta bentuk organisasi

DJBC kedepan? Untuk lebih lengkapnya, berikut wawancara khusus dengan **Kushari Suprianto**, Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

**Bisa bapak jelaskan apa yang menjadi latar belakang sehingga diadakan reorganisasi DJBC?**

Diawali dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional yang memiliki program Nawa Cita untuk memperkuat setiap Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah dalam mengawal pembangunan nasional. Hal tersebut mendasari penguatan peran, tugas, dan fungsi dari Kementerian Keuangan yang diakomodir di dalam Peraturan

Presiden Nomor 28 tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan. Di dalam peraturan tersebut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mendapat penguatan peran, tugas, dan fungsi yang mana hal tersebut diakomodir melalui penambahan ruang struktur unit Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV.

**Dengan adanya reorganisasi DJBC ini, secara garis besar, apa yang ingin dicapai?**

Keselarasan tugas dan fungsi organisasi DJBC sesuai yang dimandatkan Undang-undang Kepabeanan dan Undang-undang Cukai dalam menjawab tantangan implementasi visi misi DJBC serta meningkatkan sinergi antar unit dalam pelaksanaan tugasnya.

**Reorganisasi kali ini kelihatannya khusus untuk membenahi direktorat dan sub direktorat di kantor pusat, bisa bapak jelaskan?**

Bahwa organisasi DJBC terdiri atas 3 (tiga) besaran yakni Kantor Pusat DJBC, Instansi Vertikal DJBC, dan Unit Pelaksana Teknis DJBC. Pembenahan terhadap organisasi DJBC dilakukan secara bertahap, yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan strategis DJBC. Pada tahun 2014 telah dilaksanakan penataan organisasi instansi vertikal DJBC. Pada tahun 2015, sejalan dengan arah kebijakan nasional maka mutlak untuk dilakukan penataan organisasi kantor pusat DJBC.







Adapun penataan organisasi kantor pusat meliputi pembentukan Direktorat Kepatuhan Internal dan Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis. Reorganisasi tersebut dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Tim *Quality Assurance* dan Reformasi Birokrasi Nasional (QA RBN) Tahun 2011; Pembentukan unit yang berperan dalam mengawal skema *Free Trade Agreement* (FTA) dan *Authorized Economic Operator* (AEO); serta penambahan eselonisasi untuk mengefisienkan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu yang berkembang seiring dengan dinamisasi lingkungan.

**Sebelumnya ada kabar, bagian humas akan dibentuk menjadi satu direktorat (setingkat Eselon II). Mengapa DJBC belum merealisasikannya?**

Di era informasi saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa peran unit di bidang kehumasan bagi suatu organisasi adalah sangat penting. Peran penting di bidang kehumasan antara lain untuk memenuhi tuntutan dalam pemberian layanan komunikasi teknis kepabeanaan dan cukai; mediator antara DJBC dan publik; instrument untuk mempengaruhi dan mengubah padangan dan perilaku publik (membangun opini publik); *expert prescriber*; dan *problem solving process facilitator*.

Namun, karena keterbatasan ruang dan struktur organisasi DJBC yang diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, maka dalam reorganisasi kantor pusat DJBC saat ini bidang kehumasan belum dapat diberikan struktur setingkat Eselon II. Untuk mengakomodir tugas dan fungsi di bidang kehumasan, saat ini sudah diakomodir dengan pemberian 2 (dua) ruang struktur setingkat Eselon III untuk kehumasan

yakni Subdirektorat Komunikasi dan Publikasi dan Subdirektorat Penyuluhan dan Layanan Informasi.

**Bagaimana dengan Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pelayanan Utama (KPU), apakah ada perubahan?**

Tentunya, apabila terdapat perubahan signifikan pada tugas dan fungsi di kantor pusat DJBC, hal tersebut juga mempengaruhi agenda penataan organisasi instansi vertikal DJBC. Adapun, pada tahun 2016, agenda penataan organisasi instansi vertikal DJBC adalah melakukan pembahasan bersama Kementerian PAN-RB dan Biro Organisasi dan Tatalaksana (Organta) Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan.

**Sehubungan dengan reorganisasi ini, bagaimana kesiapan sumber daya manusia (SDM), apakah nantinya ada penambahan khusus?**

Bahwa di dalam penataan organisasi DJBC, kebutuhan akan SDM dan infrastruktur pendukungnya sudah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga kebutuhan akan SDM telah dipersiapkan beserta anggaran dan infrastruktur pendukungnya.

**Apakah ada rencana reorganisasi DJBC berikutnya, seperti penambahan Kantor Pelayanan atau Kantor Sarana Operasi?**

Ada. Sekretariat DJBC secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi (*money*) terhadap keseluruhan besaran organisasi DJBC. Hasil *money* ini menjadi dasar untuk penataan organisasi instansi vertikal DJBC. Penataan organisasi ini mencakup pemekaran, penambahan, penghapusan, dan penggabungan. Bahwa di tahun 2016, berdasarkan hasil *money* tersebut, akan

dilakukan penataan organisasi instansi vertikal DJBC. Hal yang sama juga direncanakan akan dilakukan penataan organisasi terhadap unit pelaksana teknis DJBC.

**Untuk mewujudkan DJBC yang lebih baik, selain membenahi struktur organisasi, menurut Bapak hal apalagi yang dilakukan?**

Struktur organisasi merupakan satu bagian dari pembenahan DJBC secara utuh. Selain struktur organisasi, terdapat pula manajemen SDM, struktur remunerasi, dan pembenahan infrastruktur. Hal ini tentunya secara bertahap akan dilakukan pembenahan sejalan dengan amanat dari Cetak Biru Transformasi Kelembagaan melalui Inisiatif Strategis Organisasi, SDM, dan Infrastruktur (OSI).

**Bagaimana dengan teknologi sarana dan prasarana yang digunakan saat ini, apakah sudah baik dan memadai untuk mendukung kinerja DJBC?**

Tidak dapat dipungkiri bahwa peran teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DJBC sangat vital. Untuk menyukseskan hal tersebut, tentunya infrastruktur di bidang teknologi informasi akan terus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi untuk mendukung kinerja DJBC secara optimal.

**Apakah ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan sehubungan dengan topik bahasan laporan utama ini?**

Kami dari Sekretariat menyampaikan apresiasi kepada semua pegawai DJBC yang telah menyukseskan peningkatan kinerja dimanapun unit kerjanya dan mohon agar tetap dipertahankan dan ditingkatkan demi pengembangan DJBC di masa yang akandatang. (\*)





## Tradisi Lompat Batu Nias

**F**ahombo, Hombo Batu atau dalam bahasa Indonesia "Lompat Batu" adalah olah raga tradisional Suku Nias. Olah raga yang sebelumnya merupakan ritual pendewasaan Suku Nias ini banyak dilakukan di Pulau Nias dan menjadi objek wisata tradisional unik yang teraneh hingga ke seluruh dunia. Mereka harus melompati susunan bangunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm.

FOTOGRAFER:  
MUCHAMAD ARDANI





# Buku dan Revolusi Mental

Oleh : **Anugrah Roby Syahputra,**

Penulis adalah Pelaksana Pemeriksa pada Kanwil DJBC Sumatera Utara, bergiat juga di komunitas Forum Lingkar Pena.



**S**anto George adalah seorang perwira gagah berdarah Yunani yang awalnya termasuk kesayangan Kaisar Romawi, Diokletianus. Dihormati sebagai martir Kristen, Santo George termasuk salah satu santo paling dihormati oleh Gereja Katolik, Anglikan, Ortodoks Timur dan Ortodoks Oriental. Dalam legenda *Santo George dan Sang Naga* yang dicatat Ernest Ingersoll, dikisahkan bahwa sang ksatria tangguh ini berhasil membebaskan seorang putri raja nan cantik dari cengkeraman seekor naga jahat di suatu tempat bernama Silene yang konon terletak di Libya. Ia menjemput takdir kematiannya pada tanggal 23 April Sebelum Masehi yang kemudian diperingati di berbagai penjuru dunia sebagai ritual religi.

Namun di Catalan, Spanyol kematian sosok ini diperingati dengan cara yang romantis. Kaum pria menghadihkan mawar merah kepada kekasihnya. Ini semata mengenang pengorbanan Santo George yang rela bertaruh nyawa demi perempuan yang dicintainya. Tradisi ini kemudian mulai berubah pada tahun 1925. Setelah mendapat kado mawar, para gadis membalas pemberian itu dengan sebuah buku. Pasalnya, dua tahun sebelumnya yaitu pada 1923 komunitas buku

di sana mulai merayakan momen tersebut sebagai hari literatur. Hal ini sebagai penghargaan kepada Miguel de Cervantes Saavedra. Cervantes dikenal sebagai pengarang *Don Quixote*, novel modern pertama di dunia.

Tradisi itu mendongkrak minat terhadap buku. Bahkan, lebih dari setengah penjualan buku di Catalan terjadi di seputar perayaan tersebut. Sekitar 400 ribu eksemplar buku terjual sebagai balasan lebih dari empat juta tangkai mawar. Akhirnya pada 1995, Badan PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Budaya (UNESCO) mengambil festival mawar dan buku itu dan menjadikannya Hari Buku dan Hak Cipta Sedunia. Kebetulan tanggal itu bertepatan hari ulang tahun kelahiran dan kematian sejumlah sastrawan tersohor seperti William Shakespeare, kematian Miguel de Cervantes, Inca Garcilaso de la Vega dan Josep Pla, dan kelahiran Maurice Druon, Manuel Mejia Vallejo dan Halldor Laxness. UNESCO memakai perayaan internasional ini untuk mempromosikan minat baca, mendorong penerbitan, dan penghormatan atas hak cipta.

## Bukan Sekadar Kenangan

Lantas setelahnya publik global kembali mengenang peringatan ini sebagai Hari Buku Sedunia. Dunia riuh, tapi Indonesia alpa. Tidak ada gegap gempita di sini. Hanya ada satu dua orang saja yang sadar lalu membuat status di media sosial, seraya menatap koleksi buku tebalnya yang bertumpuk debu pada rak yang jarang disapa. Tak jauh beda dengan sosialita yang membeli tas *branded* tapi nyaris tak pernah dipakai kecuali sekadar untuk diceritakan.

Sesudah itu, Indonesia sebenarnya juga punya Hari Buku

Nasional. Diambil dari tanggal berdirinya Ikatan Penerbit Indonesia pada 17 Mei, peringatan ini berderap dalam sunyi. Media massa luput mengulasnya sebab kalah menarik dengan berita korupsi. Sebuah jejaring toko buku raksasa yang memberi diskon 30% pun kalah saing dengan promo waralaba donat. Lagi-lagi hanya beberapa status facebook dan kicau twitter yang “merayakannya”. Inilah realitas kita apa adanya. Padahal sejarah telah menunjukkan pentingnya penghargaan terhadap buku.

Robert B. Downs (2001) dalam bukunya *“Books that Change the World”* menegaskan bahwa sepanjang sejarah dapat kita temui bukti bertumpuk-tumpuk yang menunjukkan bahwa buku bukanlah benda yang remeh, jinak, dan tak berdaya. Malah sebaliknya buku seringkali adalah biang yang bersemangat dan hidup, berkuasa mengubah arah perkembangan peristiwa yang kekuatannya tak terhingga, kadang-kadang demi kebaikan dan ada pula demi keburukan atau bentuk penjajahan baru (neokolonialisme).

Contoh pertama adalah Common Sense (Pikiran Sehat) karya Thomas Paine. Buku ini terbit pada 10 Januari 1776 dengan harga dua shilling (sebutan mata uang logam yang berlaku saat itu). Meski hanya setebal 47 halaman, buku ini laris manis. Dalam waktu tiga bulan saja, buku tersebut terjual habis 120.000 eksemplar. Perkiraan total penjualannya sekitar setengah juta eksemplar. Sungguh angka yang sangat fantastis di masa itu. Saat itu, setiap orang yang pandai membaca di ketiga belas koloni jajahan Inggris masa itu telah membaca buku ini. Buku inilah yang akhirnya memanggil kolonis-kolonis Amerika untuk bangkit memperjuangkan kemerdekaan



mereka tanpa syarat. Paine telah mengemukakan dalam bukunya bahwa revolusi adalah jalan satu-satunya untuk menyelesaikan persengketaan mereka dengan Inggris dan Raja George III. “Lantaran tidak ada cara lain mencapai tujuan kecuali ledakan-ledakan,” tulis pengarang kelahiran Nortfolk ini.

Berikutnya ada *Mein Kampf* buah karya Adolf Hitler. Buku ini ditulis ketika Hitler meringkuk di jeruji penjara Bavaria. Jilid pertama yang terbit tahun 1925 dipersembahkan untuk 16 pejuang Nazi yang gugur dalam pemberontakan Munich. Sementara jilid keduanya dicetak setahun setelahnya dengan ketebalan keduanya lebih dari 700 halaman. Di Jerman, sewaktu Perang Dunia II pecah pada 1939, lima juta eksemplar buku *Mein Kampf* telah diedarkan. Menurut Norman Cousins, seorang wartawan politik Amerika, “Buku *Mein Kampf* adalah buku yang paling efektif dalam abad ke-20. Bagi setiap kata yang terdapat di dalamnya 125 nyawa telah hilang; bagi setiap halaman 4.700 jiwa lenyap; dan bagi setiap bab lebih dari 1.200.000 nyawa melayang.”

Lalu mari kita lihat bagaimana kaum Yahudi yang sekian tahun terdiaspora ke berbagai penjuru dunia juga bangkit bersatu karena sebuah buku. Adalah *Der Judenstaat* karangan wartawan Austria Theodore Herzl yang mengawali semua itu. Diterbitkan di Leipzig, visi mendirikan negara yang menyatukan bangsa Yahudi sedunia ditegaskan di sana. Targetnya, lebih kurang 50 tahun negara itu sudah terbentuk. Ajaibnya impian kaum Zionis itu mewujudkan sesuai harapan pada 14 Mei 1948, setelah Israel memproklamkan pendiriannya, meskipun harus dengan menganeksasi tanah bangsa Palestina.

Beberapa fakta di atas sudah lebih dari cukup untuk meyakinkan kita akan kekuatan sebuah buku. Sejumlah tokohpun bahkan menulis buku ketika di dalam penjara. Sebut saja misalnya ideolog Ikhwanul

Muslimin di Mesir, Sayyid Quthb menulis kitab tafsir *Fii Zhilalil Qur'an* di dalam kurungan Liman Thurrah. Begitu pula sastrawan dan ulama nasional Buya Hamka yang mengarang Tafsir Al-Azhar dalam jeruji penjara Sukabumi. Di Turki ada pula Badiuzzaman Said Nursi yang merangkai pesan perlawanannya dari bilik prodeo. Melalui *Risalah Nur* ia gerakkan kesadaran massal untuk melakukan perubahan.

### Revolusi Budaya Literasi

Dalam penelitian *Most World Literate Nation* yang dilakukan oleh Central Connecticut State University, Indonesia menempati posisi 60 dari 61 untuk negara dengan tingkat literasi terbaik di dunia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengatakan, Indonesia hanya satu tingkat lebih baik dari Republik Botswana, sebuah negara di Afrika bagian selatan. (*beritasatu.com*, 13/4). Survei UNESCO juga menunjukkan kalau Indonesia adalah negara dengan minat baca paling rendah di ASEAN. Sementara itu, perbandingan jumlah buku (sastra) yang dibaca siswa SMA kita juga memprihatinkan. Kalau di Jepang, anak SMA wajib membaca 22 buku, sementara di negeri kita nol buku. Hal ini pernah disindir oleh penyair senior Taufiq Ismail dengan istilah “Tragedi Nol Buku”.

Tak hanya itu, hasil riset dari Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) maupun Programme for International Student Assessment (PISA) juga mencatat bahwa kemampuan memahami dan keterampilan menggunakan bahan-bahan bacaan, khususnya teks dokumen, pada anak-anak Indonesia usia 9-14 tahun berada di peringkat lima terbawah. Data-data ini sungguh membuat kita miris. Memprihatinkan.

Jika kita melirik pada Jepang dan negara-negara Eropa, maka yang membuat mereka maju adalah karena budaya literasinya (baca dan tulis) yang kuat. Mereka terbiasa

membaca di transportasi umum. Sekolah mereka juga mewajibkan beberapa menit sebelum memulai pelajaran dengan membaca. Tapi tentu saja dengan dukungan yang kuat dari pemerintahnya.

Sayangnya saat ini, kita belum benar-benar serius memperhatikan buku dan dunia literasi pada umumnya. Budayawan Sunda Ajip Rosidi pernah menyindir secara sarkastik, “Pemerintah tidak menganggap penting buku, tidak menganggap penting sastra, tidak menganggap penting rakyat gemar membaca. Seakan sengaja membiarkan rakyat tetap bodoh.”

Kampanye membaca baru sebatas jargon semata. Pengadaan buku hingga milyaran hanya jadi bancakan pejabat pengeruk duit rakyat. Duta baca yang ditunjuk justru tidak meneladankan kegemaran mendaras buku. Konon lagi menumbuhkan kultur menulis. Profesor dan doktor saja tertangkap melakukan plagiasi. Dosen dan guru membayar ghost writer demi segepok uang sertifikasi. Mungkin hanya komunitas-komunitas kecil yang menggiatkan diskusi di pojok taman kota atau serambi mushalla yang lumayan tulus berjuang untuk ini.

Ada baiknya kita mengingat pesan Milan Kundera ini, “Jika ingin menghancurkan sebuah bangsa dan peradaban, hancurkan buku-bukunya; maka pastilah bangsa itu akan musnah.” Jika masih belum bisa menggugah kepedulian kita bersama maka kenanglah Bung Hatta yang berkata “Aku rela di penjara asalkan bersama buku, karena dengan buku aku bebas.” Namun bila itu belum cukup menggerakkan, maka biarkanlah ilmuwan Denmark, Thomas Bartholin mengejek kita dengan pedas, “Tanpa buku Tuhan akan diam, keadilan akan terbenam, sains akan macet, sastra akan bisu, dan seluruhnya akan dirundung kegelapan”.

Percayalah, kalau kita tak serius merevolusi budaya literasi, maka omong kosong revolusi mental bisa kita jalankan. (\*)

# Pemerintah Kontinu Perbaiki Kemudahan Berusaha

Pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai langkah untuk memperbaiki kemudahan berusaha di Indonesia. Kementerian Koordinator Perekonomian dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terus melakukan langkah sinergis untuk mendorong kementerian dan instansi terkait lainnya untuk bersama-sama memperbaiki kemudahan berusaha di Indonesia. Salah satunya terkait survey tahunan kemudahan berusaha (Ease of Doing Business, EODB).

Kepala BKPM, Fanky Sibarani, menyampaikan bahwa salah satu langkah penting dalam kemudahan berusaha adalah melakukan deregulasi kebijakan dan menyosialisasikan kepada responden dan masyarakat. “Perbaikan yang akan dilakukan oleh pemerintah adalah menyesuaikan 40 peraturan, dari rencana tersebut, 29 peraturan telah disesuaikan,” ujarnya.

Menurut Fraky, perbaikan yang dilakukan diharapkan meningkatkan partisipasi pelaku usaha dalam negeri dalam perekonomian nasional, peningkatan ekspor dan penciptaan lapangan kerja. “Berbagai upaya berkelanjutan ini pada akhirnya bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Perbaikan kemudahan berusaha melalui penyederhanaan perizinan merupakan bagian dari Nawa Cita Presiden,” jelasnya.

Lebih lanjut Franky mengemukakan bahwa upaya pemerintah dilakukan terutama untuk meningkatkan partisipasi pelaku usaha dalam negeri sekaligus mengakselerasi

pertumbuhan perekonomian nasional. “Perbaikan dilakukan secara fundamental dengan melihat proses *end to end* untuk lebih memudahkan/menyederhakan prosedur, mempercepat waktu

**“Perbaikan kemudahan berusaha melalui penyederhanaan perizinan merupakan bagian dari Nawa Cita Presiden.”**

penyelesaian perizinan dan nonperizinan, serta efisiensi biaya dalam melakukan kegiatan usaha,” sebutnya.

Untuk mendapatkan perspektif dari stakeholder terkait perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan pemerintah, BKPM mengadakan kegiatan Dialog Investasi “Perbaikan Kemudahan Berusaha, Untuk Siapa?” di Jakarta dengan menghadirkan pembicara dari Keementrian Koordinator Perekonomian, BKPM. Pengamat Ekonomi dan Perwakilan Asosiasi Pengusaha.

Salah satu indikator EODB yakni memulai usaha, Pemerintah telah melakukan berbagai perbaikan dengan memangkas prosedur, waktu, dan biaya. Sebagai contoh, kalau dulu membutuhkan 13 prosedur dengan lama 48 hari sera biaya Rp 5,7 juta, sekarang hanya membutuhkan 7 prosedur dala 10 hari dan biaya 2,7 juta.

Staf Ahli Menko Perekonomian Bidang Pengembangan Daya Saing Nasional, Bambang Adi Winarso

menjelaskan bahwa pemerintah telah membuat website khusus yang memuat segala informasi terkait perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah (<http://eodb.ekon.go.id/>).

Sementara Direktur Riset Core Indonesia, M. Faisal, menitikberatkan perlunya pemerintah fokus untuk memperbaiki peringkat di dua indikator yakni indikator kemudahan berusaha (*starting a business*) dan indikator penegakan kontrak (*enforcing a contract*). “Indikator yang pertama Indonesia di peringkat 173 sementara yang kedua di peringkat 170,” paparnya.

Dengan perbaikan pada kedua indikator, diharapkan target Presiden Jokowi untuk mencapai peringkat 40 dapat tercapai. Faisal menambahkan bahwa dengan EODB saja belum cukup untuk mengukur iklim bisnis yang sehta di suatu negara. “indikator bias, kurang representatif, dan sub indikator sama. Selain itu, kemudahan berusaha bagi investor perlu memperhatikan kualitas investasi dan iklim bagi pekerja,” ungkapnya.

Direktur Deregulasi BKPM, Yuliot, menambahkan bahwa BKPM melihat survey indikator EODB sebagai satu hal yang memiliki arti strategis karena digunakan oleh berbagai negara untuk melihat iklim berusaha di suatu negara. “Perbaikan di dalam survey kemudahan berusaha ini diharapkan dapat mendorong minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia,” lanjutnya.

Sedangkan Ketua Asosiasi UKM Indonesia M. Ikhsan Ingratubun menyampaikan pengusaha UKM Indonesia tentu berharap bahwa perbaikan dlam hal survey juga tercermin secara nyata dalam kemudahan berbisnis di Indonesia. “Sehingga jelas bahwa perbaikan kemudahan berusaha ini sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia,” ujarnya. (\*)

# Bea Cukai Gagalkan 14 ton Ekspor Ilegal Pasir Timah

**S**atu kontainer berisi 14 ton pasir timah yang dilarang diekspor berhasil diamankan petugas Bea Cukai Bandar Lampung. Hal ini terungkap dalam acara konferensi pers yang diadakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Bandar Lampung yang mengambil tempat di area Pelabuhan Panjang Bandar Lampung, Selasa 12 April 2016.

Hadir dalam acara tersebut, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi, Direktur P2 DJBC Harry Mulya, Direktur PPKC Rahmat Subagyo, Kepala Kanwil DJBC Sumbagsel Aflah Farobi, Kepala Kanwil DJBC Khusus Kepri, Kanwil DJBC Banten, Kepala KPPBC Bandar Lampung Beni Novri (saat itu), seluruh Kepala Pangkalan Sarana Operasi DJBC, Perwakilan Kepala Dinas Tambang dan Energi Bandar Lampung, dan Direktur Kriminal Khusus Polda Lampung.

Pasir timah atau bijih timah yang diperkirakan senilai Rp 2,1 miliar itu rencananya akan diekspor PT WPS ke Singapura. Awal mulanya barang tersebut diberitahukan sebagai arang kayu (*Lumpwood Charcoal*) sebanyak 1 kontainer 40 feet. Menurut Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi, pada 8 April 2016 dilakukan pemeriksaan terhadap kontainer tersebut.

Dalam dokumen ekspornya diketahui bahwa barang yang akan diekspor berupa arang kayu sebanyak 16,69 ton yang dikemas dalam 40 karung besar (*jumbo bags*). Dari hasil pemeriksaan kontainer, diketahui bahwa dalam karung besar yang diberitahukan sebagai arang tersebut terdapat karung lain yang berisi pasir



timah. Dari 40 karung besar tersebut terdapat 14 karung besar yang berisi pasir timah dengan rincian keseluruhan adalah 280 karung kecil @50 kg, sehingga totalnya adalah 14.000 kilogram.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, barang ditegah. Saat ini sedang dilakukan penelitian lebih lanjut sesuai dengan ketentuan untuk dapat dilakukan pengembangan penindakan,” ujar Dirjen. Penyelundupan pasir timah sangat merugikan Indonesia karena akan menyebabkan harga timah semakin turun. Hal ini terjadi karena stok timah di pasaran dunia mengalami surplus, sehingga yang lebih diuntungkan adalah negara-negara lain yang menumpuk timah asal Indonesia dan mengakuinya sebagai timah produksinya. Semakin merosotnya harga timah tentu saja pada akhirnya dapat menambah angka pengangguran karena banyaknya

perusahaan yang tutup.

Menurut Dirjen, penambangan pasir timah dapat merugikan pendapatan negara karena negara tidak menerima PPN, PPh, dan Bea Keluar. Selain itu, daerah penghasil pun tidak menerima dana royalti pertambangan timah dari hasil ekspornya, sebagai akibat dari aktivitas ekspor dan pertambangan timah secara ilegal. Bijih Timah berasosiasi dengan unsur-unsur logam tanah jarang yang bernilai tinggi. “Pasir timah asal Bangka diketahui mengandung Serium (Ce), Itrium (Y), Titanium, dan Torium (Th), yang dapat digunakan untuk pembuatan senjata mengingat sifatnya yang ringan tapi sangat kuat, serta kandungan senyawa radioaktif lainnya seperti Uranium, yang semuanya berkaitan dengan masalah pertahanan dan keamanan negara,” pungkas Dirjen.

(supomo)



# Narkotika Hasil Operasi Bersinar 2016 Dimusnahkan



Kapolda dan Menteri Keuangan saat memberikan keterangan pers.

Beberapa waktu lalu ratusan kilogram narkotika hasil tangkapan operasi berantas sindikat narkotika (Bersinar) dimusnahkan, tepatnya pada tanggal 6 April 2016 di lapangan Kantor Kesyahbadaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cirebon. Pemusnahan ini dihadiri Kapolda Baharudin Haiti, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) atau yang mewakili, Kapolda Jawa Barat Moechgiyarto, Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi, dan pejabat daerah setempat lainnya.

Sebelum dilakukan pemusnahan, Kapolda menyampaikan bahwa jumlah penduduk Indonesia yang terkena narkoba saat ini cukup tinggi sekitar 4,5 juta orang. Angka yang cukup fantastis karena sekitar 2,3 % dari jumlah penduduk yang terkena narkoba. “Oleh karena itu, kita prihatin terhadap masalah ini dan Presiden memerintahkan kepada Kepolisian Negara RI, Badan Narkotika Nasional (BNN) dan seluruh unsur terkait termasuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk



Foto bersama.

melakukan operasi secara bersama dan serentak di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Dilatarbelakangi maraknya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba saat ini, telah membangkitkan komitmen untuk memerangi narkoba demi keselamatan masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan baik melalui pencegahan, penegakan hukum, serta terapi dan rehabilitasi.

Sebagai salah satu bentuk perang terhadap peredaran narkoba maka Polri, BNN, Bea Cukai serta instansi terkait lainnya telah menggelar Operasi Bersinar

2016. Operasi bersama antara BNN, Bea Cukai dan Polri serta aparat yang lain, berjalan dengan baik dan menghasilkan tangkapan yang cukup banyak. Baharudin berharap ke depan bisa dilakukan terus untuk bisa menekan, bisa memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika.

“Karena itu, saya mohon kepada rekan-rekan media untuk bisa mensosialisasikan, jangan sampai generasi-generasi muda kita terkena masalah narkoba. Apapun jenisnya, karena semua itu adalah merusak, mempunyai sifat yang ketergantungan, semakin hari

semakin banyak, kemudian yang terkena adalah susunan saraf sehingga mereka akan menjadi paranoid bahkan bisa menjadi kehilangan nyawa,” jelas Jenderal Polisi bintang empat itu.

Adapun barang bukti yang telah disita dan akan dimusnahkan merupakan hasil lama pelaksanaan Operasi Bersinar sejak 15-31 Maret 2016. Narkotika yang dimusnahkan adalah jenis shabu kristal seberat 139,26 kg, narkotika jenis shabu cair seberat 44,64 kg dan narkotika jenis ekstasi berjumlah 197.874 butir. Satu unit armada kapal besi Bahari I, dimana kapal ini telah disita oleh Ditnarkoba Bareskrim Polri karena digunakan membawa narkotika oleh sindikat internasional dan akan disidik Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Kapolri juga menambahkan bahwa minggu lalu telah dimusnahkan ganja hasil operasi di Aceh hampir 200 Ha lebih ladang ganja. Dikalkulasikan ladang ganja itu memiliki 579 ton ganja. Kalau sehari orang mengkonsumsi 5 gram ganja, berarti bisa menyelamatkan 100 juta lebih generasi muda bangsa.

Dalam kesempatan yang sama Menteri Keuangan menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan dalam hal ini DJBC diminta untuk bersama-sama dengan Polri, BNN dan instansi lainnya untuk mendukung operasi Bersinar yang intinya adalah bagaimana bisa mencegah masuknya narkoba ke wilayah Republik Indonesia. Khusus untuk yang dilakukan oleh Bea Cukai karena tugas Bea Cukai adalah menjaga di perbatasan atau di pintu-pintu masuk, bisa disampaikan bahwa dalam operasi bersinar ini yang paling banyak narkoba itu masuk melalui bandara Soekarno-Hatta.

Melalui Soetta terdapat 6 kasus di tahun 2016 ini yang sudah terdeteksi, kemudian pintu masuk yang harus diperhatikan



Pemusnahan barang bukti hasil operasi Bersinar.

adalah Batam 5 kasus, Jakarta dan Tanjung Balai Karimun masing-masing 2 kasus. Kemudian Bandung, Medan dan Tanjung Pinang satu kasus. Satu lagi adalah melalui paket di Kantor Pos Pasar Baru. Jadi kalau dilihat modus pengirimannya bermacam-macam, ada yang melalui bandara udara, melalui kapal laut dan paket pos.

Sebagai barang bukti yang berhasil ditegah DJBC sendiri antara lain, kristal bening diduga methamphetamine sebanyak 53 kg, ekstasi hampir 4.000 butir, hashish sebanyak 320 gram, ketamine 6 gram serta ganja 19,84 gram.

Modus membawanya kebanyakan adalah di dalam badan tersangka. Ada yang di balik baju, ada yang dimasukkan ke bagian badan sendiri dan ada melalui pos. Sekarang modus terbaru yaitu penyelundupan narkotika berupa sabu cair, asalnya bukan dari China tapi dari negara Asia lainnya.

Penyelundupan narkotika ke Indonesia paling banyak masuk melalui Malaysia. Kalau dilihat 70% kasus pencegahan narkotika berasal dari Negara tetangga ini dan sisanya ada yang dari Taiwan, Iran, Singapura, Belanda dan

Nigeria. Sebagai bentuk sinergi antara DJBC dengan BNN maupun Polri, maka barang bukti maupun tersangka sudah diserahkan kepada Polri dan BNN.

Statistik yang perlu menjadi perhatian adalah perbandingan periode Januari-Maret tahun 2016 dengan Januari-Maret tahun 2015. Kasus pencegahan narkotika ternyata kalau dilihat dalam 3 bulan pertama tahun ini meningkat hampir 237%. Jadi kira-kira 2,4 kali dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Di sisi positif artinya upaya pencegahan maupun penangkapan sudah dilakukan dengan baik oleh aparat termasuk oleh Bea Cukai, namun di sisi yang negatif tentunya harus diwaspadai karena Indonesia semakin dijadikan target atau sasaran untuk penyebaran narkoba. Tentunya ini merupakan tugas berat yang dapat menjadi tanggung jawab dari Polri, BNN serta termasuk BJBC. “Jadi itu yang ingin kami sampaikan dan tentunya kami mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerjasama yang baik dengan Polri dan BNN serta instansi terkait lainnya,” ujar Bambang mengahiri sambutannya.

(DesiPrawita/Piter)



## Patroli Laut Terpadu “Operasi Gerhana 2016” Hadang Arus Penyelundupan Di Perairan Selat Malaka



**P**atroli laut terpadu yang dilaksanakan selama satu bulan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) berhasil melakukan pemeriksaan kapal sebanyak 272 kali dan 27 penegahan, baik barang ekspor maupun impor.

Masih maraknya upaya penyelundupan barang ilegal antara lain, ballpress, produk pangan seperti bawang, beras, gula, dan narkoba yang berasal dari Malaysia dengan menggunakan kapal-kapal kayu yang dibawa masuk ke sepanjang pantai timur Sumatera, DJBC berinisiatif gelar operasi laut terpadu dengan sandi “Operasi Gerhana” 2016. Operasi ini untuk memberantas penyeludupan barang-barang ilegal ke Indonesia dan digelar serentak di 16 kantor DJBC di Sumatera meliputi; kantor DJBC Aceh, Sumut, Kepulauan Riau, Riau, Sumbar, Batam dan Tanjung Balai Karimun.

Pemberantasan penyelundupan dilakukan dengan meningkatkan

koordinasi internal Bea Cukai dan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya. Sinergi internal terus ditingkatkan, dan sinergi dengan aparat penegak hukum lainnya juga harus terus ditingkatkan. Dalam operasi tersebut, petugas Bea dan cukai bersinergi dengan instansi lainnya seperti TNI dan Polri.

“Kita bersinergi dengan TNI dan Polri. Pada tahun kemarin saja, kita berhasil melakukan penindakan di laut sebanyak 176 kali. Sementara, dalam 3 bulan belakangan ini sudah ada 80 kali. Kita harus waspada,” ujar Direktur Jenderal Bea Cukai Heru Pambudi saat memimpin Pembukaan Operasi patroli laut dengan sandi “Operasi Gerhana”.

Ia juga memaparkan bahwa upaya pemberantasan penyelundupan yang dilakukan oleh jajaran Bea Cukai salah satunya dilatarbelakangi dengan adanya perintah langsung Presiden Joko Widodo. Presiden, lanjut Heru, setidaknya telah

empat kali memerintahkan langsung kepada Bea Cukai mengenai upaya pemberantasan penyelundupan dengan melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya. Pemberantasan penyelundupan melalui laut yang dilakukan oleh Bea Cukai dan aparat penegak hukum lainnya dalam triwulan pertama tahun 2016 telah berhasil menindak sebanyak 30 kasus.

“Kalau upaya pemberantasan dilakukan konsisten, saya yakin penindakan sampai dengan akhir tahun 2016 akan maksimal,” ungkap Heru yang membuka Operasi Gabungan ini di dermaga terminal penumpang Ujung Baru yang dilaksanakan di pesisir pulau Sumatera.

Hasil Patroli Terpadu “Operasi Gerhana”

Berlangsung selama satu bulan, Operasi Gerhana berhasil melakukan 27 kali penegahan. Adapun 27 penyelundupan yang



berhasil digagalkan antara lain mengamankan barang bukti berupa 120 karung gula pasir, 25 karthou minuman Chan Lee Chai dengan kadar alkohol 35%, 50 karung bawang merah dan 50 tilam bekas. Penyelundupan itu dimuat oleh KM Suir Jaya GT 5. Untuk 26 kasus lainnya sebagian besar adalah penyelundupan kebutuhan bumbu dapur jenis bawang merah dan bawang putih. Semuanya merupakan hasil penindakan petugas patroli yang terlibat dalam operasi yang dilaksanakan di pesisir timur Pulau Sumatera dan berada di bawah kendali Direktorat Penindakan dan Penyidikan Kantor Pusat Bea Cukai. Operasi ini juga melibatkan unsur-unsur kapal patroli dari Kantor Wilayah DJBC Aceh, Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara, Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau, Kantor Wilayah DJBC Riau Dan Sumatera Barat, Kantor Pelayanan Utama DJBC Tipe B Batam, Pangkalan Sarana Operasi Bea Dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun, dan Pangkalan Sarana Operasi Bea Dan Cukai Tipe B Batam.

Dari tindakan penegahan tersebut berhasil diamankan beberapa kapal yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan penyelundupan yang berhasil ditangkap di berbagai lokasi di perairan Selat Malaka dan di sepanjang pesisir timur Pulau Sumatera.

Sebagian dari kapal tangkapan tersebut, kini dilimpahkan ke kantor pelayanan bea cukai terdekat untuk dilakukan penyidikan. Hal ini dilakukan semata-mata untuk pertimbangan efisiensi. Beberapa kapal tangkapan tersebut diserahkan ke Kantor Bea Cukai terdekat untuk proses lebih lanjut. Pelimpahan penyidikan beberapa kapal tersebut disesuaikan dengan lokasi penangkapan. "Sesuai dengan *'locus delicti'*-nya,

Operasi Gerhana yang melibatkan sekitar 300 personel Bea dan Cukai se-Sumatera didukung enam kapal patroli cepat Fast Patroli Boat (FPB) 28 meter, speedboat dan dua kapal Very Slender Vessel (VSV) dengan total kapal patroli yang dikerahkan sebanyak 16 unit dan di periode kedua sebanyak 14 unit. Khusus bagi Kanwil DJBC Khusus Kepri, operasi ini sangat penting dikarenakan perairannya berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia yang selama ini menjadi negara asal berbagai barang selundupan.

Demikian hal itu disampaikan pada evaluasi hasil pelaksanaan *Operasi Gerhana*, pada 17 Mei 2016 di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam. Patroli gabungan ini dilaksanakan selama dua periode, Periode I pada 7 April-21 April 2016 dan periode II dilaksanakan pada 22 April-7 Mei 2016. Operasi Gerhana bertujuan mencegah upaya penyelundupan barang-barang ilegal seperti Narkotika, Psikotropika dan Prekursor (NPP) dan barang kategori dilarang dan dibatasi lainnya seperti ballpress (pakaian bekas), produk pangan (bawang, beras dan gula).

Dalam siaran persnya usai evaluasi Operasi Gerhana di KPU Bea dan Cukai Batam, Kasubdit Penindakan dan Penyidikan (P2) pusat, Ahmad Rofiq, menjelaskan, operasi meliputi wilayah perairan selat Malaka dan sekitarnya. "Secara umum Operasi Gerhana berjalan baik dan satgas DJBC juga melakukan pemeriksaan kapal sebanyak 272 kali. Dalam pemeriksaan tersebut, anggota patroli satgas kami berhasil melakukan 27 pencegahan (penyelundupan), baik itu barang ekspor ataupun impor ilegal," kata Ahmad Rofiq.

Tindak lanjut dari penegahan tersebut, imbu Ahmad Rofiq, segera dilakukan penyidikan

lanjutan atas kasus-kasus tersebut yang akan ditangani oleh DBJC khusus Kepri. Sementara penetapan barang milik negara (BMN) ditangani kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam. Disamping itu ada yang masih dalam proses penyidikan oleh KPPBC di wilayah Kanwil DJBC Aceh, Sumatera Utara, Riau dan Sumatera Barat. Ada juga yang dilaksanakan pelimpahan ke Balai Karantina maupun yang terkena sanksi administrasi. Hasil kegiatan ini jelas membuktikan keseriusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam menjaga masuk dan keluarnya barang-barang ilegal yang dapat berperan serta mempengaruhi perekonomian rakyat Indonesia.

Ahmad Rofiq yang didampingi Agus Yulianto, Kasubdit Patroli Laut, Kabid Penindakan dan Sarana Operasi DJBC Kepri, R. Evy Suhartantyo dan beberapa pejabat lainnya, menyampaikan operasi ini merupakan arahan Presiden untuk memberantas setiap upaya penyelundupan barang-barang ilegal dan terlarang seperti narkoba. "Operasi ini melibatkan 16 kapal pada periode pertama dan 14 kapal pada periode kedua."

"Operasi ini memang telah berhenti pada 7 Mei 2016 lalu. Namun Dirjen meminta operasi lanjutan, operasi lanjutan akan dilakukan secepatnya," ucap Rofiq yang juga menegaskan dari operasi gerhana tersebut terbukti bahwa penyelundupan di perairan Selat Malaka cukup tinggi. Artinya, dalam operasi yang digelar selama sebulan DJBC hampir setiap hari melakukan penegahan barang selundupan. Karena itu merupakan Tugas bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beserta instansi penegak hukum lain di wilayah laut untuk terus bersinergi dan saling mendukung atas tugas dan fungsinya tersebut.

(Ariessuryantini)



Gedung KPPBC Semarang di kawasan Jalan Yos Sudarso yang masih menyatu dengan Kanwil DJBC Jateng-DIY dan KPPBC Tanjung Emas.

## KPPBC Tipe Madya Pabean A (TMP) Semarang

# KPPBC Semarang Keluar dari Zona Nyaman

*Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menantang para pegawai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean A (TMP) Semarang untuk keluar dari zona nyaman setelah sekian lama menyatu dengan KPPBC Tanjung Emas dan beberapa kantor mapan lainnya untuk memulai berprestasi di tingkat nasional sebagai kantor baru yang berkualitas.*





**Kami ingin melayani pengguna jasa secara maksimal di bidang TPB dan Cukai.**

**Iman Prayitno**  
Kepala KPPBC Semarang

sampai bulan April mencapai Rp 336.543.574.220 atau 15,72% dari target yang dibebankan sebesar Rp 2.141.352.305.000.

Kantor pabean yang resmi berdiri pada 3 Juli 2015 ini merupakan salah satu kantor pengawasan dan pelayanan di bawah Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY yang memiliki tugas utama mengawasi seluruh kegiatan Tempat Penimbunan Berikat, termasuk Kawasan Berikat dan Gudang Berikat dan juga Cukai. Wilayah kerjanya meliputi enam Pemerintahan Daerah Tingkat II yakni dua kotamadya Semarang dan Salatiga, serta empat kabupaten yakni Semarang, Demak, Grobogan, dan Kendal.

Kantor ini mengawasi seluruh kegiatan sebanyak 106 Kawasan Berikat (KB), 2 Gudang Berikat (GB), 24 Pabrik Hasil Tembakau, dan 6 pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA). Adapun wilayah pengawasan KPPBC TMP A Semarang meliputi Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Kendal, Kota Madya Salatiga dan Kota Madya Semarang.

Sejatinya KPPBC Semarang merupakan *split off* atau pemekaran dari KPPBC Tanjung

Emas berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea Cukai Nomor 71/BC/2015 tentang Pembentukan KPPBC TMP A Semarang. Kantor yang memiliki motto “Lebih Fokus, Lebih Baik” yang artinya dengan adanya *split off* tersebut maka KPPBC Semarang mengukuhkan dirinya akan menangani secara lebih fokus seluruh kegiatan Tempat Penimbunan Berikat (TPB) dan Cukai.

Ketika itu, pada 1 Juli 2015 bertempat di Auditorium Sabang Gedung Sumatera Kantor Pusat DJBC secara serentak dilaksanakan peresmian enam instansi vertikal baru di lingkungan DJBC oleh Heru Pambudi selaku Dirjen Bea dan Cukai, yang salah satunya adalah KPPBC Semarang. Kemudian pada 3 Juli 2015 bertempat di Lobi Gedung Kanwil DJBC Jateng dan DIY dilaksanakan peresmian KPPBC Semarang oleh Untung Basuki selaku Kepala Kanwil DJBC Jateng dan DIY yang dihadiri segenap *stakeholder* dan instansi terkait di lingkungan kerja KPPBC Semarang.

Mengenai gedung kantor, status KPPBC Semarang saat ini masih menumpang di gedung Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY, bersebelahan dengan gedung KPPBC Tanjung Emas. Dengan menempati lantai 2,7 dan 8, KPPBC Semarang mencoba memaksimalkan fasilitas yang ada. Mengenai SDM, terdapat beberapa Kasubsi Hanggar dan Pelaksana yang sudah dan akan memasuki masa purna tugas, sehingga memerlukan adanya penggantian. Mengingat kondisi di lapangan satu hanggar bisa mengawasi beberapa perusahaan KB. Namun dengan kondisi ini, tidak menyurutkan usaha dan upaya pihak KPPBC Semarang untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengguna jasa dengan mengoptimalkan fasilitas dan SDM yang ada.

**B**elum genap setahun usianya, namun performanya cukup meyakinkan. Realisasi penerimaan negara kantor ini di 2015 lalu berhasil mencapai Rp 1.082.901.319.390 atau **100,68%** dari target yang dibebankan sebesar Rp 1.075.536.209.080. Capaian itu terdiri dari penerimaan Bea Masuk Rp 13.150.981.000 (127,81% dari target Rp 10.289.916.600), dan Cukai Rp 1.069.750.338.390 (100,42% dari target Rp 1.065.246.292.480). Sedangkan penerimaan di 2016







Ruang pelayanan kepada pengguna jasa.

Selain kegiatan yang terkait tugas dan fungsi Kepabeanan dan Cukai, para pegawai KPPBC Semarang yang berjumlah 197 personel secara rutin menyelenggarakan beberapa kegiatan sesama pegawai diantaranya *capacity building*, karawitan, olah raga volley ball, bulutangkis, tenis meja, dan beberapa kegiatan kerohanian. Selain itu juga menyelenggarakan beberapa kegiatan sosial bersama masyarakat sekitar seperti penyembelihan hewan qurban, pembagian zakat fitrah, dan donor darah.

### Lebih Fokus Lebih Baik

Menurut Kepala KPPBC Semarang Iman Prayitno, pihaknya terus berupaya untuk melakukan inovasi. “Ke depan kami akan membuat semacam pemetaan atas pengguna jasa kami dengan cara membuat “geo-tagging”, sehingga nantinya apabila ada yang membutuhkan informasi dimana pun pengguna jasa berada akan mudah untuk mencarinya. Geo-tagging ini juga memastikan bahwa perusahaan-perusahaan

tersebut masih atau sudah tidak aktif lagi menjalankan kegiatan usaha. Sehingga harapan kami, geo-tagging ini nantinya bisa digunakan sebagai salah satu *database* untuk memudahkan pengawasan. Kami berharap dapat memberikan pelayanan yang memuaskan para pengguna jasa. Kami menyadari bahwa tuntutan dunia usaha semakin meningkat, oleh karena itu kami juga terus berusaha untuk bisa memberikan pelayanan sesuai yang diharapkan semua pengguna jasa sesuai dengan motto kami “Lebih Fokus Lebih Baik”. Dengan demikian keberadaan KPPBC Semarang secara langsung berperan meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya di Semarang dan sekitarnya,” ujar Iman.

Iman dan jajarannya menyadari bahwa komunikasi mempunyai peranan yang penting dalam pelayanan. Oleh karena itu kantor ini mempunyai program “Bea Cukai Sambung Rasa” yaitu suatu forum untuk menjalin komunikasi dari hati ke hati dengan tujuan menampung permasalahan dan harapan para pengguna jasa sehingga pelayanan bisa berjalan

lebih baik. Kemudian kantor ini sudah mengaplikasikan Sistem Komputer Pelayanan CIESA untuk pelayanan dokumen pabean impor, Sistem Aplikasi Cukai-Sentralisasi (SAC-S) untuk pelayanan dokumen cukai, dan menerapkan SKP *inhouse* perizinan untuk melayani pengajuan perizinan kawasan berikat/gudang berikat.

Kecepatan dan keakuratan dalam melakukan pelayanan kepada stakeholder merupakan hal mutlak bagi KPPBC Semarang. Hal ini dikarenakan kawasan-kawasan industri yang baru yang makin banyak berdiri di Semarang. Iman pun menuturkan, tantangan kian terasa ketika pihaknya mulai menyusun rencana kerja. Didasari program awalnya di KPPBC Tanjung Emas, Iman dan beberapa pejabat di sana mencoba menyesuaikan kembali visi dan misi kantor ke depan. “Bagaimana kita mempercepat pelayanan kepada pengguna jasa. Kemudian bagaimana cara mencapai target penerimaan yang cukup besar. Alhamdulillah target itu telah tercapai. Kemudian

kami juga fokus pengelolaan SDM, karena SDM kami disini tergolong baru. Dari sejumlah 197 personel pegawai, sebagian besar didatangkan dari KPPBC Tanjung Emas dan sebagian lagi banyak yang masih baru jadi kami harus melakukan beberapa penyesuaian. Kami harus bisa mengelola SDM ini dengan sebaik-baiknya,” tegas pria kelahiran Jakarta ini.

Berada di pesisir utara Pulau Jawa, Semarang menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, dan industri di Jawa Tengah. Kota ‘lunpia’ ini merupakan salah satu pintu gerbang keluar masuknya barang-barang dari dan keluar negeri melalui Pelabuhan Tanjung Emas dan Bandar Udara Ahmad Yani. Seiring dengan perkembangan pembangunan terutama di sektor industri dan perdagangan yang demikian pesat mengakibatkan meningkatnya arus lalu lintas keluar masuk barang ke wilayah Indonesia, tak terkecuali Semarang. “Sehubungan dengan kebijakan pemerintah

belakangan ini yang berhubungan dengan pusat logistik berikat (PLB), banyak sekali perusahaan yang menanyakan prosedur dan persyaratan untuk bisa mendirikan PLB. Kami meresponnya dengan memberikan sosialisasi dan publikasi, baik berupa *talkshow* di radio maupun pemuatan artikel tentang PLB di beberapa surat kabar, sehingga diharapkan nantinya di Semarang bisa tumbuh PLB yang bisa mempercepat proses industrialisasi dan peningkatan perekonomian di Semarang dan sekitarnya,” ujar Iman.

Namun demikian, menurut Iman, sebagian besar masyarakat dan *stakeholder* Semarang sudah mengetahui dengan baik peran Bea Cukai. Dengan adanya program kehumasan yang tayang dan tampil di televisi, media massa, videotron, media on-line dan media sosial memberikan pencerahan tentang tugas dan fungsi institusi Bea Cukai seutuhnya. “Kami bertugas mengawasi dan melayani hampir 50 persen perusahaan

yang bergerak di bidang garmen. Perusahaan garmen ini memang merupakan perusahaan padat karya yang banyak sekali membutuhkan tenaga kerja. Dan itu sangat membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di Semarang dan Jawa Tengah pada umumnya.”

Iman menambahkan, sisi penerimaan kantornya didominasi dari pita cukai rokok. Perusahaan rokok memang paling signifikan menyumbang penerimaan kantor ini terutama perusahaan rokok Sampoerna yang saat ini sudah memiliki tiga pabrik yaitu di Semarang, Salatiga, dan Kendal. “Tapi tidak bisa dikesampingkan juga cukai rokok pabrikan skala medium, serta pabrik-pabrik rokok kecil yang lebih kepada mempertahankan tradisi dan citarasa tradisional seperti pabrik rokok Praoe Lajar dan Gentong Gotri,” ujar pria yang kerap memberikan teladan kepada para bawahannya ini.

(Supomo)



Talkshow di radio merupakan salah satu kegiatan sosialisasi yang rutin dilakukan pihak KPPBC Semarang.





## PORTAL PENGGUNA JASA

### Pertanyaan:

Perkenalkan nama saya Suharso, karyawan eksim perusahaan manufaktur di Medan. Saya tertarik dengan layanan Portal Pengguna Jasa yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pertanyaan saya bagaimana cara mendapatkan username dan password Portal Pengguna Jasa?. Terima kasih atas jawabannya.

**Suharso, Medan.**

### Jawaban:

Terima kasih atas pertanyaannya, sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa portal pengguna jasa merupakan sistem integrasi seluruh layanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kepada semua Pengguna Jasa yang bersifat publik sehingga semua Pengguna Jasa sebagai user dapat mengakses dari manapun, kapanpun berada asalkan terhubung dengan internet. Sistem ini berbasis web sehingga user cukup menggunakan browser saja.

Portal ini terdiri dari berbagai sub sistem/ modul yang terintegrasi satu sama lain. Mulai dari modul registrasi kepabeanaan, modul layanan seperti cukai online dan perijinan online, modul informasi seperti browse PIB dan PEB, sampai modul untuk melakukan pengaduan. Sistem dalam portal ini juga dilengkapi dengan publikasi data referensi yang digunakan dalam banyak sistem seperti data gudang, data satuan, dan lainnya.

Selain sebagai sistem layanan, portal ini adalah bentuk transparansi kepada User Pengguna Jasa di DJBC yaitu para user dapat secara realtime melihat status dari layanan yang diajukan. Seperti pada *browse* data PIB, user dapat langsung mengetahui status terakhir dari PIB yang diajukan. Pada layanan perijinan online, user dapat langsung mengetahui sudah sampai mana proses dokumennya, sudah selesai atau belum.

Untuk manajemen user, portal ini menggunakan mekanisme Single Sign On (SSO). Yaitu dengan melakukan pendaftaran di sini, seorang Pengguna Jasa akan mendapatkan satu user id dan password. Cukup dengan satu user id dan password, seorang user dapat mengakses semua aplikasi yang disediakan oleh DJBC. Hal ini akan memudahkan user dalam mengakses aplikasi karena tidak diperlukan banyak user id dan password untuk masing-masing aplikasi.

Sehubungan dengan pertanyaan Saudara mengenai Username dan Password Portal Pengguna Jasa, dapat kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

Silakan pastikan terlebih dahulu apakah Perusahaan Saudara sudah memiliki akun Portal Pengguna Jasa atau belum. Untuk memastikan silakan cek di [websitecustomer.beacukai.go.id](http://websitecustomer.beacukai.go.id) kemudian klik Cek Status Pendaftaran.

Apabila belum terdaftar silakan lakukan Pendaftaran User Baru.

Apabila sudah terdaftar, apakah Saudara masih ingat alamat email yang Saudara gunakan pada waktu melakukan pendaftaran Portal Pengguna Jasa? Apabila masih ingat silakan klik Request Kode Aktivasi dan masukan email pendaftaran perusahaan Saudara selanjutnya Kode Aktivasi Portal akan dikirimkan ke alamat email pendaftaran. Apabila Saudara tidak ingat email pendaftaran, silakan lakukan perubahan email pendaftaran dengan prosedur sebagai berikut:

Ajukan surat permohonan perubahan email pendaftaran kepada Direktorat Teknis Kepabeanaan dan Cukai u.p. Subdirektorat Registrasi Kepabeanaan Gedung Sumatera Lantai I Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Jenderal Ahmad Yani (By Pass) Rawamangun Jakarta Timur, Jakarta melalui email [registrasikepabeanaan@customs.go.id](mailto:registrasikepabeanaan@customs.go.id) atau [registrasikepabeanaan@yahoo.com](mailto:registrasikepabeanaan@yahoo.com)

Surat permohonan tersebut ditandatangani oleh Direktur perusahaan dan dilampiri dengan dokumen yang memperkuat spesimen tanda tangan seperti API, NPWP, SIUP, TDP, dan KTP.

Demikian disampaikan untuk informasi lebih lanjut segera hubungi kami di BRAVO BEA CUKAI 1500225.

**Salam,  
Subdit Penyuluhan dan Layanan Informasi**



# GIGI NGILU KARENA ABRASI GUSI

Oleh: Drg. I G. A Heni Haryanti



**T**idak semua orang bisa menikmati enaknya minuman dingin dan es krim, malah kalau bisa cenderung dihindari.

Alasannya? Gigi terasa ngilu tajam saat bersentuhan dengan air es yang dingin. Pada sebagian orang, gigi juga bisa terasa ngilu saat terkena tiupan angin, atau saat berkontak dengan makanan yang asam. Hal ini sering kali dianggap angin lalu, dan penderita jarang datang ke dokter gigi untuk mengatasinya karena mereka menganggap ini bukan masalah kesehatan yang serius. Padahal masalah ini patut mendapat perhatian dan tidak dibiarkan saja, dengan harapan akan hilang dengan sendirinya.

Gigi ngilu tidak hanya disebabkan oleh gigi berlubang. Ada kalanya, disebabkan oleh abrasi pada gusi yang dapat menimbulkan cekungan pada leher gigi. Dentin pada gigi menjadi terbuka, maka rangsangan termis dan kimiawi akan langsung melalui pori-pori

dentin menuju syaraf gigi

Abrasi gusi juga dapat disebabkan oleh cara menggunakan sikat gigi yang salah. Jangan menekan sikat gigi terlalu keras dan gantilah sikat gigi kurang lebih tiga bulan sekali. Sikat gigi harus diganti dengan yang baru sebelum bulu sikat gigi tersebut rusak. Selain itu, ukuran sikat gigi sebaiknya tidak terlalu besar (d disesuaikan dengan kondisi mulut).

Tak hanya anak-anak, orang dewasa juga tak banyak yang tahu cara menyikat gigi yang benar. Banyak orang dewasa tidak sadar kalau menyikat giginya terlalu keras sehingga email gigi terkikis di bagian leher gigi yang biasa disebut abrasi gigi. Hal ini sering mengakibatkan gigi lebih sensitif.

Abrasi gigi membuat akar terbuka. Jika Anda bercermin, gigi normal akan terlihat tertutupi oleh gusi berwarna merah muda. Tapi bila abrasi, bagian akar gigi yang berwarna kuning akan terlihat. Warna kekuningan tersebut adalah dentin gigi yang terbuka.

Gigi sensitif karena akar itu bagian yang dekat ke saraf. Meski abrasi gigi kerap mengganggu penampilan, tapi ternyata ada perawatan efektif untuk mengatasi hal tersebut. Untuk menambal abrasi gusi yang besar, biasanya digunakan tambalan laser.

Mula-mula gigi dibersihkan, lalu bila diperlukan gigi dibur sedikit, untuk memberikan retensi pada tambalan. Permukaan dentin diulas dengan bahan seperti lem kemudian ditambal dengan bahan penambalan gigi, dikeraskan dengan sinar laser. Permukaan tambalan diulasi bahan cairan yang dapat menguatkan tambalan sehingga menjadi lebih kuat dan mengkilap.

Warna tambalan gigi dapat disesuaikan menjadi lebih kuning sedikit seperti warna gigi yang sesungguhnya. Warna leher gigi biasanya sedikit lebih kuning dibandingkan dengan mahkota gigi. Akhirnya, leher gigi yang berlubang tidak terlihat lagi dan rasa ngilu pada gigi akan berkurang. (\*)





Penyerahan WCO Certificate of Merit.

# Kesungguhan Berbuah Hasil

## Rangga Julyan Rakhman

*Karirnya di Bea Cukai masih terbilang belum lama, baru sekitar 5 tahun tetapi sudah menghasilkan karya untuk membantu instansi tempat dia bekerja.*

**R**angga Julyan Rakhman atau akrab dipanggil Rangga berhasil melakukan analisa dwelling time dan mendapatkan WCO Certificate of Merit atau sertifikasi kelayakan dari Organisasi Kepabeanan Dunia

atau World Customs Organization (WCO).

Keberhasilan Rangga bermula ketika ia ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea Cukai pada saat itu (2013), B. Widjayanta, melalui supervisi Kepala Bidang PPC III yang saat

itu dijabat oleh Yacobus Agus, untuk menghitung dwelling time. Diakui Rangga pada awalnya ia sendiri tidak terlalu paham secara detail terkait dengan dwelling time. Walaupun begitu pria kelahiran Majalengka ini Yacobus untuk mulai menghitung dwelling time



agar semua tahu dimana sumber penyebab lamanya dwelling time dan langkah apa yang harus diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut.

“Hal itu dilakukan karena di tahun 2013 isu dwelling time mulai hangat dan apabila ada orang atau media yang memberitakan lamanya dwelling time pasti berasumsi bahwa pelayanan Bea Cukai lah yang membuat lama dwelling time tersebut,” ujar Rangga.

Rangga menjelaskan analisa dwelling time sendiri yaitu kegiatan mengumpulkan data yang berkaitan dengan perhitungan waktu dwelling time, melakukan perhitungan dwelling time, melaporkan hasil perhitungan serta memberikan usul kepada pimpinan terkait upaya perhitungan dwelling time. Jadi tugasnya sebagai pegawai adalah melakukan kegiatan dari pengumpulan data, perhitungan serta pelaporan

Pegawai lulusan salah satu universitas negeri di Jawa Barat ini bercerita proses yang pertama yaitu mengumpulkan data untuk dilakukan perhitungan. “Data yang diperlukan yaitu data *customs clearance* yang secara periodik dikirimkan oleh unit terkait melalui Subbagian Dukungan Teknis, KPU BC Tanjung Priok untuk diteruskan ke saya, serta data *gate in* dan *gate out* yang dikirim setiap harinya oleh Tempat Penimbunan Sementara (TPS) Lini 1.”

Data yang dimaksudkan Rangga tersebut merupakan data keluar masuknya kontainer. Kemudian rekapan data dari TPS digabungkan ke data *customs clearance* sebelumnya. Sehingga setelah tergabung, data kontainer tersebut menjadi suatu rangkaian dari pertama *gate in* di TPS -> mendapatkan No PIB -> SPPB -> *gate out*. Selanjutnya, data dirata-rata dan dipisahkan berdasarkan

penjalurannya. Terakhir dibuat rekap laporan untuk dilaporkan kepada Kepala Kantor melalui Kepala Bidang PPC I (pada saat ini supervisornya PPC I).

Hal yang dilakukan oleh Rangga sebenarnya bukanlah hal baru, sebelumnya pernah ada juga yang melakukan analisa dwelling time yang dilakukan oleh 2 instansi yaitu, LAPI-ITB dan World Bank. Tetapi analisa dilakukan oleh kedua instansi tersebut ada perbedaan dengan analisa yang dilakukan Rangga.

“Perbedaannya yaitu kedua instansi tersebut menggunakan data sample juga hanya untuk arus barang yang melalui terminal JICT saja, sedangkan untuk data yang saya analisa yaitu menggunakan seluruh data, perhitungan dilakukan periodik per bulan (saat ini per 2 minggu), dan untuk seluruh terminal lini 1 terkecuali Terminal 3.

Pada awal tahun 2013 sebenarnya Kepala Kantor membuat tim penurunan dwelling time, namun karena berbagai hal seperti mutasi, diklat dan sebagainya jadi tinggal Rangga sendiri, alhasil dari akhir 2013 sampai sekarang untuk perhitungan dilakukan sendiri. “Awalnya untuk menggabungkan data TPS dibantu teman (Arya) tapi karena Arya mendapatkan tugas belajar (D4) akhirnya dari akhir 2013 saya kerjakan sendiri. Namun tahun ini saya dibantu oleh teman satu seksi saya (Rakhmadan) untuk perhitungannya,” ucap pria yang hobi main musik dan membaca buku *ini*.

Pada tahun 2013, formula perhitungan dwelling time dirumuskan oleh tim merujuk kepada perhitungan sebelumnya yang dilakukan oleh World Bank. Namun pada tahun 2014 Minilab (Tim Inisiatif Strategis 4) telah membuat manual perhitungan dwelling time sehingga untuk

mengukur dwelling time saya merujuk kepada manual tersebut. Sebelumnya hanya container yang berdokumen PIB saja yang dihitung, akan tetapi sejak September 2015 tidak hanya dokumen BC 2.0, namun BC 2.3, empty container, PLP, BC 1.2, BC 1.1a juga dihitung sehingga tingkat biasanya semakin kecil.

“Seperti contoh pada bulan Maret 2016 data yang saya hitung sebanyak 97% dari keseluruhan data container yang melewati TPS Lini 1 (selain Terminal 3). Selain itu, perhitungan dwelling time yang saya hitung telah dilakukan audit oleh BPK, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan Komite Pengawas Perpajakan pada tahun 2014.”

Saat ini Rangga juga sebagai anggota Tim Percepatan Kelancaran Arus Barang Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok. Dan seperti yang telah diperintahkan Kepala Kantor, analisis perhitungan dwelling time akan terus dilanjutkan untuk mengetahui kondisi dwelling time terkini juga sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan perbaikan di berbagai sisi.

“Saya tidak mengetahui apakah ada pengaruh dari telah dilakukannya analisis perhitungan dwelling time terhadap waktu dwelling time itu sendiri. Yang pasti analisis ini digunakan untuk bahan pertimbangan pimpinan dalam mengambil keputusan dalam upaya menurunkan dwelling time. Jika diibaratkan kalau kita ingin mengobati penyakit, kita harus tahu dulu penyakitnya apa biar tidak salah obat. Begitupun dwelling time, analisa ini dilakukan untuk mengetahui dimana penyakitnya biar ketahuan obatnya apa. Namun seperti yang kita ketahui bersama dwelling time di Tj. Priok sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 3,69 (data per April 2016).”

Dalam kesehariannya Rangga termasuk sosok yang sederhana dan mengerjakan apapun tidak mengejar atau meminta apresiasi dari siapapun termasuk mengerjakan perhitungan dwelling time ini. Sepenuhnya ia ikhlas meskipun bukan tugas utamanya sebagai pelaksana di Bidang Kepatuhan Internal. Berbekal ketertarikan terhadap analisa data dan background pendidikan Rangga di Jurusan Statistika, Rangga melakukan melakukan ini.

Baginya keberuntungan adalah titik temunya do'a dan usaha, karenanya janganlah berhenti berusaha dan berdo'a. Keyakinan itu yang dijadikannya motto hidupnya. Sehingga tidak pernah terpikir oleh bapak dari seorang putri ini bahwa apa yang dikerjakan akan mendapatkan penghargaan sehingga saat Rangga diundang untuk mengikuti gladi bersih upacara peringatan hari kepabeanan internasional sebagai penerima WCO Certificate of Merit, ia merasa kaget karena pemberitahuan tersebut hanya sehari sebelumnya.

“Saya merasa bahwa apa yang saya buat bersama rekan saya pada saat itu bukan hal yang luar biasa, awalnya hanya iseng saja karena sering sekali ditanya oleh Pejabat/Pegawai baik itu dari KPU BC Priok ataupun dari Kantor Pusat terkait laporan dwelling time terkini, hal tersebut akan menjadi repot apabila saya sedang tidak berada di kantor karena cuti, off ataupun yang lainnya, terkadang juga saya lupa angkanya berapa,” ujarnya sambil tertawa.

Dari situ kemudian Rangga mencetuskan ide bersama rekannya untuk membuat suatu website yang berisikan informasi dwelling time terkini agar siapapun terutama Pejabat/Pegawai DJBC dimanapun dan kapanpun bisa dengan mudah mengetahui perkembangan dwelling time terkini. “Ternyata hal yang menurut saya dan teman saya (Trada) tadi itu biasa, diapresiasi pimpinan sehingga berhak mendapatkan WCO Certificate of Merit. Padahal saya yakin di DJBC ini masih banyak pegawai yang mempunyai inovasi yang lebih

hebat dan layak mendapatkan itu,” ucap Rangga dengan rendah hati.

Bekerja selama hampir 5 tahun di KPU BC Priok ini sangat berarti buat Rangga, disana ia diberikan kesempatan belajar untuk memberikan masukan/usulan. “Saya juga diberikan pembelajaran, arahan, dan masukan yang membuat saya pribadi merasa termotivasi untuk bekerja lebih baik lagi.”

Sebagai seorang pegawai tentu Rangga memiliki harapan agar bisa terus berupaya memberikan yang terbaik kepada institusi DJBC ini baik melalui tindakan ataupun pemikiran. Selain itu juga ia memiliki pengharapan bagi tempat ia bekerja, KPU BC Tanjung Priok, yaitu untuk selalu berbenah dan selalu menjadi kantor yang terbaik. “Banyak sekali perubahan yang telah dilakukan terutama dari sisi kecepatan dan transparansi pelayanan kepada pengguna jasa, tentunya hal ini selain perlu peningkatan kinerja para pegawainya juga sinergi yang baik antar unit.”

(Desi Prawita)



# RE ORGANISASI



**4** BUTIR DARI  
**9** BUTIR  
NAWACITA  
BERHUBUNGAN  
DENGAN DJBC

TRADE FACILITATOR  
INDUSTRIAL ASSISTANCE  
COMMUNITY PROTECTOR  
REVENUE COLLECTOR

1. Kami akan menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara
2. Kami akan membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya
3. Kami akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan
4. Kami akan menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
5. Kami akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
6. Kami akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
7. Kami akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
8. Kami akan melakukan revolusi karakter bangsa
9. Kami akan memperteguh Ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

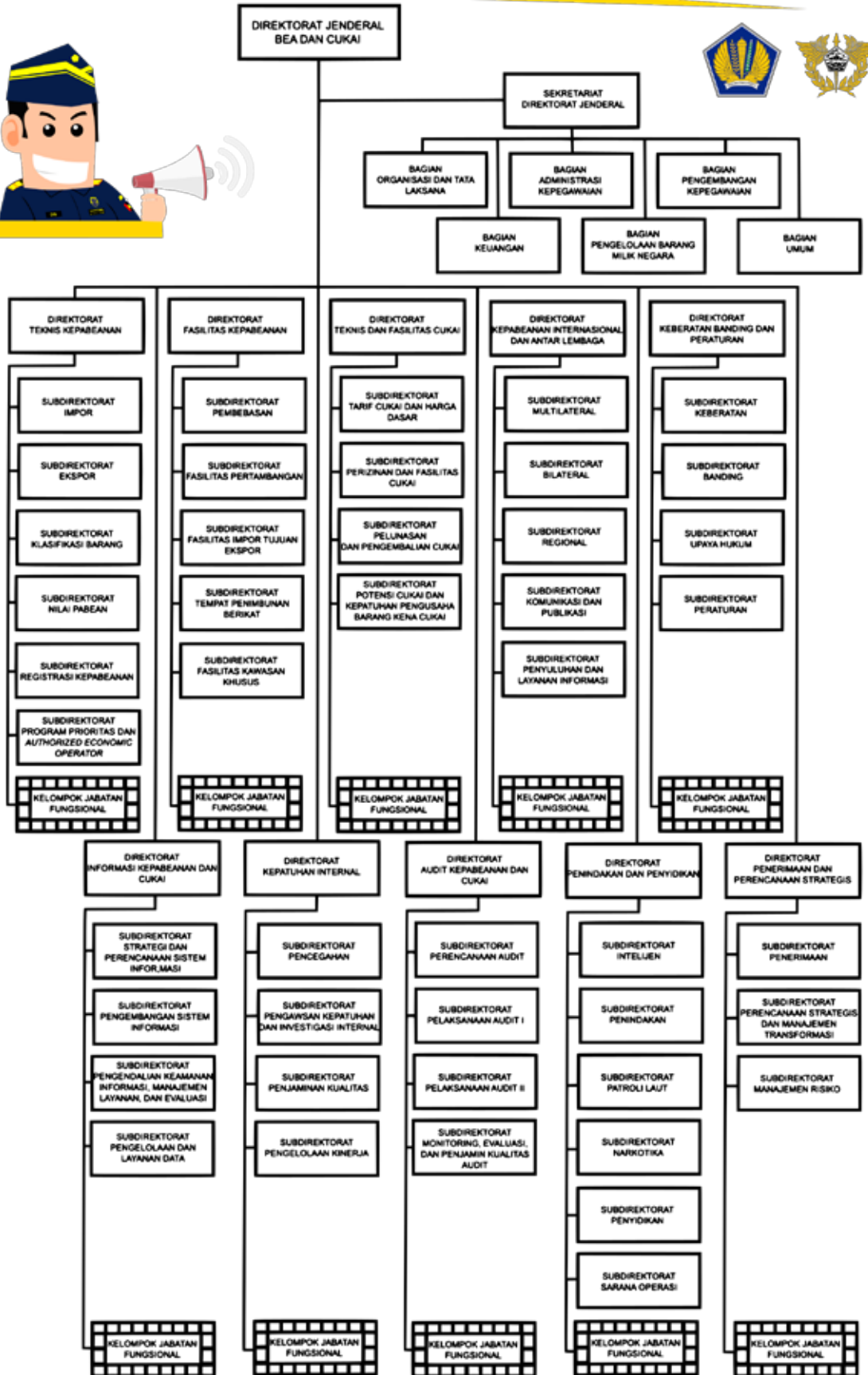
## JABATAN FUNGSIONAL



Jabatan Fungsional Ahli Utama Gol. IV/d - IV/e	↔ setara	Kepala Kantor Wilayah atau Eselon II
Jabatan Fungsional Madya Gol. IV/a - IV/c	↔ setara	Kepala Bagian atau Eselon III
Jabatan Fungsional Ahli Muda Gol. III/c - III/d	↔ setara	Kepala Seksi atau Eselon IV
Jabatan Fungsional Ahli Pertama Gol. III/a - III/b	↔ setara	Kepala Sub Seksi atau Eselon IV



# STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI



PMK No. 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

# Menyaksikan Keekstriman Tomohon, Menikmati Keindahan Bunaken

**W**aktunya bertraveling ! ya, mendapat kesempatan bertugas ke Manado dan selesai dengan tugas-tugas, tibalah saatnya bagi saya membuat sesi tulisan cerita catatan perjalanan

selama 3 hari di Manado, Sulawesi Utara. Pasar Tomohon dan bersnorkling ke Bunaken menjadi pilihannya.

Perjalanan dimulai dari pukul 7.00 Wita. kami berenam (Aries, Rinto, Rudi, Abdul Rozak, Andri,







Muparih) ditemani teman dari kantor Bea Cukai Manado, Maikel sudah keluar dari Hotel Novotel Manado untuk berangkat menuju Pasar Beriman Tomohon dengan harapan waktu berangkat yang kami pilih ini tidak terlalu kesiangan, karena menurut cerita teman kalau kesiangan sedikit saja maka keekstriman pasar tersebut lenyap dan berubah jadi pasar biasa yang menjual sayuran, buah dan sembako.

Ditempuh kurang lebih satu jam, suasana Jalan yang lumayan belum ramai membuat perjalanan kami lancar dengan sajian alam hijau yang rimbun. Di dikiri kanan barisan pohon rimbun membuat hawa semakin sejuk. Pohon-pohon membentuk kanopi menambah keasrian perjalanan menuju Tomohon yang naik turun berkelok-kelok, mendaki dan menuruni bukit. Beberapa teman, melanjutkan tidurnya lagi di mobil yang membawa kami. Mereka baru benar-benar terbangun ketika sudah mendekati lokasi pasar, lumayanlah 1 jam perjalanan menghilangkan sisa rasa kantuk dikarenakan harus berangkat pagi-pagi. Baru turun dari kendaraan saja, perasaan

saya sudah tidak menentu, seperti apa siii suasana pasar tradisional terbesar di Minahasa yang katanya paling ekstrim se Indonesia ? mudah-mudahan kuat iman dan tidak mual-mual.

Pasar Tomohon adalah pasar tradisional terbesar di Minahasa. Di mana dijual berbagai macam jenis bahan makanan dan berbagai jenis daging yang dijual sangat segar dan biasanya "dijagal" di situ bisa dilihat oleh konsumen. Di pasar tersebut juga dijual berbagai jenis ikan laut dan ikan air tawar yang masih segar. Pasar Tomohon isinya lengkap, lebih murah. Tak heran ada banyak orang dari luar kota untuk khusus datang berbelanja di Pasar Tomohon. Bahkan ada banyak turis asing yang ikut masuk kedalam pasar untuk melihat secara dekat kegiatan pasar.

Begitulah ketika masuk pasar, "atraksi aneh dan unik" kami lihat. Pasar Tomohon, Sulawesi Utara menyanggah gelar pasar paling ekstrim, pastinya karena menjual berbagai macam rupa binatang tak lazim untuk di makan oleh masyarakat. Lokasi nya tidak begitu jauh, sekitar kurang lebih 60 km dari pusat kota Manado.

Pasar ini tidak cocok buat pecinta binatang, karena pasti akan protes keras kalau berkunjung ke Pasar ini.

Tak ubah nya seperti pasar-pasar lain yang ada di Indonesia, menjual berbagai macam kebutuhan antara lain sembako, sayur mayur, ikan, daging dan keperluan lainnya. Hanya saja, ada 1 blok khusus yang menjual Babi, Anjing, Tikus, Kelelawar/Paniki, Kucing, Ular, dan lain sebagainya. Itulah yang menjadikan pasar ini memiliki ciri khas sebagai pasar ekstrim.

Baru beberapa menit saja melihat 'atraksi aneh' para pedagang, rasa pusing dan mual mulai menghinggapi, tak buang waktu lagi kami putuskan untuk tidak lama-lama berada di pasar tersebut, lebih asyik bersnorkling ke Bunaken, melupakan segala sajian aneh dan tak lazim yang ada di salah satu blok dalam kios pasar Tomohon.

Belum Snorkeling atau Diving, Belum Ba'rasa ke Bunaken

Dari Tomohon, kami berniat langsung menuju ke Pulau Bunaken. Satu setengah jam perjalanan kami tempuh, tibalah



di Pelabuhan Calaca, Manado. Di dermaga ini, tiga rekan dari Kantor Bea Manado, Romi, Andris dan Arif bergabung bersama kami menuju ke Taman Nasional Laut Bunaken. Sudah siap dengan kapal sewaan yang telah di booking kami pun berangkat menuju Pulau Bunaken dengan menempuh waktu cukup ± 45 menit dengan jarak sekitar 1,8 km dari Manado.

Taman Nasional Bunaken didirikan 1991 dan merupakan Taman Laut Pertama di dunia. Pada tahun 2005 menjadi situs warisan dunia setelah di daftarkan Indonesia ke UNESCO. Keberadaan Bunaken di segitiga Terumbu Karang dengan 390 species terumbu karang dan 90 species ikan serta species hewannya seperti Rusa dan Kuskus tetap menjadi daya tarik setiap wisatawan nusantara dan mancanegara. Jadi benar rasanya belum ke Bunaken, kalau belum melihat keindahan species ikan dan terumbu karangnya. Kalau belum snorkeling atau diving, belum ba'rasa ke Bunaken”.

Tiba di Pulau Bunaken sekitar pukul 9.00 WITA, kami langsung menuju tempat persewaan untuk wetsuit dan alat snorkeling. Setelah kami sudah siap dengan pakaian dan peralatan snorkeling tak lupa berfoto bersama, kami pun mulai bersnorkeling melihat terumbu karang dan ikan berwarna-warni yang mengelilingi kami dan saat akan disentuh ikan warna-warni tadi dengan lincahnya langsung menjauh. Di sinilah puncak panorama untuk menikmati indahnya keanekaragaman hayati laut Bunaken. Kami melihat dengan jelas berbagai jenis ikan berseliweran di antara warna-warni terumbu karang... *So amazing!*

Selanjutnya terdapat pemandangan laut di belakang kami tampak gelap, terumbu karang berdampingan langsung



dengan dasar laut yang gelap tadi, ya ternyata wilayah gelap ini adalah palung laut dengan kedalaman mencapai 1.000 meter bahkan di beberapa tempat lebih. Tebing palung tidak landai tetapi tegak lurus. Puas melihat-lihat alam bawah laut Bunaken, kami pun mendekati bibir palung-palung yang ada di sekitar tempat kami. Dengan aba-aba bersama membenamkan tubuh ke dalam air laut terlihat dari kejauhan dinding-dinding karang raksasa yang berdiri vertikal dan membentuk lengkungan ke atas dan gelap karena kedalaman palungnya namun tetap saja masih terlihat indah. Dinding tebing yang curam ditumbuhi karang-karang cantik dan soft coral yang mengagumkan walaupun hanya bisa melihat dari kejauhan. Inilah

*underwater great walls* yang disebut juga *hanging walls* atau dinding karang raksasa berdiri vertikal dan melengkung ke atas. Dinding karang inilah yang menjadi sumber makanan bagi ikan-ikan di perairan itu.

Puas bermain-main di laut, menjelang siang pukul 13.30 kami pun kembali ke pinggir pantai, tak lupa sesi foto bersama kami lakukan kembali dan bergegas mandi membilas air laut yang melekat di badan. Tak buang-buang waktu kami pun menaiki kapal mengantar kami kembali ke Manado. Menyempatkan makan siang dengan menu ala ikan tuna bakar dilengkapi sambal yang pedas sekali, kami pun bergegas mengejar penerbangan kembali ke Jakarta pukul 15.30 WITA.

(Ariessuryantini)

## Masyarakat dan Bea Cukai



**May Febry** Aku mau bea & cukau bertindak lebih tegas & kejam lagi #baruoke

Suka · Balas · Kirim Pesan · 22 April pukul 21:57



**Stephanos Ivan Pramujito** Jayalah k9 indonesia....ayo maju maju

Suka · Balas · Kirim Pesan · 22 April pukul 15:38



**Kurnia Saktiyono** bagus banget nih...supaya masyarakat tahu betapa berat tugas customs mengawasi barang ilegal yg masyarakat dan pemda setempat tidak mensupport aturan yang ada ... padahal customs menjalankan aturan titipan instansi lain.. keep spirit buat teman-teman diperbatasan...smoga selalu dalam lindungan Allah SWT dalam menjalankan tugas negara..

Batal Suka · Balas · Kirim Pesan · 2 · 19 April pukul 17:18



**Nurul Afifah BC** entikong prestasinya bagus.

Suka · Balas · Kirim Pesan · 31 Maret pukul 22:27



**Fatimah Al-kautsar** Woow orang luar

Pada masuk indonesia untuk menghancurkan Generasi bangsa  
Hukum tidak boleh lemah  
Harus di hukum mati itu



**Zitha Juwita Tjeda** knp yea? msh byk product kosmetik,obt cina bs lolos ilegal msuk? apa kurng ketat customs protection BC? ato ada fktor lain? nyta'y dtko" msh byk yg pny stok dan ngjual brng ilegal..

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Ditjen Bea dan Cukai





STATEMENT OF INTENT INDONESIA – AUSTRALIA:  
DORONG EKSPOR & FASILITASI PERDAGANGAN



**15/4** **CANBERRA** – Direktur Jenderal Bea Cukai Heru Pambudi dengan *Commissioner of Australian Border Force (ABF)* Roman Quaedvlieg melaksanakan penandatanganan *Statement of Intent*, pada Jumat (15/4/2016) untuk mendukung keamanan rantai pasokan dan fasilitasi perdagangan. Hal ini merupakan langkah baru untuk memasarkan program/skema fasilitasi kepabeanan Indonesia. Melalui peningkatan kemitraan dengan administrasi kepabeanan negara lain, Bea Cukai mengharapkan dapat memetik manfaat untuk mengedukasi masyarakat usaha di luar negeri dalam meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi perekonomian dan perdagangan yang berlaku di Indonesia dengan tujuan lebih lanjut adalah untuk mendukung prioritas program pemerintah dalam meningkatkan ekspor dan daya saing produk Indonesia di pasar global. Dalam kesempatan ini disepakati beberapa poin penting untuk meningkatkan kerjasama kepabeanan, berupa upaya berkelanjutan untuk terus meningkatkan keamanan dan fasilitasi kepabeanan, pertukaran data *Reputable Traders* antar kedua negara dengan penekanan pada profil perusahaan-perusahaan yang berisiko rendah (*low profile*) serta saling bertukar pengalaman dalam mengembangkan fasilitasi AEO dan pertukaran informasi dalam menangani kasus perdagangan di negara masing-masing.



BEA CUKAI PURWAKARTA  
GELAR PELATIHAN  
KAWASAN BERIKAT

**29/2** **PURWAKARTA** – Bea Cukai Purwakarta gelar pelatihan Kawasan Berikat (KB) kepada pengguna jasa yang meliputi perusahaan KB di Karawang, Purwakarta, dan Subang, pada 29 Februari-23 Maret 2016. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan seputar peraturan KB kepada pengguna jasa di lingkungan KPPBC Purwakarta, serta menjalin hubungan baik antara pegawai Bea Cukai dengan pengguna jasa. Hal ini merupakan upaya dari KPPBC Purwakarta untuk terus mendukung KB karena KB merupakan salah satu wadah untuk meningkatkan potensi industri nasional. Materi yang dibahas meliputi perizinan kawasan berikat, jaminan, aplikasi, dan arsip dokumen KB, sanksi dan hukuman terhadap pelanggaran yang terjadi, serta materi mengenai gratifikasi. Diharapkan pengguna jasa dapat memahami kegiatan kepabeanan dan cukai dengan benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan masyarakat Indonesia siap dengan persaingan ekonomi internasional. Selain itu kegiatan ini juga diharapkan dapat meminimalisir pelanggaran kepabeanan.

TARANTULA HIDUP DISELUNDUPKAN DALAM POPOK BAYI

**3/5** **BANDAR LAMPUNG** – Bea Cukai Bandar Lampung menyelenggarakan konferensi pers penegahan impor tarantula hidup melalui Kantor Pos Lalu Bea Bandar Lampung, Selasa (03/05/2016). Barang kiriman pos asal Thailand ini berjumlah ±111 ekor tarantula hidup namun diberitahukan sebagai *Fabric Toy* dengan nilai USD 10, modus lain yang dilakukan adalah menyembunyikan tarantula hidup tersebut di dalam popok bayi yang ditutup dengan boneka di atasnya. Kasus ini melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2000 tentang Karantina Hewan. Tindak lanjut untuk masalah ini sendiri adalah penelitian dan pengembangan perkara berkoordinasi dengan Polda Lampung, Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung, serta Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung.







### BEA CUKAI BELAWAN MUSNAHKAN PULUHAN RIBU BOTOL MIRAS IMPOR ILEGAL

17/5

**BELAWAN** – Bea Cukai Belawan musnahkan 42.058 botol minuman keras (miras) berbagai merek, jenis, dan ukuran yang dikemas dalam 3.676 karton pada 17 Mei 2016. Kepala Kantor Bea Cukai Belawan

Haryo Limanseto menjelaskan bahwa miras tersebut merupakan hasil penegahan atas importasi ilegal yang melalui pelabuhan Belawan, Sumatera Utara. Miras yang dimusnahkan tersebut diimpor oleh PT IPJ yang diberitahukan sebagai biji plastik dengan nilai barang Rp5 miliar. Kerugian yang ditimbulkan atas impor miras ilegal tersebut berupa kerugian materil potensi penerimaan negara yang tidak tertagih dari bea masuk, pajak dalam rangka impor dan cukai yaitu sebesar Rp13,6 miliar, dan kerugian materil berupa bahaya penyalahgunaannya yang dapat mengganggu kesehatan, ketertiban dan ketentraman masyarakat khususnya menghadapi bulan suci Ramadan tahun 2016. Perbuatan tersebut melanggar pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

### SOSIALISASI KEBIJAKAN PENYEDERHANAAN SISDUR EKSPOR

**BANDUNG** – Bea Cukai Bandung bekerja sama dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Perindustrian dan Perdagangan Kodya Bandung, Kementerian Perdagangan, dan salah satu *forwarding company*, menggelar Sosialisasi Penyederhanaan Sistem dan Prosedur Ekspor. Sebuah forum yang ditujukan untuk menambah wawasan para pengusaha muda agar lebih agresif memasarkan produknya ke mancanegara. Materi sosialisasi ini di antaranya kebijakan ekspor dari Kementerian Perdagangan, sistem dan prosedur ekspor dari Bea Cukai, serta praktik perdagangan Internasional dari *perusahaan forwarder*. Materi yang cukup lengkap ini diikuti dengan antusias oleh para pengusaha muda dari UKM binaan Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kota Madya Bandung. Pemerintah Kota Madya Bandung sendiri telah bekerja sama dengan negara tetangga Malaysia untuk membuka toko *Little Bandung*. Toko ini akan menjual berbagai macam produk mulai dari kerajinan hingga kuliner khas Bandung di Kuala Lumpur. Sebelumnya, *Little Bandung* juga sudah dibuka di Paris, Perancis. Pemerintah berharap agar semakin banyak pengusaha UKM menjadi pemain yang handal baik di pasar Internasional maupun lokal. Sehingga akan memberikan dampak positif kepada perekonomian Indonesia.



### BEA CUKAI TANJUNG PRIOK TEGAH 10 KONTAINER IKAN ILEGAL SIAP EKSPOR

**JAKARTA** - Bea Cukai bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam hal ini Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) melakukan penegahan terhadap 10 kontainer hasil perikanan ilegal dalam rentang waktu Agustus 2015 hingga April 2016 senilai Rp55 Miliar. Ekspor ini dinilai ilegal karena bukan berasal dari eksportir terdaftar dan terindikasi tidak memiliki Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) dan Sertifikat Kesehatan atas produk yang diekspornya. Selain itu, juga diindikasikan terdapat eksportasi hasil perikanan ilegal yang diberitahukan secara tidak benar atau diberitahukan sebagai barang lain. Pada dokumen-dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) diberitahukan jenis barang adalah shark fin dan shark rod & tail, catfish, frozen fillet eel, salted jellyfish, dll. Sebagai tindak lanjut, barang tegahan akan diserahkan kepada BKIPM berdasarkan kewenangan UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009. Sedangkan tegahan ekspor yang diduga melanggar UU Kepabeanan akan ditindaklanjuti oleh Unit Penyidikan Bea Cukai Tanjung Priok.



# Dirjen Bea Cukai Tegaskan Transaksi *Sale and Lease Back* Tidak Masuk dalam Kategori Pemindahtanganan

**P**ada 31 Agustus 2015, Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai menetapkan peraturan tentang tata cara pemindahtanganan dan penyelesaian kewajiban pabean atas mesin dan/ atau barang dan bahan yang diimpor dengan menggunakan fasilitas pembebasan bea masuk dalam rangka penanaman modal Nomor PER-15/BC/2015. Peraturan tersebut dikeluarkan untuk memberikan kepastian hukum bagi penerima fasilitas pembebasan bea masuk dalam rangka penanaman modal dan merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan nomor 76/PMK.11/2012 j.o. 176/PMK.011/2009 dan merubah peraturan Dirjen sebelumnya nomor 21/BC/2012.

Garis besar peraturan Dirjen tersebut adalah menegaskan kepada para penerima fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal, bahwa untuk transaksi dalam bentuk *sale and lease back* tidak masuk dalam pengertian pemindahtanganan barang modal, dengan syarat

barang modal tersebut masih berada di lokasi perusahaan dan digunakan oleh perusahaan penerima fasilitas pembebasan dalam kegiatan usahanya.

Ketegasan tersebut menjadi penting bagi para penerima fasilitas, dan sekaligus sebagai tantangan Bea Cukai dalam mengakomodasi perkembangan dunia perdagangan dan industri termasuk di dalamnya dengan adanya perkembangan pola transaksi *sale and lease back*.

Seperti diketahui dengan peraturan Dirjen nomor 21/BC/2012, barang modal tersebut dalam hal ini mesin, dapat dipindahtanggankan kepada perusahaan lain setelah mendapatkan izin dari Direktur Fasilitas Kepabeanan. Izin pemindahtanganan dari Direktur Fasilitas Kepabeanan adalah hal yang penting, karena dapat berakibat pada diwajibkannya penerima fasilitas untuk membayar bea masuk dan sekaligus sanksi administrasi berupa denda. Ketentuan pemindahtanganan mesin sendiri dapat dilakukan setelah 2 tahun sejak barang diimpor kecuali terjadi keadaan darurat (*force major*), direekspor, atau

dipindahtanggankan ke perusahaan lain yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal.

Disamping itu pemindahtanganan yang dilakukan setelah 2 sampai dengan 5 tahun berakibat pada batalnya pemberian fasilitas pembebasan bea masuk, dan perusahaan diwajibkan untuk membayar bea masuk yang terutang. Sedangkan apabila pemindahtanganan dilakukan setelah jangka waktu 5 tahun, atau terjadi *force major*, direekspor, atau dipindahtanggankan ke perusahaan lain yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal maka perusahaan penerima fasilitas tersebut dibebaskan dari kewajiban membayar bea masuk yang terutang.

Untuk lebih jelasnya silahkan Anda unduh peraturan Dirjen tersebut di Direktori Peraturan [www.peraturan.beacukai.go.id](http://www.peraturan.beacukai.go.id).

**(Subdit Peraturan)**

## Catatan:

- **Pemindahtanganan** adalah pemindahan hak, alih aset, perubahan penggunaan mesin untuk kegiatan lain di luar kegiatan usaha, diekspor, atau penghapusan dari aset perusahaan.
- **Sale and Lease Back** adalah suatu transaksi dari pengusaha industri atau industri jasa penerima fasilitas (*lessee*) kepada perusahaan leasing (*lessor*) dengan syarat barang modal dimaksud masih berada dilokasi perusahaan dan digunakan oleh penerima fasilitas.



# TAGLINE: FRASA YANG MAMPU TINGKATKAN CITRA

## TAGLINE? APA ITU TAGLINE?

Kalau istilah di atas masih asing, bagaimana dengan beberapa frasa di bawah ini.

“I’m lovin it” –Mc Donald

“Menyelesaikan Masalah Tanpa Masalah” –Pegadaian

“Just Do It” –Nike

Itulah contoh *tagline*, kalimat pendek yang menjadi ciri khas merek dagang (produk) atau sebuah lembaga. Kita tentunya sudah tak asing lagi dengan susunan kata atau frasa di atas. Bukan hanya karena kerap berseliweran di layar TV atau terpampang di billboard pinggir jalan, tapi juga karena frasa-frasa tersebut menarik dan mudah diingat.

## DEFINISI TAGLINE

Hingga saat ini memang belum ada padanan yang tepat untuk istilah *tagline* dalam bahasa Indonesia. Pun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tak ada kata yang identik dengan istilah *tagline*. Eric Swartz, seorang penulis dan ahli brand *tagline* mendefinisikan *tagline* sebagai «susunan kata yang ringkas (biasanya tidak lebih dari 7 kata), diletakkan mendampingi logo dan mengandung pesan brand yang kuat ditujukan kepada audiens tertentu».

Secara bahasa, menurut kamus, *tagline* adalah:

a catchphrase or slogan, especially as used in advertising,

or the punchline of a joke. (Oxford Dictionaries).

a final line (as in a play or joke); especially one that serves to clarify a point or create a dramatic effect; a reiterated phrase identified with an individual, group, or product. (Merriam-Webster).

Ringkasnya, *tagline* adalah frasa yang mudah diingat dan digunakan oleh kelompok atau bisnis untuk menarik perhatian (a word or phrase that is easy to remember and is used by a group or business to attract attention).

## SIFAT-SIFAT TAGLINE

Di dalam buku berjudul “Mendesain Logo” yang dikeluarkan oleh tim Desain Grafis Indonesia (DGI), jenis-jenis *tagline* jika dibagi berdasarkan sifatnya dapat dibagi menjadi beberapa macam:

### 1. DESCRIPTIVE

*Tagline* yang menerangkan secara jelas produk, pelayanan, atau janji dari sebuah brand. Contohnya, “The GARUDA INDONESIA The Airline of Indonesia”. *Tagline* ini secara gamblang menjelaskan bahwa maskapai Garuda Indonesia merupakan perusahaan penerbangan milik Indonesia.

### 2. SPECIFIC

*Tagline* yang memosisikan dirinya sebagai yang terunggul di bidangnya. Contohnya, bagi produsen shampoo yang menggunakan *tagline*

“DOVE HAIR THERAPY, Pilihan Nomor Satu untuk Perawatan Rambut Rusak”, ingin menunjukkan bahwa produknya adalah yang merupakan shampoo yang paling dipilih konsumen dalam bidang perawatan rambut rusak. Tentu ini akan membuat produk ini terlihat lebih baik dari produk lain di bidang yang sama.

### 3. SUPERLATIVE

Berbeda dengan *tagline* spesifik yang mengunggulkan produk atau jasanya dibandingkan dengan pesaing dari jenis yang sama, *tagline* superlative memosisikan dirinya sebagai yang lebih baik atau unggul tanpa memberikan penjelasan terhadap jenis produknya. Contohnya, “I-RADIO, Juaranya Musik Indonesia”.

### 4. IMPERATIVE

*Tagline* yang menggambarkan suatu aksi, biasa diawali dengan kata kerja. Contohnya, “LA LIGHT, Enjoy Aja!”.

### 5. PROVOCATIVE

*Tagline* dengan sifat ini mengajak/menantang logika atau emosi publik karena seringkali merupakan sebuah kalimat tanya. Namun ada juga beberapa *tagline* provokatif yang bukan merupakan kalimat tanya dan mampu menantang/mengajak logika untuk berpikir serta menantang emosi dengan kalimatnya yang tentu saja



provokatif. Contohnya, “Batuk Berdahak? BISOLVON Solusinya”.

### MENGAPA TAGLINE DIBUTUHKAN?

Kehadiran *tagline* bukanlah sesuatu yang mutlak. Namun ia mempunyai peran unik dan manfaat khusus dalam mendukung komunikasi merek yang digunakan untuk merangkum atau mengekspresikan tujuan dan semangat merek. Lalu bagaimana dengan pernyataan bahwa “*Tagline* mampu meningkatkan citra”, benarkah begitu?

Secara spesifik, *tagline* digunakan untuk memberikan dorongan motivasi pada khalayak, mengkonsolidasikan filosofi lembaga atau merek, dan memberikan detail singkat tentang apa yang ditawarkan dan dijanjikan merek (brand promise). Bila lembaga atau sebuah brand telah memiliki logo khas yang menjadi tanda pengenal, maka *tagline* pun menambah energi aktif pada logo tersebut.

Di samping itu, *tagline* mampu mendeskripsikan atau mendramatisasi manfaat-manfaat fungsional dan emosional. *Tagline* memberitahu khalayak bagaimana mereka merasakan terhadap merek tersebut, mencerminkan kepribadian merek, memberi kejelasan merek, menciptakan makna pada merek, membedakan merek dengan kompetitor, dan bersifat visioner. Singkatnya, dengan branding yang tepat, *tagline* bukan hanya membantu sebuah lembaga atau merek untuk dikenal pasar dan konsumen, namun juga meningkatkan citra baik yang dimiliki perusahaan.

Namun, dari segudang kebaikan yang diberikan *tagline*, kesalahan dalam memilih dan membuat *tagline* bisa menyebabkan merek menjadi mati atau tidak bisa berkembang.

Hal ini terjadi karena *tagline*, bersama dengan nama, logo, slogan, kemasan, warna, dan symbol adalah termasuk elemen merek, yang mana jika dinilai negatif oleh pasar maka akan mematikan sebuah merek. Maka yang selanjutnya patut kita bahas adalah bagaimana membuat atau menciptakan sebuah *tagline* yang berfungsi baik dan pada akhirnya meningkatkan citra sebuah produk.

#### - MENGESANKAN DAN MUDAH DIINGAT

Sebuah *tagline* yang bagus adalah dapat menciptakan kesan tersendiri yang dirasakan oleh konsumen. *Tagline* hendaknya dibuat agar mudah diingat dan diucapkan, sehingga mempunyai *power branding* yang kuat.

#### - SINGKAT DAN JELAS

*Tagline* bisnis yang efektif adalah slogan yang dibuat dengan kalimat sederhana, singkat, namun mudah dipahami.

#### - MENCERMINKAN PERSONALITY

*Tagline* yang *powerful* adalah frasa yang dapat mencerminkan hal yang spesial pada merek, sehingga konsumen merasakan ada hal yang berbeda terhadap produk atau usaha yang sejenis dari para kompetitor. Oleh karena itu, buatlah *tagline* yang orisinal.

#### - MENDESKRIPSIKAN KEUNGGULAN

Agar lebih efektif dalam menjaring konsumen, *tagline* juga harus mencitrakan keunggulan pada produk atau usaha.

#### - BERKORELASI

*Tagline* yang mudah diterima dan berkesan di mata konsumen harus berkorelasi dengan jenis produk atau

bisnis yang dijalankan. Misalnya Nokia dengan *tagline* “Connecting People”, merupakan salah satu contoh slogan yang berkorelasi terhadap produknya, yaitu ponsel.

#### - MEMILIKI NILAI DAN MENGANDUNG MAKNA

Sebuah *tagline* juga hendaknya mempunyai nilai atau makna yang tersirat dalam kata-katanya. Selain itu, dapat mengisyaratkan seperti apa visi dan janji yang diwujudkan perusahaan. Misalnya perusahaan Olympus dengan slogannya “Your Vision, Our Future”.

#### - ATRAKTIF DAN BERIRAMA

*Tagline* diciptakan untuk menjadi salah satu daya tarik (magnetik) bagi konsumen. Agar lebih powerful, biasanya diwujudkan dalam bentuk *jingle*. Sedangkan di Indonesia, *tagline* yang bagus juga harus memiliki rima yang tepat, seperti rima pantun untuk *tagline* yang terdiri dari dua frase. Misalnya *tagline* situs jual beli Berniaga.com, “Jualnya gampang, Belinya senang”, sajak rimanya adalah a-a (gampang dan senang).

**Jadi, kira-kira tagline apa yang cocok untuk Bea Cukai? Silakan kembangkan idemu!**

# Penerapan Integrated Interface System (IES) Pertama Kali pada PT. CheilJedangIndonesia (CJI)



Sebagaimana diketahui bahwa pada tanggal 22 Maret yang lalu telah diresmikan penggunaan IES (Integrated Enterprise System) pada PT. CJI dengan ditandai adanya Penandatanganan MoU antara PT. CJI dengan Direktorat Jenderal Bea

dan Cukai yang dalam hal ini diwakili oleh KPPBC Pasuruan dan Kediri.

Untuk mengetahui lebih mendalam lagi tentang IES, berikut ini kami sampaikan penjelasan dari Bapak Teguh Indrayana sebagai Customs and Tax Advisor PT. CJI (mantan pejabat Bea dan Cukai sebagai Dir. IKC, Dir. Audit dan Dir. Teknis Kepabeanan) berdasarkan hasil wawancara dengan Beliau:

## Company Profile

PT. CJI adalah merupakan perusahaan industri yang berdiri sejak tahun 1988, yang awal berdirinya bernama PT. Cheil Samsung Astra, setelah mengalami beberapa kali perubahandan merger pada tahun 2004 berubah menjadi PT. CJI.

Pabrik PT. CJI berlokasi di 2 tempat yakni di Pasuruan dan Jombang.

Produk utama pabrik Pasuruan saat ini ( pangsa pasar terbesar di Eropa), adalah;

- L-Lyssine
- L-Tryptophan
- Prosin, Biogreen&Pupukcair (By Product)

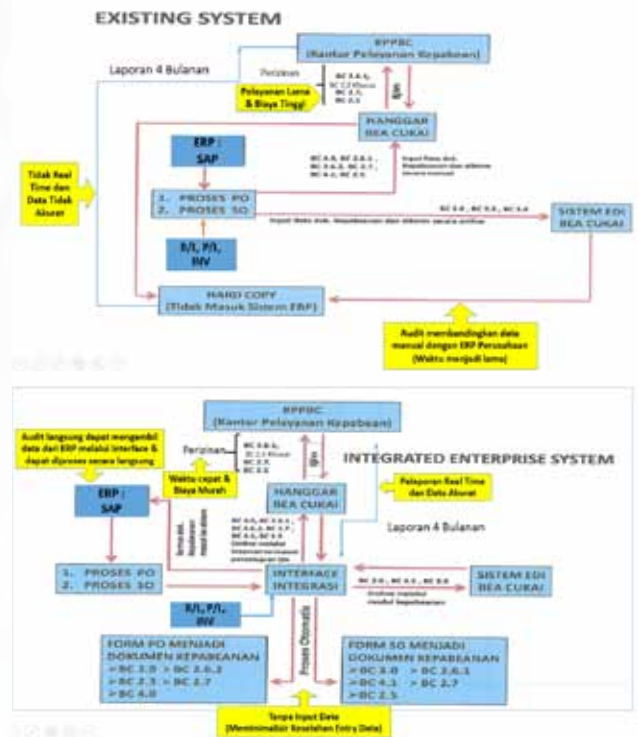
Sedangkan produk utama pabrik Jombang saat ini ( Pangsa pasar terbesar di Asia), adalah;

- Nukleotide (IMP, GMP dan I&G)
- MSG (Monosodium Glutamate)
- Protide, Promate, inotide & pupukcair (By product)

Sejak September 2008, PT. CJI merubah fasilitas impornya dari KITE menjadi Kawasan Berikat.

## LatarBelakang (Existing System)

Sebagaimana diketahui bahwa dalam system kawasan berikat saat ini terdiri dari 2 sistem yakni



manual dan online system dalam proses pemberitahuan kepabeanan.

Sistem yang sudah online adalah BC 2.0, BC 2.3, dan BC 3.0, sedangkan yang belum online (manual) adalah BC 2.5, BC 2.6.1, BC 2.6.2, BC 4.0, BC 4.1 dan BC 2.7.

Berdasarkan hal tersebut, dari sisi pelayanan kepabeanan, maka tentu saja pelayanan terhadap system yang telah online akan lebih cepat dibandingkan dengan yang manual.

Disamping itu baik system yang manual maupun online masih memerlukan banyak banyak input data dalam rangka pemberitahuan kepabeanannya, sehingga dimungkinkan banyak human error.

Dari sisi pengawasan terutama audit kepabeanan akan memakan waktu yang lebih lama lagi baik online maupun yang manual karena belum terintegrasi dengan system ERP perusahaan.

## Proses Program IES

Dengan latarbelakang hal tersebut, maka

diperlukan suatu system yang mengintegrasikan antara ERP perusahaan dengan system kepabeanaan.

Sistem integrasi ini kita sebut dengan IES (Integrated Enterprise System) yang akan mengintegrasikan antara system kepabeanaan dengan ERP perusahaan, sehingga diharapkan dapat mempercepat pelayanan dan mempermudah pengawasan.

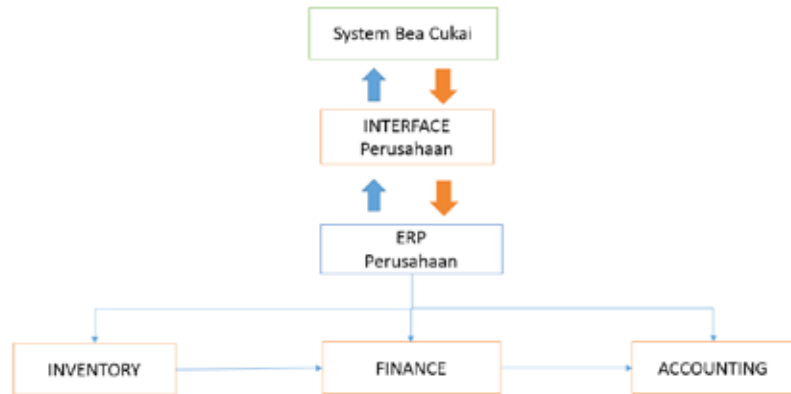
### Mengapa bisa mempercepat pelayanan ?

Dalam hal ini untuk proses pemberitahuan kepabeanaan yang masih manual dibuat online system berdasarkan Web antara PT. CJI dengan Hanggar dan KPPBC, sehingga pelayanan menjadi lebih cepat termasuk proses perijinan. Dengan demikian proses pemberitahuan kepabeanaan bisa di onlinekan semua. Namun demikian meskipun telah online semuanya untuk lebih mempercepat proses lagi dibuat program interface integrasi sehingga dapat mengurangi kesalahan dalam proses input data.

Program interface integrasi ini akan merubah data/dokumen internal perusahaan menjadi dokumen kepabeanaan secara otomatis, meskipun masih ada beberapa input data yang diperoleh dari pihak ketiga (BL, Packing List, invoice).

Selanjutnya dari interface integrasi ini dokumen pemberitahuan kepabeanaan bisa dikirim secara online melalui Web maupun system yang sudah online. Respondari system kepabeanaan akan diterima oleh program interface integrasi dan akan ditransfer langsung kedalam system ERP perusahaan. Selain itu juga respon ini akan dimasukkan kedalam format pelaporan 4 bulanan (IT Inventory) yang dipasang pada program interface integrasi. Dengan demikian diharapkan pelaporan 4 bulanan

## IES



dapat dilakukan dengan tepat waktudan data yang akurat.

### Mengapa mempermudah pengawasan ?

Sebagaimana disebutkan dimuka bahwa respondari system DJBC akan langsung dimasukkan kedalam ERP perusahaan, sehingga dalam ERP perusahaan nantinya akan terlihat data dokumen perusahaan dan dokumen kepabeanaan yang terkait. Dengan demikian apabila dilakukan audit kepabeanaan hanya perlu melakukan download data dari ERP perusahaan atau dari interface integrasi, karena semua data kepabeanaan masuk di dalam ERP perusahaan. Hal ini berbeda bila audit dilakukan bagi perusahaan-perusahaan yang belum mengintegrasikan system ERP perusahaan dengan system kepabeanaan, karena auditor harus membandingkan data kepabeanaan yang dimilikinya dengan data perusahaan di dalam ERP-nya secara manual, sehingga memerlukan waktu yang lama dan belum tentu data tersebut akurat.

Sebagai catatan system online berdasarkan Web, bahwa dokumen-dokumen hardcopy akan diserahkan kepada Bea Cukai dalam waktu maksimal 3 hari. Selain itu apabila DJBC telah memandatorykan system yang selama ini masih manual, maka system online berdasarkan Web ini tidak akan digunakan lagi dan akan menggunakan system online

yang mandatory dari Bea Cukai.

### Persyaratan untuk IES

Persyaratan utama untuk bisa membangun system ini adalah ;

1. Transparansi dari perusahaan sendiri
2. ERP perusahaan mau dan dapat dimodifikasi
3. Modul impor dan ekspor ditangani sendiri
4. Harus ada MoU antara perusahaan dengan DJBC

### Perbandingan IES dengan Sistem online lain.

Untuk pembuatan dokumen kepabeanaan, pencatatan barang masuk dan keluar, penentuan saldo akhir, laporan 4 bulanan dalam IES dilakukan melalui interface integrasi secara otomatis yang terintegrasi dengan ERP perusahaan, sehingga tidak perlu secara manual dengan melakukan entry formulir maupun dengan cara upload data. Selain dari pada itu untuk server data basenya dapat terjamin karena dimiliki dan berada dalam perusahaan masing-masing jadi servernya tidak berbagi dengan perusahaan lainnya.

Selain dari pada untuk perijinan dan proses BC 2.5 dilakukan secara online dengan KPPBC

Sebagai catatan, bahwa system ini sifatnya individual tidak bisa digeneralisasi namun demikian jumlah penggunaannya tidak terbatas karena masing-masing mempunyai *server database* sendiri-sendiri.

(Supriyadi)



# KAPAL PATROLI BEA CUKAI PERTAMA UNTUK DAERAH I TANJUNG PRIOK

**K**antor Bea dan Cukai Daerah I Tanjung Priok adalah salah satunya Daerah yang mempunyai seksi Perairan. Dulunya bernama *Sectie Terwater En opsporing Dienst*, kemudian berganti nama menjadi Seksi-Perairan dan Dinas Khusus, yang mempunyai wilayah tugas meliputi sepanjang pantai Jawa Barat. Waktu itu pelaksanaan tugas pengambilan dokumen dari kapal-kapal niaga yang baru tiba dari luar negeri itu hanya memiliki satu sekoci dan motor tempel kecil yang tidak memadai. Sedang tugas *bootzoeking*/ pemeriksaan kapal hanya mengandalkan pinjaman sarana angkutan air dari Syahbandar, yang sering terkendala karena kesibukan Syahbandar sendiri, petugas Bea Cukai sering ditinggalkan.

Seperti dikisahkan oleh **Capten. H. Ismoe Hindrarko**, karena kondisi seperti tadi, maka timbul gagasan untuk memiliki kapal patrol tipe BT. Gagasan ini nyaris terbentur oleh paham pro dan kontra antara Kepala Daerah Istimewa Tanjung Balai Karimun Pengawas Besar I.G. Pindrang yang beranggapan bahwa penyelundupan hanya rawan di perairan Riau saja, tentunya untuk komoditi ekspor. Sedang para pejabat muda menghadapi kenyataan bahwa barang impor justru diselundupkan melalui pantai utara Pulau Jawa.

Setelah didesak oleh Penilik Pabean Tk.I Djunta Soardi dan Menyek Soegiharto yang didukung oleh Kantor Besar, akhirnya penempatan kapal BT 206 disetujui, dengan catatan bahwa SPDC Daerah I Tanjung Priok harus segera mendapatkan ABK sendiri. Secara kebetulan Menyek Soegiharto mempunyai keluarga seorang pelaut, Ismoe sendiri masih aktif sebagai Mualim I MV Polera yang baru tiba di Tanjung Priok dari luar negeri. Waktu pertama berjumpa di Tanjung Priok, Menyek berkomentar “Keadaan negara seperti ini, kamu bekerja pada orang asing, pulanglah, ada kapal Douane sudah menunggu,” ujar Ismoe Hindarko yang tanpa pikir panjang akhirnya bersedia membantu sebagai Nakhoda pada kapal patrol BT yang memang sudah ada di Tanjung Priok. Dengan sadar Ismoe tinggalkan gaji dollar yang dikurs waktu itu Rp 32.000,- dan menerima gaji hanya Rp. 1.200,- demi pengabdian kepada Negara.

Sejak kapal BT 206 dipindahkan dari jajaran armada Tanjung Balai Karimun dan ditempatkan di Tanjung Priok pada akhir Agustus 1961, kapal tersebut diserahkan oleh awak kapal dari Daerah Istimewa dibawah Nakhoda Pengatur tk.I (PK) Thomas Tolip dan KKM Pengatur, M.Salam kepada awak kapal

yang baru di Jakarta pada 26 Oktober 1961. Mula-mula yang diterima sebagai nakhoda kapal hanya Ismoe sendiri. Waktu itu tentu saja ia sempat bingung, *kok* demikian caranya. Kemudian Ismoe menanyakan kepada Kepala Bagian Kepegawaian Pengawas Tk.I, Moechtar, dimana ABK yang lain ? Moechtar menjawab, harus mencari sendiri.

“*Wah ..*, ini kayak merekrut ABK abad 19-an. Kebetulan di atas Kapal BT 206 ada Endang Setiawan, pelaut muda yang mencari pekerjaan, dia pun langsung saya catat sebagai ABK yang pertama. Berawal dari Endang Setiawan, saya berpikir bagaimana kalau dijadikan Kapal Pancasila,” ungkap Ismoe menceritakan awalnya mengumpulkan para awak untuk kapal BT 206.

## Dan tersusunlah :

<b>Nakhoda</b>	: Pengatur (PK)	<b>ISMOE HINDRARKO P</b>
<b>Mualim I</b>	: Pengamat (PK)	<b>M. RUSLI TANJUNG,</b>
<b>Mualim II</b>	: Pengamat (PK)	<b>MADCHAN NOOR SUAEDHY, K.K.M.</b>
	Pengamat (PK)	<b>EVERT MANUPUTTY</b>
<b>Jurumudi</b>	: Juru Tk.I (PK)	<b>ENDANG SETIAWAN</b>
<b>Juru Motor</b>	: Juru Tk.I (PK)	<b>RADE HUDSON</b>
<b>Juru Minyak</b>	: Juru (PK)	<b>MARTIN KATIANDAGO</b>
<b>Juru Minyak</b>	: Juru (PK)	<b>SAYANG BATTE</b>
<b>Kelasi</b>	: Juru (PK)	<b>ISHAK HAYAT</b>
<b>Kelasi</b>	: Juru (PK)	<b>MELKIAS RAJALADO</b>
<b>Kelasi</b>	: Juru (PK)	<b>PAIMAN</b>
<b>Juru Masak</b>	: Juru (PK)	<b>WILLEM DIRONO</b>

Kapal ini satu-satunya diantara seluruh armada BT yang diawaki oleh pemuda dari berbagai daerah Indonesia, antara lain : dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa, Sunda, Madura, Ambon, Sangir dan Timor. Hal ini sengaja dipilih untuk mencerminkan ke-Bhinneka Tunggal Ika-an dalam satu kapal. Dan ini menjadi suatu kebanggaan Daerah I Tanjung Priok.

Untuk Operasi BT 206 dikendalikan oleh Penilik Pabean Tk.I Menyek Soegiharto selaku Kepala Seksi Perairan Dan Dinas Khusus Daerah I Tanjung Priok. Rencana cross patroli bersama kapal BT yang berpangkalan di Surabaya belum sempat dilaksanakan. Maka dimulailah patroli rutin BT 206 di perairan antara Merak – Tanjung Priok – Cirebon – dan dengan koordinasi bersama Dinas Khusus Daerah II Semarang, kadang-kadang BT 206 singgah di pelabuhan Tanjung Emas. Selain itu dimanfaatkan juga sebagai sarana inspeksi dinas ke berbagai daerah, antara lain, Tanjung Balai Karimun, Selat Panjang, Bengkalis, Pekan Baru dan sebagainya secara optimal.

(Ariessuryantini)



CCC Tour De Kawah Putih Ranca Buaya  
**“Obat Kangen  
Goweser Sejati”**



**B**icara soal bersepeda boleh dibilang hampir seluruh pegawai bea cukai menyukai olah raga ini, selain sehat olah raga ini juga murah meriah dan dapat dilakukan oleh semua orang. Untuk itu tidak heran kalau di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mendirikan komunitas bersepeda yang diberi nama Customs Cycling Club (CCC). Komunitas yang berdiri sejak tahun 1992 tersebut, hingga kini terus melakukan berbagai kegiatan sepeda bersama, mulai dari kantor masing-masing, hingga secara nasional yang diikuti oleh berbagai kantor di Indonesia.

Setelah sekian lama vakum dari kegiatan nasional, maka untuk mengobati kerinduan para

goweser sejati di DJBC, melalui badan pembina olah raga (Bapor) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean A (KPPBC TMP A) Purwakarta, mengadakan tour de Kawah Putih hingga Ranca Buaya yang berjarak kurang lebih 95 kilometer dengan melewati tiga kabupaten di Jawa Barat, yaitu start mulai dari halaman eMTe Highland Resort Kawah Putih Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur dan finis di pantai Ranca Buaya Kabupaten Garut .

Tour de Kawah Putih yang dibuka langsung oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, **Heru Pambudi**, diikuti oleh 185 peserta dari berbagai kantor bea cukai di Indonesia, seperti Banda Aceh, Sumut, Riau, Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY,

Jawa Timur, Palembang, dan Lampung. Melihat antusias pegawai yang mengikuti kegiatan ini, Dirjen mengatakan kegiatan ini merupakan kegiatan yang positif untuk bea cukai baik untuk organisasi maupun personal. Dari sisi organisasi ini adalah suatu bentuk komunikasi dan koordinasi yang pada akhirnya diharapkan ada konsolidasi dan soliditas. Sedangkan dari sisi personal, penting untuk membina kesehatan. Karena bea cukai sebagaimana yang diketahui bekerja di dua area, yaitu area administratif dan area fisik, salah satu cara untuk membina fisik adalah dengan bersepeda seperti ini.

“Sepeda memang olahraga yang disarankan dan dalam sejarahnya bea cukai sangat bagus





dengan olahraga ini. Dan kegiatan ini merupakan momentum bagi bea cukai untuk menunjukkan kalau kita merupakan keluarga besar baik ditataran kerja maupun hubungan personal. Saat ini saya akan meminta untuk membuat suatu kegiatan yang reguler dalam arti skala nasional sehingga semua unit bisa membuat planning berapa kali dalam setahun yang tujuannya untuk komunikasi, koordinasi, konsolidasi dan soliditas,” ujar Heru.

Sementara itu, menurut Kepala KPPBC TMP A Purwakarta, **Siswa Murwono** selaku pengagas acara CCC tour de Kawah Putih mengatakan, event atau rute yang dibuatnya adalah untuk yang keenam kalinya dimana rute tantangan sejauh 95 kilometer yang diberi plus-plus-plus, yaitu plus naik, plus turun, dan plus jauh, namun karena event seperti ini agak jarang maka antusias dan semangat peserta sangat membanggakan, hal ini dapat dilihat dari jumlah peserta yang tadinya diperkirakan hanya 60 hingga 70 peserta, saat ini mencapai 185 peserta dari seluruh Indonesia.

“Semua peserta yang mengikuti rute saya pasti sudah tahu kalau itu ada nilai perjuangannya sehingga mereka merasa bangga bisa mengikuti event yang saya jalankan dan berhasil, sehingga kaus yang dipakai itu mempunyai nilai yang bersejarah..” ungkap Siswa.

Untuk rute yang ditempuh memang cukup menantang, dimana selain disugahi jalan menurun yang cukup curam dan panjang, peserta juga diwajibkan melewati tanjakan yang cukup tinggi. Namun semua itu dapat dilalui dengan senang hati karena seluruh jalur yang dijalani menyugui pemandangan alam yang sangat indah dan menyejukan mata.

Bahkan peserta wanita asal Yogyakarta dan Surabaya berhasil



mencapai garis finis dengan penuh kebanggaan.” Awalnya saya sempat mengurungkan niat untuk mengikuti Tour de Kawah Putih – Ranca Buaya karena saya goweser pemula dan saya buta medan tentang Ciwidey. Pada 22 km awal saya disugahi tanjakan dan turunan yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya, Niat awal saya yang tadinya hanya akan berpartisipasi hingga pos pertama menjadi berubah. Saya bertekad untuk mencapai finish. Semangat saya tumbuh sekali lagi

karena motivasi dari rekan-rekan CCC Yogyakarta,” tutur Indah Widyaning Ayu, peserta wanita asal KPPBC Yogyakarta.

Pemandangan yang disuguhkan memang sangat mempesona, selain kita bisa menyaksikan hamparan perkebunan teh, kita juga disugahi pemandangan air terjun disisi jalan yang sangat mengagumkan. Dan yang mengasikan lagi saat finis ditepi pantai Ranca Buaya yang keindahannya tidak kalah dengan pantai lainnya.

(Supriyadi)

# “...BOTAN OOH BOTAN..!”

## (Di Laut Kita Mencari Prestasi)

**S**ofyat masih bermalasal-malas merebahkan tubuhnya di tempat tidur, tidak terburu-buru bersiap berangkat ke tempat tugasnya. Maklum, hari minggu adalah hari libur kerja dan ia memanfaatkan untuk sekedar beristirahat cukup. Tiba-tiba ada suara memanggilnya. Yaa suara istrinya terdengar memanggilnya dari arah dapur.

*“Bapaaaak.....tolongin ibu, ke mari sebentar pak..!!,”* suara istrinya memanggil dari dapur. *“Ada apa bu ?..”* *“Pak tolong bukakan kaleng sarden ikan ini, kunci pembuka yang menempel di kaleng kemarin patah, hari ini aku mau memasaknya tolong di bukakan dengan memakai pisau ini..”*

Sofyat coba membuka kaleng sarden tadi, cukup susah memang, karena kalengnya tebal..beberapa kali dia memukul-mukul kaleng dengan pisau dan martil agar mau terbuka, tapi belum mau juga terbuka. *“Apa siih ini mereknya.... ooh BOTAN, kok sulit sekali dibuka kalengnya, naah akhirnya kena, terbuka juga nii kalengnya,” gumamnya.*

*“Bu sudah terbuka kalengnya, kalau mau dimasak sudah bisa..”* ucap Sofyat kepada istrinya. *“Ya*

*pak aku masaknya segera..”* ujar sang istri.

Menu sarden merupakan lauk kesenangan Sofyat, namun ia tidak pernah memperhatikan apa merek lauk sarden kesukaannya itu. Tapi karena dimintakan tolong istrinya untuk membukakan kemasan kaleng ikan, Sofyat jadi ada perhatian sedikit mengenai merek ikan sarden kesukaannya. Ternyata BOTAN selama ini sudah jadi merek sarden yang sering dimakannya. Bahkan jika harus berangkat patroli malam, sering ia mintakan istri memasaknya untuk dibawa sebagai lauknya jika tugas patroli laut.

Sofyat adalah Komandan Patroli Laut yang bertugas di Kanwil Bea dan Cukai Khusus Kepri. Hari itu meski sedang menikmati waktu liburnya tapi harus standby jika sewaktu-waktu menerima perintah untuk berlayar. Bunyi nada dering lagu *Laksmna Raja Di Laut* yang dinyanyikan Iyeth Bustami berdering keras... Sofyat pun segera menyambar hp yang ada di meja kamarnya. Sore itu menunjukkan waktu pukul 13.30 WIB. Dari layar hp terlihat nama Arsyad memanggilnya... ..”Segera Sofyat menyahut... Assalamualaikum Syad...”

Diseberang Arsyad

menyahut..”Sofyat bersiap-siaplah ada perintah berlayar, ada target operasi yang harus kita tegah.. cepat segera kumpul yaa..” Segera setelah telepon ditutup, Sofyat mempersiapkan keperluannya. Ia pun menyampaikan hal itu kepada isterinya bahwa ia harus segera berangkat berlayar, karena ada perintah mendadak dari atasannya. Tanpa dikomando pun sang istri membantu menyiapkan segala perlengkapan yang akan dibawa suaminya, tak lupa ia memasukkan sarden kesukaan suaminya ke dalam rantang sebagai bekal makannya, walaupun di kapal patrol juga disediakan makanan yang dimasak oleh juru masak kapal.

Selesai mengemas-ngemas perlengkapan, Sofyat ditemani istri dan dua anaknya sempatkan makan dulu, *“..hhmmmm pedas segar ini sarden...makan ku jadi banyak bu..”* tampak istrinya tersenyum melihat Sofyat makan dengan lahapnya.

Sofyat pun segera bersiap berangkat, bu aku berangkat dulu, doakan semoga lancar dan selamat menunaikan tugas...nak bapak jalan dulu ya jaga ibu mu..doakan bapak tidak ada halangan, pulang dengan selamat membawa prestasi dari laut..”Iya pak hati-hati ya



pak, aku doakan semoga harapan bapak menjadi kenyataan,” ujar istrinya yang diamini oleh kedua anaknya.

Segera Sofyat menaiki motornya, berangkat menuju Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun. Jarak yang tidak jauh dari rumahnya sehingga ia bisa cepat sampai ke kantor. Terlihat seluruh personil berjumlah 19 orang, termasuk Arsyad sebagai Nakhoda Kapal yang akan menjadi timnya berpatroli telah berkumpul di ruang briefing untuk briefing yang dipimpin oleh Sofyat sebagai Komandan Patroli hari itu. Dalam briefing tersebut dijelaskan berdasarkan laporan informasi ada pergerakan dua kapal di Perairan Tanjung Tanjung Kedabu, dan informasi ini harus

ditindaklanjuti.

Pada saat surat perintah berlayar diterbitkan dan telah ditentukan siapa saja yang akan ditugaskan maka yang akan dipersiapkan adalah kelayakan kapal untuk berlayar, kecukupan bahan bakar kapal, persenjataan yang akan menyertai operasi, wilayah yang akan dituju sesuai dengan target operasi yaitu dua buah kapal tanker mengangkut ribuan ton Bahan Bakar Minyak (BBM), termasuk persiapan untuk keperluan ransum anak buah kapal (ABK) selama berlayar.

### **Melakukan Persiapan Sesuai SOP**

Sesuai ketentuan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diatur dalam Keputusan

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kep-58/BC/1997 tentang Kapal Patroli, yang salah satu pasalnya disebutkan, untuk Kapal Patroli yang dipergunakan dalam patroli Bea dan Cukai dapat dilengkapi dengan senjata api dinas. Penempatan senjata api dinas pada Kapal Patroli wajib dicantumkan dalam Surat Perintah Berlayar. Penempatan senjata api dirinci mengenai jumlah, jenis, merk, tipe, dan ukuran/kaliber serta jumlah munisi untuk masing-masing jenis serta nama-nama petugas yang bertanggung jawab untuk tiap-tiap senjata api dinas. Mereka dipersenjatai karena bila terdapat ancaman atau perlawanan sehingga membahayakan keselamatan kapal patroli dan mengancam jiwa Satuan Tugas Bea dan Cukai, Komandan





Patroli dapat memerintahkan dan melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata api dan segera melaporkan kepada Pejabat Penerbit Surat Perintah.

Setelah semua itu disiapkan selanjutnya ada tim survey kapal untuk melihat syarat kelengkapan yang telah disiapkan. Jika sudah dianggap layak, tim pun menjalankan perintah untuk berlayar. Kapal patrol yang dipergunakan dalam rangka patroli Bea Cukai wajib dilengkapi dengan Surat Perintah Berlayar.

Segala prosedur untuk berangkat berlayar telah mereka penuhi, sekitar ba'da magrib tanpa diketahui pihak lain kecuali pimpinan yang memerintahkan untuk berlayar, berangkatlah Sofyat sebagai Komandan Patroli dan Arsyad sebagai Nakhoda

kapal beserta 17 Anak Buah Kapal (ABK) menuju wilayah yang telah disebutkan dalam surat perintah berlayar dengan menggunakan Kapal Patroli BC 20002. *Ya* bisa dibilang keberangkatan tim mereka dirahasiakan. Terkadang berangkat sore bahkan tengah malam. Malah kalau cuaca sedang tidak bersahabat justru pada saat angin kencang mereka berangkat berlayar.

### **Cuaca malam itu cukup bersahabat.**

Sebagai Komandan Patroli, maka tugas yang harus dilaksanakan Sofyat selama melaksanakan patroli antara lain, Komandan Patroli wajib melaporkan posisi dan kegiatannya dalam waktu tertentu yang ditetapkan oleh Pejabat Bea dan

Cukai yang memberi perintah, membuat catatan perjalanan dalam Jurnal Kapal dan atas setiap kerusakan Kapal Patroli, Komandan Patroli wajib mencantumkan dalam Jurnal Kapal dan membuat Laporrannya.

### **Menemukan Target Operasi**

Terlihat juru masak, Hasan sedang menyiapkan makan malam. Setelah sajian matang pukul 19.00 mereka secara bergiliran makan malam. Ada yang tetap berjaga ada yang mulai makan, begitu sebaliknya yang selesai makan lalu menggantikan temannya yang belum makan. Sambil menikmati lauk pauk yang dimasak juru masak, tak lupa Sofyat menyantap lauk kesukaannya, sarden ikan. Selesai mereka menyantap makan malam pekerjaan mengintai dilanjutkan. Begitulah setiap kegiatan yang mengharuskan mereka meninggalkan sejenak kegiatannya tidak boleh kosong sama sekali, harus dilakukan secara bergantian, bahkan tidur pun mereka harus bergantian agar kegiatan pemantauan bisa berjalan penuh selama 24 jam.

Setelah kurang lebih mengintai selama 7 jam, tepat pukul 2.30 malam tim patroli BC 20002, berhasil menemukan sebuah kapal yang menjadi target operasi. Lokasinya masih berada di Perairan Indonesia yaitu Perairan Tanjung Kedabu, di posisi koordinat 01° 18' 700" U/ 103° 00' 300" T. Di lokasi, tim patroli yang dikomandani Sofyat menemukan objek di radar berupa kapal yang posisinya bersampingan. Penindakan dilakukan di perairan Tanjung Kedabu wilayah Indonesia pada Selanjutnya dilakukan peneropongan untuk memastikan kebenaran hasil bacaan radar yang terlihat samar-samar bahwa kedua kapal tanker tersebut sedang berdampingan. Melihat hal itu tim langsung bergerak cepat

mendekati dua kapal. Setelah berhasil didekati terlihat jelas dua buah kapal bernama MT STAR berbendera Nigeria dan satu lagi MT BOTAN berbendera Indonesia. Terlihat pula para kru kedua kapal panik saat tim patroli BC 20002 mendekat.

Menjadi bukti awal yang kuat bahwa kapal itu ingin menyelundupkan BBM, terlihat selang-selang berserakan di atas kapal tersebut menunjukkan bahwa kedua kapal tersebut melakukan transfer muatan (kencing di laut) dan diduga berhenti secara terpaksa setelah melihat kapal patrol BC 20002. Untuk menguasai keadaan, lima orang anggota tim patroli langsung naik ke atas kapal MT BOTAN guna pemeriksaan dan menguasai kapal. Namun disaat yang bersamaan kapal MT STAR mencoba bergerak haluan menuju ke arah Singapura. Tak ingin buruannya lepas, tim patroli langsung melakukan pengejaran.

### Nyaris Celaka Saat Mengejar Tanker

Tanpa basa-basi kapal tersebut segera mereka songsong dan diteriaki untuk berhenti, tapi kapal tersebut terus melaju mengarah pantai Singapura, malah setelah menengok ke arah petugas patroli dan mengetahui bahwa mereka adalah adalah Bea Cukai mereka segera menutup pintu-jendela ruang kemudi dan menambah kecepatan. Arsyad dari ruang kemudi melihat dengan jelas asap hitam semakin tebal keluar dari cerobongnya dan mereka memaksa langsung membelokkan arah menuju ke Malaysia. *“Capt!! Langsung sandar sebelah kanan, jangan biarkan dia mengarah ke pantai!!”* kata Heru salah satu anggota patroli BC 20002. Akhirnya BC-20002 dipaksakan sandar ke kapal tersebut.

*“Brrraakhh... Braaakhh! ...”* dua

kali mereka terhempas dan olang ketika akan bersandar dan mereka terus menambah kecepatan. *“Coba ... ..sekali lagi Capt!! Kita ambil dari belakang!!, ... ..”* *“Khrraaaak!”*, kali ini benturannya agak keras tapi akhirnya moncong speed bagian depan saja yang bisa menempel ke kapal tanker iitupun mungkin hanya 3 – 5 detik, keadaan semakin sulit dikendalikan karena situasi tidak mendukung karena gelombang dan laju kapal yang cukup tinggi, hanya Heru dan Andri saja berhasil melompat karena posisinya paling depan... .. tiba-tiba Rizal yang tepat berada dibelakang Sofyat berteriak... .. *“Paak!... ada yang jatuh di belakang... !!”*... Sofyat pun tersentak dan melihat ke belakang... karena gelap memang susah untuk memastikan siapa dan apa benar ada yang jatuh karena dari kita semua pandangan terfokus ke kapal untuk melompat... .. salah satu

Salah satu nama rekan kita dia tidak ada... .. *“Ya Allah!!”*.... dengan mata kepala sendiri, Sofyat hanya melihat Heru yang bisa naik ke atas... lho mana Andri?... .. *“Putar Balik!!”* teriak Sofyat.... antara yakin dan tidak yakin bercampur super was-was Arsyad segera memutar speed meninggalkan Heru yang sendirian di atas kapal tersebut.

Sempat terpikir dalam benak Heru mengenai kemungkinan buruk... untuk memihak penyelamatan salah satu teman... .. yang kecebur dan tenggelam!... .. atau Heru yang sendirian di atas kapal dan dikeroyok penyelundup...! tapi Heru bawa senjata... ..! sehingga putar balik menjadi keputusan harga mati, kurang lebih lima menit mereka a mengitari lokasi rekan mereka yang jatuh dengan gelapnya malam dan gelombang laut sempat membuat nyali mereka ciut... ..) *“Ya... Allah selamatkanlah temanku...!!”* begitu semua yang terucap dari

tim patroli ... .. ternyata Allah mendengarkan doa mereka, lambaian tangan muncul dari permukaan laut, dengan segera mereka menghampiri dari samping speed karena takut terkena propeler (putaran kipas mesin belakang)..... kita menyambarnya tapi lepas, tergeser gelombang... .. dan lambaian tangan itu kembali menghilang... ..

Sepertinya perasaan putus asa mulai menghinggapi, mereka sudah tidak lagi berucap dan membayangkan...namun mukjizat dari Allah, beberapa saat kemudian, tampak telapak tangan saja yang kelihatan dari permukaan laut... .. dan memang kesempatan tersebut sepertinya adalah kesempatan terakhir yang diberikan Allah untuk tim patroli.... akhirnya Arya dan Saut bisa memegang dan menarik ke atas speed.

Tak ada yang bersuara waktu itu.... dingin... senyap... Mereka hanya melihat teman yang basah kuyup lengkap dengan sepatunya, berpakaian lengkap dan takjubnya lagi dibahunya masih melingkar senjata laras panjang.... Wajahnya pucat, menggigil kedinginan dan muntah-muntah... .. *“Terima kasih ya Allah.... Engkau masih memberi kesempatan sehingga lambaian tangan itu bukan lambaian tangan yang terakhir, sungguh!! kami tak sanggup lagi menghitung dan membayar nikmatMu”*.

Karena di *speed* cuma ada balsem, sambil *menggloyor* balsem ke tubuhnya, BC-20002 melaju lagi ke arah kapal dimana Heru masih berada di atas. Terlihat oleh mereka kapal kayu tersebut sudah mengurangi kecepatan, tapi anehnya kenapa arahnya menuju ke pantai Singapura yang waktu itu banyak sekali tangker-tangker besar merapat, ... . Detak jantung kami kembali berpacu jangan-jangan Heru tak bisa menguasai keadaan kapal.

Tak berapa lama kami sudah berada di samping kapal tersebut sambil berusaha bersandar ke kapal, “*Hei... cepat naik!, kalian membiarkan saya mati sendirian ya?!!*” pekik Heru sambil tangan kirinya memegang kemudi kapal dan tangan kanannya mengacungkan pistol ke ABK kapal agar tak masuk ruang kemudi. “*Tap!...tap!..tap!...*” semuanya naik ke kapal, sedangkan Arsyad tinggal di speed. Kapal akhirnya bisa dikuasai meski sempat salah seorang melakukan perlawanan dan terpaksa dibogem mentah oleh Saut

Akhirnya mereka berhasil menggiring MT STAR ke wilayah Indonesia. Kapal patroli BC 20002 selanjutnya kapal berbendera Nigeria itu dan tujuh orang anggota patroli yang telah siap siaga langsung naik ke atas kapal untuk melakukan pengamanan, penguasaan dan pemeriksaan lebih lanjut.

Selanjutnya BC 20002 sandar di MT BOTAN dan langsung memerintahkan nakhoda

beserta kru kapal sebanyak 16 orang naik ke atas kapal Patroli BC 20002, sedangkan sisanya didampingi 5 orang dari tim patroli diperintahkan membawa MT BOTAN untuk memastikan kapal untuk Lego Jangkar di perairan Dermaga Ketapang, Kanwilsus Bea dan Cukai Kepulauan Riau (Kepri), di Tanjung Balai Karimun. Hal yang sama juga dilakukan terhadap kru kapal MT STAR yang didampingi 7 anggota patroli BC 20002 untuk memastikan haluan kapal menuju Tanjung Balai Karimun.

Jadi penindakan terhadap kapal MT STAR dan MT BOTAN dilakukan karena diduga MT BOTAN yang berbendera Indonesia melakukan penyelundupan ekspor BBM berupa MFO ke Singapura melalui transfer BBM di tengah laut ke kapal MT STAR berbendera Nigeria. Saat dilakukan pemeriksaan di atas kapal tersebut terdapat double manifest dari *shipper* (pengirim) dan *consignee* (penerima) dan tidak ada dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang

untuk MFO yang menggunakan alat angkut MT BOTAN sehingga ada dugaan akan melakukan penyelundupan ekspor.

Kemudian untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan Kasi Penindakan berkoordinasi dengan Kepala Bidang P2 dan Kepala Kanwil Bea Cukai Kepri mengirim kapal BC 30001 menuju perairan Tanjung Kedabu untuk membantu kapal Patroli BC 20002. Guna kepentingan lebih lanjut kedua kapal ditarik ke Dermaga Kanwilsus Bea Cukai Kepri di Tanjung Balai Karimun. Menjelang fajar daratan Batam telah Nampak sambil mengira-ngira berapa ribu ton BBM yang dimuat kapal MT BOTAN, Sofyat bergumam...*namamu begitu dikenal karena kelezatan rasa sardennya dan mudah memasaknya, tapi tak semudah saat menangkapmu, Botan!!*

**(terinspirasi dari kisah seorang petugas Patroli BC yang bertugas di Tanjung Balai Karimun) / Ariessuryantini.**





# DEKLARASI INISIATIF

*Telaah PMK 67/PMK.04/2016 tentang Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) atas Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk.*

## Latar Belakang

Dalam penjelasan Pasal 17 ayat (4) Undang Undang Kepabeanaan disebutkan bahwa pada dasarnya yang mengetahui besarnya suatu transaksi impor hanyalah pihak penjual dan pembeli sehingga kebenaran pemberitahuan nilai transaksi semata-mata tergantung pada kejujuran pihak yang bertransaksi. Hal ini memunculkan *joke* bahwa hanya importir dan Tuhan sajalah yang tahu kebenaran nilai pabean yang diberitahukan dalam PIB. Hal ini juga menjadi tantangan bagi DJBC untuk merancang sebuah mekanisme penelitian nilai pabean yang mampu mendeteksi secara dini (*early warning*) adanya indikasi *undervaluation*. Diperlukan sebuah terobosan yang mengubah proses penelitian nilai pabean secara mendasar yang lebih bertumpu pada sistem otomasi (*valuation engine*) yang didukung oleh *database* yang lengkap dan akurat serta ditangani oleh *expert analys* yang terspesialisasi.

Kembali ke penjelasan Pasal 17 ayat (4), kesalahan akibat ketidakjujuran yang ditemukan

dalam penelitian kembali atau dalam pelaksanaan audit kepabeanaan dikenai sanksi administratif berupa denda yang besarnya bejenjang, paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang kurang dibayar dan paling banyak 1000% (seribu persen) dari bea masuk yang kurang dibayar. Aturan denda ini tentu saja merepotkan bagi importir yang mempunyai itikad baik untuk memberitahukan nilai yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar dalam PIB, namun terkendala karena adanya komponen nilai transaksi berupa harga *futures*, *royalty* dan *proceed* yang belum dapat diketahui besarnya pada saat pengimporan. Kondisi inilah yang kemudian menjadi salah satu latar belakang dikeluarkannya PMK 67/PMK.04/2016 tentang deklarasi inisiatif atau *voluntary declaration*, yang dapat juga dipandang sebagai sebuah upaya untuk menumbuhkan *voluntary compliance*.

## Definisi

Deklarasi Inisiatif adalah

pemberitahuan importir dalam PIB atas harga atau biaya-biaya yang harus ditambahkan pada nilai transaksi, yang belum dapat ditentukan nilainya pada saat pengajuan PIB, antara lain *pertama*, harga *futures* yaitu harga penyelesaian (*settlement price*) yang baru dapat dipastikan pada suatu tanggal tertentu (*settlement date*) setelah tanggal pendaftaran PIB. Barang dengan harga *futures* biasanya merupakan komoditas yang diperdagangkan di bursa berjangka komoditas (*futures market*) yang didukung kesepakatan (kontrak tertulis) antara pembeli dan penjual untuk jangka waktu tertentu.

*Kedua* royalti, dimana pada barang impor terdapat Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dibayar oleh pembeli secara langsung atau tidak langsung adanya kewajiban hukum dalam suatu kontrak/perjanjian untuk membayar Royalti.

*Ketiga* *proceed*, merupakan nilai dari bagian pendapatan yang diperoleh pembeli atas penjualan kembali, pemanfaatan, atau pemakaian barang impor. Nilai dari bagian pendapatan yang

diserahkan secara langsung atau tidak langsung kepada penjual merupakan persyaratan atas transaksi jual beli barang impor maupun tidak.

### Mekanisme

Pemberitahuan Deklarasi Inisiatif pada PIB format baru dilakukan dengan cara memberitahukan pada kolom 36 PIB (nilai pabean, jenis transaksi, nilai perkiraan proceeds dan/atau royalti, harga futures, jatuh tempo penyelesaian/*settlement date*). Dengan ketentuan maksimal h+7 setelah *settlement date*, importir membuat VP (*voluntary payment*) atau dokumen dasar pembayaran dan melakukan pembayaran. Bila tanggal jatuh tempo VP pada hari libur atau libur nasional, pembayaran inisiatif dilakukan pada hari kerja berikutnya. SSPCP dan VP disampaikan ke kantor pabean pemasukan (selambat-lambatnya 7 hari setelah pembayaran), serta diarsipkan oleh importir sebagai bukti saat dilakukan audit. *Voluntary payment* tidak berlaku dalam hal importir tidak melakukan *voluntary declaration*.

Dalam hal PIB format baru belum diberlakukan, pelaksanaan Deklarasi Inisiatif diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Direktur Jenderal. Pengujian kepatuhan importir atas ketentuan Deklarasi Inisiatif dan Pembayaran Inisiatif dilakukan melalui Audit Kepabeanan.

### Penutup

Dalam tataran teoretis, ada dua macam kepatuhan (*compliance*) pembayar pajak yaitu kepatuhan dengan pemaksaan (*enforced*

*compliance*) dan kepatuhan yang timbul karena kesadaran sendiri (*voluntary compliance*). Dengan diberlakukannya Deklarasi Inisiatif diharapkan dapat meningkatkan *voluntary compliance* importir, suatu hal yang sangat penting dilakukan dalam

rangka mewujudkan rasa saling percaya (*trust*) antara importir dengan DJBC selaku pemilik otoritas dibidang kepabeanan.

**Teguh Iman S**  
**Kasi Nilai Pabean 1**  
**Direktorat Teknis**

**BILLING ONLINE**

Importir dapat melakukan pembayaran bea masuk atas transaksi future trading, royalty, proceeds

**DEKLARASI INISIATIF**  
VOLUNTARY DECLARATION

**Kewajiban importir :**

- Melakukan pembayaran inisiatif
- Menyerahkan dokumen
- Menatausahakan dokumen

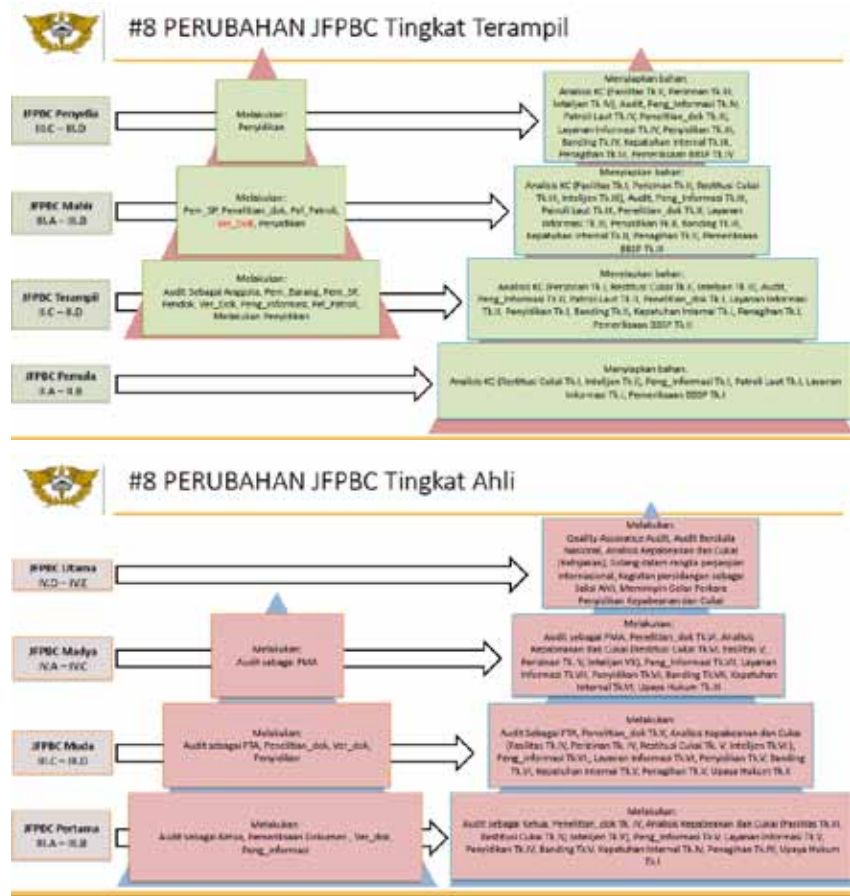
67 / PMK.04 / 2016

# Improvement for a Better Directorate General of Customs and Excise

From the nine programs of Nawa Cita, there are four items related with the roles and functions of the Directorate General of Customs and Excise (DGCE). First: strengthening the identity as a maritime country. Second: building Indonesia from the outskirts by strengthening the areas and villages within the framework of a unitary state. Third: improve people's productivity and competitiveness in the international market and that the Indonesian nation can move forward and rise with other Asian nations. Fourth: realize the economic independence by encouraging the strategic sectors of the domestic economy.

To realize this government program, certainly DGCE as one of the spearheads of the government should optimize the implementation of tasks and functions as a trade facilitator, industrial assistance, community protector, as well as a revenue collector.

Executive Secretary of DGCE, Kushari Suprianto said that there are three aspects to achieve a better DGCE, organizational improvement, human resources, and infrastructure. Work ethic and character of customs officers should be continuously built and directed in order to have higher integrity, because no matter how the great strategies and concepts created, eventually, it is the character of the officers that will carry out the key to success.



"It is not easy to change, but the leaders of DGCE starting from the Director General, Director, Director of Regional Customs Office and Head of Customs Office expressly provide guidance to employees in order to carry out their duties and responsibilities with full of integrity," said Kushari.

Employee development programs undertaken by DGCE in order to have high quality and integrity have been

done in many times, both to motivate and to provide a deterrent effect in accordance with the enforcement of reward and punishment system. Referrals to shield the employees from licentious acts were often done at the Anti-Corruption Day, gratification control and seminar/discussion forum with speakers from academic experts, professionals as well as from religious leaders.





“  
Said that there are three aspects to achieve a better DGCE, organizational improvement, human resources, and infrastructure.”

**Kushari Suprianto**  
Executive Secretary of the Directorate  
General of Customs and Excise

On the other hand, the leaders of DGCE also continue to struggle with decision or new policies aimed at keeping employees in order to work safely and comfortably. One manifestation of these efforts is the attention towards employee career paths.

According to Kushari, in meeting the needs of employees, DGCE has prepared better measures, especially related to the fulfillment of the needs in order to carry out the duties and responsibilities in the field, for example, in form of additional payment for sailing crew or any other incentives.

### Functional Position

In accordance with the mandate of the Law of State Civil Apparatus and the Grand Design of Bureaucracy Reforms which require the presence of the professional State Civil Apparatus, and in line with one of program in the Strategic Plan of DGCE in 2015-2019 is through the development of functional position of DGCE. Functional position is an urgent need to be realized in connection with the continued development of challenges

in performing duties and functions of DGCE as well as the limited formations of structural positions. In addition, it may be said that customs officials including those who have above average capability, so that each employee wishes to pursue higher education, while the career path within the organization structure of DGCE is very limited. These problems are indirectly making the composition of DGCE employees bubble in the middle, in the sense that employees with rank III upward are already over capacity. Therefore, DGCE through the Ministry of Finance is currently fighting for DGCE organization to have container careers through functional lines. According to the Deputy Secretary of Organization and Business Process, **Deny Isworo Makirtyo Tustowardoyo**, so far DGCE already has functional position, namely Customs Specialist and Auditor. However, if the official concerned has not served anymore especially as Customs Specialist, he/she will be back to the structural line as staff. This may indirectly harm the DGCE organization, as it may worsen the character and work ethic of employees.

If DGCE's proposal to develop functional position is successfully realized, a career path for functional position will be more certain and the

position space will be wider. There are many activities that should be done by functional officer but currently only two of them are carried out, namely audit and document inspection. All functional positions will be referred to as Customs Functional Officer, consist of auditor, document examiner, goods examiner, courier service examiner, objection and appeal examiner, information management, and customs and excise analyst, including facility, licensing, objection, customs valuation database and intelligence base.

The advantage of career in functional position is the promotion assurance compared with structural positions. Rank of structural position will not rise if the person concerned is not promoted. For example, rank of a Head of Section (Echelon IV) will stop at the Rank IV/a until the retirement if the person concerned is not promoted to Echelon III. Likewise Echelon III will stop at rank IV/b until the retirement if there is no promotion to Echelon II, but in functional position, an official can reach up to rank IV/e, if that official continues to do a good job and pass the competency test. Thus functional positions will be increasingly in demand by employees and there is a choice to choose a career in structural position or in a functional position. Additionally, it will provide





**DGCE already has functional position, namely Customs Specialist and Auditor. However, if the official concerned has not served anymore especially as Customs Specialist, he/she will be back to the structural line as staff.**

**Deny Isworo**  
Deputy Secretary of Organization and Business Process

a positive impact on DGCE because it is expected to increase motivation and employee productivity, and that can ultimately increase the potential revenue from DGCE.

Besides proposing the development of functional position, based on the Ministry of Finance Regulation No. 234/PMK.01/2015 on the Organization and Administration of the Ministry of Finance, DGCE has added new directorates and areas of work on the existing directorate at headquarters.

Facilities and infrastructures also need to get attention. Business demands toward costless and quick customs and excise service to face competition should be supported by DGCE. A new DGCE breakthrough is needed. Facilities and infrastructures must be adjusted to the demands of business development, including the use of computing and information technology that have been upgraded and expanded continuously. Similarly, the addition of patrol boats and the

reconsideration of procurement of several patrol aircraft that had ever been used by DGCE long time ago to support its duties and functions in the field.

After the launch of ASEAN Economic Community (AEC), business, investment and labor competition among countries in the ASEAN region is getting tougher. All countries improve themselves to take advantage of this agreement so that they can win the competition. Business sectors should certainly be supported by the government as facilitator as well as a regulator that prepares directions to balance the implementation of national development through the issuance of regulations. In ASEAN region, Indonesia is a country that has the greatest number of population. We should not let this country to be only the market for other countries so that we should improve our competitiveness to face this liberal market.

**(Jiwo, Zulva)**

# DGCE

## Reorganization

To respond to the ever-changing environment, it is necessary for the Directorate General of Customs and Excise (DGCE) to continuously adapt its organizational structure. In 2015, for example, new service offices were established, and small offices and middle offices were upgraded to middle offices and prime offices, respectively.



### DGCE Reorganization



NOMENKLATUR		ESELONISASI PMK 206/2014		ESELONISASI PMK 234/2015	
PMK 206/2014	RPMK 2015	III	IV	III	IV
1. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL	1. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL	5	19	6	22
2. DIREKTORAT TEKNIS KEPABEANAN	2. DIREKTORAT TEKNIS KEPABEANAN	4	16	6	23
3. DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN	3. DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN	3	10	5	18
4. DIREKTORAT CUKAI	4. DIREKTORAT TEKNIS DAN FASILITAS CUKAI	3	10	4	13
5. DIREKTORAT PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN	10. DIREKTORAT PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN	5	18	6	23
6. DIREKTORAT AUDIT	9. DIREKTORAT AUDIT KEPABEANAN DAN CUKAI	3	10	4	14
7. DIREKTORAT KEPABEANAN INTERNASIONAL	5. DIREKTORAT KEPABEANAN INTERNASIONAL DAN ANTAR LEMBAGA	3	10	5	21
8. DIREKTORAT PENERIMAAN DAN PERATURAN KEPABEANAN DAN CUKAI	6. DIREKTORAT KEBERATAN BANDING DAN PERATURAN	4	11	4	13
9. DIREKTORAT INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI	7. DIREKTORAT INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI	5	15	4	14
10. PUSAT KEPATUHAN INTERNAL KEPABEANAN DAN CUKAI	8. DIREKTORAT KEPATUHAN INTERNAL	3	10	4	13
	11. DIREKTORAT PENERIMAAN DAN PERENCANAAN STRATEGIS	0	0	3	10
	<b>JUMLAH</b>	<b>38</b>	<b>129</b>	<b>51</b>	<b>184</b>

#### SEKRETARIAT DJBC

At the end of 2015, the Ministry of Finance issued the Ministry of Finance Regulation Number 234/PMK.01/2015 concerning the Organization and Business

Process of the Ministry of Finance, which is expected to help DGCE in implementing its vision and mission and enhancing the synergy of its units.

**Deny Isworo Makirtyo**  
Tustowardoyo, Deputy Secretary

of Organization and Business Process, stated that in addition to responding to the environment, The reorganization is necessary to accommodate the proposed blueprint of the Organizational Transformation and proposal from





Menteri PAN-RB meninjau Bea Cukai.

units in the DGCE Headquarters. The majority of directorates at the headquarters undergo significant changes in terms of roles and functions.

The regulation also regulates the upgrading of several Echelon IV positions to Echelon III, and the addition of new Echelon IV positions, which, according to Deny Isworo, is conducted by “taking into account the performance effectivity and efficiency in the implementation of the units’ roles and functions which are continuously and dynamically changing.”

After the issuance of the above-mentioned regulation, DGCE Headquarters now have 10 directorates and 1 Secretariat Directorate General, up from the previous 8 directorates and 1 Secretariat Directorate General and 1 Center for Internal Compliance, with the addition of the Directorate of Revenue and Strategic Planning and the Directorate of Internal Compliance.

5 directorates do not undergo nomenclature changes, namely Secretariat Directorate General, Directorate of Customs, Directorate of Customs Facilities, Directorate of Enforcement and Investigation, and Directorate of Customs and Excise Information Technology, 4 of which have additional Echelon III and Echelon IV positions, and 1 (Directorate of Customs and Excise Information Technology) now have less Echelon III positions. The function related to risk management is now under the Directorate of Revenue and Strategic Planning because risks should be identified in the planning process; whereas the function related to registration is now under the Directorate of Customs. “While the roles now look narrower, if you take a look at its organizational structure, Directorate of Customs and Excise Information Technology is now actually more specialized in IT and data provision.”

Secretariat Direktorat General now have 6 Echelon III units under it

after the Subdirektorate of Manpower is split into the Subdirektorate of Manpower Administration and the Subdirektorate of Manpower Development. Whereas there are now 2 new subdirektorates under the Directorate of Customs, namely Subdirektorate of Customs Registration and Subdirektorate of Priority Programs and Authorized Economic Operator (AEO).

The Deputy Director of Priority Programs and AEO, **Muhamad Mufti Arkan**, stated that the new subdirektorate advances 2 priority programs, called *Mitra Utama* (MITA) and AEO, in order to adapt with the rapid national economic development, and help maintain the stability of international trade by implementing international standards.

These two programs are expected to be one of the solutions to the problems related to dwelling time which involve various government agencies. MITA companies, for example, from the data of January

2015 to April 2016, are 1.5 days faster than the green channel companies in terms of their dwelling time. AEO is also expected to be adopted by other government agencies related to supply chain in the near future.

Directorate of Customs Facilities now have additional subdirectorates, 2 of which, Subdirectorate of Bonded Storage and Subdirectorate of Import Concession for Export Purposes, were previously under 1 subdirectorate, namely Subdirectorate of Bonded Storage and Import Concession for Export Purposes; and 1 new subdirectorate, Subdirectorate of Special Zone Facilities.

Subdirectorate of Special Zone Facilities has the role of preparing and developing policies, standardization and technical assistance of facilities for free trade area and special economic zone; as well as to provide licenses and facilities, and evaluate and harmonized the policies of free trade area, free ports, and special

economic zone.

Another addition to the Echelon III units in the headquarters is the establishment of the Subdirectorate of Sea Patrol under the Directorate of Enforcement and Investigation. Agus Yulianto, Deputy Director of Sea Patrol, stated that the role and function of sea patrol were previously under the Subdirectorate of Enforcement. Nevertheless, a unit dedicated on customs control at sea is crucial, especially when taking into account the fact that DGCE is Indonesia's second sea fleet after the navy, which means DGCE carries the responsibilities of patrolling and monitoring Indonesia waters.

At the current state, while DGCE is present in vulnerable waters of Indonesia, such as in Malaka Strait, the existence is often deemed independent and disjointed. The establishment of a dedicated unit to prepare and develop policies, standardization, technical assistance, evaluation and implementation of



**The strategic initiative is expected to be completed in the next 3 to 4 years in order to strengthen the role and function of customs and excise patrol, especially sea patrol.**

**Agus Yulianto**

Deputy Director of Sea Patrol

sea patrol and operation is a step towards realizing DGCE strategic initiative, namely the revitalization of sea control by DGCE, through the establishment of a dedicated maritime unit. Agus Yulianto added that “the strategic initiative is expected to be completed in the next 3 to 4 years in order to strengthen the role and function of customs and excise patrol, especially sea patrol. The establishment of the Subdirectorate of Sea Patrol shall be the cornerstone.”

In addition to the changes in the Echelon III and Echelon IV level, there are 5 Echelon II units in the headquarters that undergo nomenclature changes. First is the Center of Internal Compliance, which is transformed into the Directorate of Internal Compliance, which according to Deny isworo, is intended to make the coordination among units more effective and to be in line with the Minister's directive which mandates the existence of an internal control unit in every Echelon I unit in the Ministry of Finance.



Reuni internal Keubid Program Prioritas dan AEO



Second is the establishment of Directorate of Revenue and Strategic Planning, which is a unit responsible to matters related to organizational transformation in order to achieve an organization that is equipped with excellent planning, organizing, actuating, and controlling functions. "The establishment of the Directorate of Revenue and Strategic Planning is the follow up to the recommendation from the Team of Quality Assurance and National Bureaucracy Reformation in 2011," said Denny Isworo.

As the implication of the establishment of the Directorate of Revenue and Strategic Planning, the-then-Directorate of Customs and Excise Revenue and Regulation is now changed into the Directorate of Objection, Appeal and Regulations in order to specialize the function of the directorate and achieve regulatory

reform which is one of the priorities in the Bureaucracy Reformation Part II. Deny Isworo added," the nomenclature change is one of our efforts to provide excellent service and control by enhancing the quality of the regulations, harmonizing the regulations, and providing effective and efficient legal aid in order to improve stakeholders' trust to DGCE."

Subdirectorate of Public Relations, which was formerly under the-then-Directorate of Customs and Excise Revenue and Regulation, is now under the Directorate of International Affairs and Interagency Relations, under the name of Subdirectorate of Communication and Publication, and Subdirectorate of Dissemination and Information.

The reorganization clearly affects the number of human resources and positions available at the

headquarters. There are now 10 Echelon II officials; 51 Echelon III officials, up from 38 officials; and 184 Echelon IV officials, a significant increase from the previous 129 officials. (See table)

According to Deny Isworo, such significant reorganization will affect the planned regional and service offices' reorganization in DGCE. " In 2016, the agenda for the regional and service office reorganization of DGCE is the joint discussion between the Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucracy Reformation and the Organization and Business Process Bureau of the Secretariat General of Ministry of Finance. Whereas the academic paper on DGCE sea patrol is already finished and will soon be discussed by the two bodies above," said Deny Isworo.

(Jiwo, Zulva)







# Reorganization of DGCE

**Kushari Suprianto,**  
Executive Secretary of Directorate General of Customs and Excise

---

Directorate General of Customs and Excise (DGCE) is continuously improving its organization to adapt with the current circumstances and demands through reorganizations. A few years ago, DGCE reorganized its regional and service offices by establishing new service offices and upgrade the status of small offices to middle offices, and middle offices to prime service offices.

**T**he latest reorganization occurs in the headquarters. To find out about the background and objective of the reorganization, we have interviewed the Executive Secretary of Directorate General of Customs and Excise, **Kushari Suprianto**.

**What is the background of the recent reorganization?**

It began with the National Middle-Term Development Plan (RPJM) with its Nawa Cita program intended to strengthen government agencies in their role in the national development. The program is the basis for the reinforcement of roles and functions of the Ministry of Finance as accommodated in the Presidential Regulation Number 28 of 2015 on Ministry of Finance; which includes DGCE which is manifested in the establishment of additional Echelon II, Echelon III, and Echelon IV units.

**What is the objective of the reorganization?**

The objective is to harmonize the roles and functions of DGCE as mandated by Customs Law and Excise Law in order to implement DGCE vision and mission and enhance synergy among the units.

**The recent reorganization seems to focus on refining the directorates and subdirectorates in the headquarters.**

DGCE as an organization consists of 3 major units, the headquarters, regional and service offices, and technical units. Improvement is done in phases, depending on the strategic environment of DGCE.



The regional and service offices had been reorganized in 2014. In 2015, to keep up with the national policy direction, it is necessary to reorganize the headquarters. In general, the reorganization includes

the establishment of Directorate of Internal Compliance and Directorate of Revenue and Strategic Planning as the follow up to the recommendation from the Quality Assurance and National Bureaucracy Reformation



Team in 2011; the establishment of dedicated units for Free Trade Agreements (FTA) and Authorized Economic Operator (AEO); and the additional Echelon units to achieve a more effective implementation of the ever-developing roles and functions of Customs and Excise.

**Prior to the reorganization, there was a discourse about establishing a dedicated directorate for public relations, but as we know, it has not yet been realized?**

The role of public relations in an organization is undeniably important. It is responsible to provide customs-and-excise-related communication to the public, mediate DGCE with the public, establish public opinion, and act as the expert prescriber, as well as problem solving process facilitator.

Nevertheless, the organization structure of DGCE as regulated in the President Regulation Number 28 of 2015 on Ministry of Finance is limited. Therefore, to accommodate the increasing demand for a greater role of the public relations unit, there are now 2 Echelon III units in charge of public relations, namely Subdirectorates of Communication and Publication, and Subdirectorates of Dissemination and Information.

**Will regional offices and prime service offices be affected by this reorganization?**

Absolutely. Any significant change to the roles and functions of units in the headquarters will affect the reorganization agenda for regional and service offices of DGCE. For 2016, the agenda for the regional and service offices' reorganization is to conduct a joint discussion between the Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucracy Reformation and the Organization and Business Process Bureau of the Secretariat General of Ministry of Finance

**What about the human resources? Any specific additions?**

Additional human resources and their supporting infrastructure are inevitable. We have planned the budget and infrastructure for the additional human resources.

**What's next? Any plan to establish new service office or operation facility base?**

Surely. Secretariat Directorate General is regularly monitoring and evaluating the organizational structure of DGCE, of which the result will be the basis for regional and service office's reorganization. The reorganization could be in the form of expansion, addition, closure, or merger. The result of the latest monitoring and evaluation indicates that in 2016, it is necessary to reorganize regional and service offices and technical offices of DGCE.

**In addition to reorganization, what else do you think that can be done to improve DGCE as an organization?**

Organizational structure is only a part of the planned improvement. There are also human resource management, remuneration structure, and infrastructure improvement. They will all be regularly improved as mandated by the Blueprint of Organization Transformation through Strategic Initiative of Organization, Human Resources, and Infrastructure.

**Speaking of infrastructure, are DGCE's current technology infrastructures and facilities adequate to support DGCE's day-to-day performance?**

It is undeniable that information technology is vital to DGCE's day-to-day work. We are always working to adapt our information technology with the organization's needs in order to perform optimally.

**Any additional remarks with regard to our topic?**

On behalf of the Secretariat Directorate General, I would like to appreciate all DGCE officers' effort to continuously enhance their work units' performance and I encourage them to continue improving for the sake of DGCE.

(Jiwo, Zulva)



# VOLUNTARY DECLARATION

*Study of the Minister of Finance Regulation Number PMK-67/PMK.04/2016 on Voluntary Declaration of Customs Value for the Purpose of Import Duty Calculation*

## Background

The explanation of Article 17 paragraph (4) of Customs Law states that basically only the buyer and seller know the actual price in the transaction of import. The reliance on trust makes it challenging for customs to detect any indication of undervaluation. A breakthrough is needed to shift from the traditional customs valuation method to an automated valuation supported by a complete and accurate database that is managed by a specialized expert analyst.

The explanation of the above article also states that any deliberate mistake identified during the re-examination or customs audit shall be subject to an administrative fine of at the minimum 100% of the import duty that has not been paid, or at the maximum 1000% of the import duty that has not been paid. To facilitate legitimate importers who are unsure of the value of futures, royalty, and proceed of their goods and are worried that the value that they are declaring initially is inaccurate, Directorate General of Customs and Excise issued the Minister of Finance Regulation Number PMK-67/PMK.04/2016 on Voluntary Declaration. This regulation, in turns, is expected to also foster voluntary compliance.

## Definition

Voluntary declaration means the declaration made by the importer in the customs declaration concerning the price or costs that should be added to the transaction price, of which the value cannot be determined during the lodgment of the import declaration, such as the price of futures, which is the settlement price that can be determined only on the settlement date after the registration date of the import declaration. Goods with futures are usually commodities traded at futures market that have written contracts between the buyer and the seller for a specific period of time.

Another example is royalty, which is paid by the buyer, either directly or indirectly, for the importation of goods with intellectual property rights.

The final example is proceed, which is the value of revenue received by the buyer for the sale, utilization, or use of imported goods. Such value could be paid either directly or indirectly to the seller and could be either a requirement of the transaction or not.

## Mechanism

Voluntary declaration in the new format of import declaration is stated at column 36 (customs value, type of transaction, estimated value

of proceeds and/ or royalty, price of futures, settlement date). Within 7 days after the settlement date, the importer shall make voluntary payment (VP) or payment document and make the payment. If the due date of the VP is on a holiday, the voluntary payment shall be made on the next working day. The letter of deposit for customs, excise, and tax (SSPCP) and the VP shall be lodged to the customs office of goods entry, within 7 days after the payment is made, and be archived by the importer for the purpose of audit. Voluntary payment shall not be applicable in case the importer does not make a voluntary declaration.

In case the new format of import declaration has not been applied, the procedure of voluntary declaration shall be regulated by the Circular of Director Jenderal. Importer compliance on the provisions regulating voluntary declaration and voluntary payment shall be audited with customs audit.

## Conclusion

Theoretically, there are 2 types of taxpayer compliance, enforced compliance and voluntary compliance. Voluntary declaration is expected to raise importer's voluntary compliance since trust between the importer and customs administration is very crucial.

**(Teguh Iman S)**

# The Government Continuously Improves the Ease of Doing Business



**T**he Indonesian government continues to take various measures to improve the ease of doing business in Indonesia. Coordinating Ministry for Economy and Investment Coordinating Board (BKPM) continues to step synergistically to encourage ministries and other relevant agencies to work together to improve the ease of doing business in Indonesia. One of them is related to the annual survey of business (Ease of Doing Business, EODB).

Head of BKPM, Franky Sibarani, said that one important step in the ease of doing business is deregulation of policy and socialize it to respondents and communities. "Improvements that will be conducted by the government are to adjust 40 regulations, for now, 29 regulations have been adjusted," he said.

According to Franky, the improvement was expected to increase the participation of domestic businesses in the national economy, to increase exports and to create job

vacancies. "These ongoing efforts are ultimately aimed to provide the public welfare. Improvement of business by simplifying licensing is part of Nawa Cita (Nine Priorities Agenda) of President," he explained.

Franky pointed out that the government's efforts are aimed to increase the participation of domestic businesses and at the same time, to accelerate the growth of national economy. "Improvements are done fundamentally by looking at the end to end process to simplify the procedures as well as the efficiency of the cost of doing business," he said.

To get a perspective of the relevant stakeholder relating the improvements that have been made by the government, BKPM held the Investment Dialogue "To Whom does the Improvement of the Ease of Doing Business?" in Jakarta with speakers from Coordinating Ministry for Economy, BKPM, Economic Observers and Representatives of Businessmen Association.

The Government has made various improvements by cutting procedures, time and costs. For

example, if the previous procedure required 13 to 48 days and cost Rp 5.7 million, now only requires 7 procedures within 10 days and cost 2.7 million.

Advisor to Coordinating Minister for Economy for National Competitiveness Development Affairs, Bambang Adi Winarso explained that the government has made a special website that contains all information related to the improvement made by the government (<http://eodb.ekon.go.id/>).

Meanwhile, the Director of Research Core Indonesia, M. Faisal focused on the role of Government on improving the indicator of business facility (to start a business) and indicator of contract enforcement. "The first indicator is ranked 173 while the second indicator is ranked 170," he said.

With the improvement in both indicators, the target of President Jokowi to reach the rank of 40 is expected to be achieved. Faisal added that the EODB is not enough to measure the conducive business climate in a country. "The ease of doing business for investors must also pay more attention to the quality of the climate for investment and trade," he said.

Director of Deregulation, BKPM, Yuliot, added that BKPM viewed the survey indicators of EODB has strategic significance because it is used by many countries to see the business climate in a country. "The improvement in the ease of doing business survey is expected to encourage investors to invest in Indonesia," he added.

Meanwhile, Chairman of the Association of Indonesian SMEs, M. Ikhsan Ingratubun conveyed that Indonesian SMEs certainly hope that the improvement on survey is also significantly reflected in the ease of doing business in Indonesia. "It is very clear that the improvement of doing business is profusely for the people of Indonesia," he said. (\*)

# Destruction of Confiscated Narcotics from Operasi Bersinar 2016



Chief of Indonesian National Police and Minister of Finance on press conference.

**H**undreds of kilograms of narcotics as the result of operation to eradicate drug syndicates (*Operasi Bersinar*) had been destroyed, precisely on 6 April 2016 in the field of Harbormaster Office and the Port Authority Class II of Cirebon. It was attended by Chief of Indonesian Police Baharudin Haiti, Finance Minister Bambang Brodjonegoro, Head of the National Narcotics Agency (BNN) or its representative, Police Chief of West Java Moechgiyarto, Director General of Customs and Excise Heru Pambudi, and other local authorities.

Chief of Indonesian National Police said that drugs influence to Indonesia's population is currently high, about 4.5 million people or approximately 2.3% of total population.

"Therefore, we are concerned about this issue and the President instructed the National Police, the National Narcotics Agency (BNN) and all associated elements including the Directorate General of Customs and Excise (DGCE) to conduct operations jointly and



Group Photo.

simultaneously across Indonesia," he said.

The rampant abuse and illicit trafficking have raised the commitment to combat drugs for the sake of public safety. Various attempts have been made either through prevention, enforcement, treatment and rehabilitation.

As one of the war against drug trafficking, the Police, BNN, Customs and other related institutions have conducted *Operasi Bersinar* 2016.

The joint operation between BNN, Customs, Police and other officials was successful and resulted in ample confiscated drugs. Baharudin expected to do the operation continuously to combat the trafficking and abuse of narcotics.

"Therefore, I request the media to socialize, to save our younger generations from the drug problem because it is destructive, addictive, and affective to nervous system. Drugs abuse can also reduce lifespan



and moreover cause death, "said the four-star police general.

The evidences that have been confiscated are the result of the implementation of *Operasi Bersinar* from 15 to 31 March 2016. The confiscated drugs consist of crystal methamphetamine weighing 139.26 kg, liquid methamphetamine weighing 44.64 kg and ecstasy weighing 197 874 grains. One unit of Iron Vessel Bahari I has been seized by the the Directorate of Drugs, Crime Agency Resort, National Police because it is used to bring narcotics by an international syndicate and will be investigated by Money Laundering Investigation Unit.

Chief of Indonesian National Police also added that last week, 200 acre of marijuana field that produced 579 ton of marijuana as the result of operation in Aceh had been destroyed. If in one day people consume 5 grams of marijuana, this means it could save over 100 million of the nation's youth.

On the same occasion, the Ministry of Finance, in this regard is DGCE, is assigned to work together with the Police, BNN and other

agencies to support the *Operasi Bersinar* to prevent the entry of drugs into the territory of the Republic of Indonesia. Especially for that carried out by Customs because Customs is maintaining the border. In that Operation, most of drugs entered through Soekarno-Hatta airport. There are 6 cases in 2016 through Soekarno-Hatta Airport, 5 cases in Batam, Jakarta and Tanjung Balai Karimun each 2 cases, then Bandung, Medan and Tanjung Pinang one case, another one is through a package at the Post Office of Pasar Baru. Drugs come from various delivery modes, through airports, ship and post.

DGCE seized crystal weighing 53 kg suspected as methamphetamine, ecstasy nearly 4,000 rounds, as much as 320 grams of hashish, ketamine 6 grams and 19.84 grams of marijuana. Mostly the modus is concealment inside the body and now the latest mode of narcotic smuggling is in form of liquid methamphetamine, it does not come from China but from other Asian countries.

Narcotics smuggling into Indonesia is mostly through Malaysia

for about 70% of cases and the rest is through Taiwan, Iran, Singapore, the Netherlands and Nigeria. As a form of synergy between DGCE with BNN and the Police, the evidence and the suspect are handed over to the Police and BNN.

Statistic shows that the concern is highly needed due to the statistic comparison between January-March 2016 with January-March 2015. The case of narcotics prevention in the first 3 months of this year increases by almost 237% or approximately 2,4 times bigger than the same period in 2015.

It means that the preventive actions and seizures have been done properly by the authorities, including by Customs. Nevertheless, we need to worry since Indonesia remains a target for drugs deployment. Surely this is a serious task of the National Police, as well as DGCE and BNN.

"So, that's what we want to convey and we must deliver the highest appreciation for the good cooperation with the Police and BNN and other related institutions," said Bambang.

(Jiwo, Zulva)



Confiscated drugs as the result of Operasi Bersinar.

## Integrated Sea Patrol "Operasi Gerhana 2016" Prevent Smugglings in Strait of Malacca



Integrated sea patrols conducted for one month by the Directorate General of Customs and Excise (DJBC) successfully conducted vessel inspection for 272 times and 27 seizures, both exports and imports.

**R**ampant smuggling of illegal goods, among others: used clothing, food products such as onions, rice, sugar, and narcotics originating from Malaysia using timber vessels are brought along the east coast of Sumatra, DGCE initiated an integrated marine operation codenamed "Operasi Gerhana (Operation Eclipse)" in 2016. This operation was aimed at combating smuggling of illegal goods into Indonesia and will be held simultaneously in 16 Customs Offices in Sumatra include: Aceh,

North Sumatra, Riau Islands, Riau, West Sumatra, Batam and Tanjung Balai Karimun.

Combating smuggling is done by improving internal coordination and coordination with other law enforcement officers. In the operation, Customs maintained synergy with other institutions such as the military and police.

"We work together with the military and police. Last year, we managed to take actions on the sea for 176 times. Meanwhile, in 3 (three) recent months there have been 80 times. We must be vigilant,"

said Director General of Customs and Excise Heru Pambudi when he led the Opening of sea patrol operation.

He also explained that the fight against smuggling conducted by Customs is based on a direct order from President Joko Widodo. President, said Heru, at least four times ordered directly to Customs regarding efforts to combat smuggling in coordination with other law enforcement agencies. Combating smuggling by sea are carried out by the Customs and other law enforcement officers in the first quarter of 2016 has successfully cracked 30 cases.

"If eradication is done consistently, I'm sure the enforcement until the end of 2016 will be optimal," said Heru who opened the Joint Operations at the



passenger terminal pier of Ujung Baru.

### Result of Integrated Patrol “Operasi Gerhana”

Lasting for one month, *Operasi Gerhana* successfully performed 27 times seizures and secured evidence in form of 120 sacks of sugar, 25 cartons of Lee Chai Chan drinks with alcohol content of 35%, 50 sacks of onions and 50 used mattresses. Smuggling was loaded by KM Suir Jaya GT 5 and the 26 other cases are smuggling of onions and garlic. All of them were the result of enforcement by patrol officers involved in the operation carried out on the east coast of Sumatra and under the control of the Directorate of Enforcement and Investigation of Customs Headquarters. This operation also involved elements of patrol boats of the Regional Customs Office of Aceh, Regional Customs Office of North Sumatra, Regional Customs Office of Riau Islands, Regional Customs Office of Riau and West Sumatra, the Prime Customs Office of Batam, Customs Fleet Base of Tanjung Balai Karimun, and Customs Fleet Base of Batam.

Operation was successfully secured several vessels that were used as means to carry out smuggling and were arrested in various locations in the Strait of Malacca and along the east coast of the island of Sumatra. Most of them were transferred to the nearest customs service office for investigation in accordance with the ‘*locus delicti*’.

*Operasi Gerhana* involved around 300 personnel of Customs and Excise from Sumatra Offices. It was supported with Fast Patrol Boat (FPB) 28 meters, speedboat and Very Slender Vessel (VSV) with total 16 units patrol boats deployed and 14 units in the second period. This operation was very important for Regional Customs Office of Riau Islands because its waters directly adjacent to Singapore and Malaysia

which have been the country of origin of various contraband.

The joint patrol was conducted for two periods, the first period was on 7 April-21 April 2016 and the second period was held on 22 April – 7 May, 2016. *Operasi Gerhana* was aimed at preventing smuggling of illegal goods such as Narcotics, Psychotropic Substances and Precursor (NPP) and goods prohibited and restricted categories such as used clothing, food products (onions, rice and sugar).

In a press release after the evaluation of *Operasi Gerhana* at Prime Customs Office of Batam, Deputy Director of Enforcement and Investigation, Ahmad Rofiq, explained that the operations covered the territorial waters of the Straits of Malacca and its surroundings. “Overall the operation went well and Customs Task Force also conducted vessels inspection for 272 times. In that investigation, members of our task force patrols successfully conducted 27 preventions on smuggling either towards illegal export or import of goods,” said Ahmad Rofiq.

This activity clearly proved the seriousness of the Directorate General of Customs and Excise

(DGCE) in keeping the entry and exit of illegal goods that could affect the economy of the people of Indonesia.

Ahmad Rofiq who was accompanied by Agus Yulianto, Deputy Director of Sea Patrol, R. Evy Suhartantyo, Deputy Director of Enforcement and Operations Support of Regional Customs Office of Riau Islands, and several other officials, conveyed that the operation was instructed by the President to eradicate any attempt to smuggle illegal goods such as illicit drugs. “This operation involves 16 ships in the first period and 14 ships in the second period.”

“This operation has ended on May 7, 2016 ago. However, the Director General requested further operations as soon as possible,” said Rofiq which also confirmed *Operasi Gerhana* proved that the smuggling in the waters of the Strait of Malacca is quite high. In that operation, DGCE seized contraband almost every day. It is the joint task of the Directorate General of Customs and Excise, along with other law enforcement agencies in the sea area to continue to work together and support each other on their tasks and functions.

(Jiwo, Zulva)







## Indonesian Customs prevented the Illegal Exportation of 14 tonnes of Tin Ore

A container of 14 tonnes of illegal tin ore had been secured by the customs officers of Bandar Lampung, as revealed in the press conference of the Customs and Excise Service Office of Bandar Lampung at the area of Panjang Port, Bandar Lampung on 12 April 2016.

The Director General of Customs and Excise, Heru Pambudi attended the press conference, accompanied by the Director of Enforcement and Investigation, Harry Mulya; Director of Customs and Excise Revenue and Regulation, Rahmat Subagyo; Director of Customs and Excise Regional Office of Southern Sumatra, Aflah Farobi; Director of Customs and Excise Regional Office of Riau Island; Director of Customs and Excise Regional Office of Banten; Head of Customs Service Office of Bandar Lampung, Beni Novri; all Head of Customs and Excise Operation Facility Bases,

representatives of Mining and Energy Office of Bandar Lampung, and Director of Special Crime of the Provincial Police of Lampung.

The tin ore, estimated to be worth more than 2 billion rupiah, was about to be exported by PT WPS to Singapore. While it was originally declared as a 40-foot container of lumpwood charcoal, upon inspection on 8 April, it was found to be falsely declared.

The export declaration stated that the goods to be imported were 16.69 tonnes of lumpwood charcoal packed in 40 jumbo bags. Nevertheless, the inspection found that 14 bags contained tin ore, instead. There were 280 small bags inside each jumbo bags containing 50 kg of tin ore, which totaled in 14,000 kg of tin ore.

“Upon inspection, the goods were confiscated and we are now conducting further inspection for further enforcement,” said the Director General. The smuggling of tin ore is detrimental to Indonesia

as it caused the price of tin ore to plummet due to overstocking. The low price of tin ore is feared to cause factories to close and add to the number of unemployment in the country.

The Director General also added that illegal exportation of tin ore prevented the state from receiving revenue from value-added tax, income tax, and export duties. In addition, as the mining activities are illegal, the province where the mining activities take place is also deprived of the royalty fee.

Tin ore contains rare and valuable metal element. “Tin ore from Bangka is known to contain cerium (Ce), yttrium (Y), titanium, and thorium (Th), that may be used in the production of weapons due to their light yet durable nature, as well as other radioactives, such as uranium. All of these elements cause concerns to the government as they are related to state defense and security,” said the Director General.

(Jiwo, Zulva)

# ***"... Botan ooh Botan..!"***

*(On the Sea, We're Looking  
for Achievement)*

---





**S**ofyat is still lying down on the bed, he is not in hurry to go to his work place. Understandably, Sunday is a day off work and he wants to get enough rest. Suddenly there is a voice calling. Yah, his wife is calling from the kitchen.

“Darliiiiing...come here for a second, please, I need your help!!”

“What’s wrong, darling?”  
“Please help me to open this sardine can, it is very difficult to open. I want to cook it. Please use this knife.”

Sofyat tries to open the can, it is quite thick. Many times he tries to knock it with knife and hammer. “What is this brand?...ohhh Botan,

why is this very difficult to open? Ahhhh finally I did it. Darliiiiing I did it, you can cook it now...”

“Alright, I’ll be cooking it.” said his wife.

Sardine is Sofyat’s favorite food, but he never knows the brand, but because his wife just asked him, now he knows the brand of his favorite





food's brand. It calls BOTAN, a friend of him when he is on night sea patrol duty.

Sofyat is a Sea Patrol Commander at Regional Customs Office of Riau Islands. Even though he is on holiday, but he stays alert of the call of duty. Suddenly, at 13.30 pm his cellphone's ringtone is ringing and he immediately picks up the phone.

"Assalamualaikum Syad..."  
 "Wa'alaikumsalam, Sofyat, get ready, we have a command to sail, there is a target that we need to chase, let gather around here.." Said Arsyad.

Soon as he hangs up the phone, he says to his wife that he has a call of duty from his boss. His wife directly helps him to prepare all stuff

including the sardine, even though there is a Cook in boat to serve the food. Before he leaves, he has lunch together with his wife and his two child.

"mmmm...this sardine is so spicy, I like it"

After that lunch, Sofyat leaves her family. He grabs his motorcycle and heads to Customs Fleet Base of Tanjung Balai Karimun. All personnel have gathered there, there are 19 people including Arsyad as the captain. They have a briefing lead by Sofyat as the Patrol Commander for that day. On that briefing, it is explained the information of the movement of two ships in Waters of Tanjung Kedabu, and it must be followed-up.

After the duty warrant, things to prepare include the condition of patrol boat, adequacy of gas, arms, area of operation where two tankers contain thousands tons of gas, and the meal for boat crew.

#### **SOP-based Preparation**

Based on Standard Operating Procedure regulated in Decision of Director General of Customs and Excise, Kep-58/BC/1997 about Patrol Boat, one of its articles states that Patrol Boat operated in Customs Patrol equipped with service arms. Placements of firearms are specified in amount, type, brand, size/caliber as well as the ammunition for each firearm. They are armed to protect their selves whenever they are under threat that can harm their lives during their duty. Patrol Commander may command his crew to fight back using firearms and soon report to the official who issued the warrant.

After all things are prepared, they go with Patrol Boat BC 20002. This operation is classified. Weather on that night is quite friendly.

As the Patrol Commander, Sofyat must report the position and all related activity within specific time specified by Customs Official who issued the warrant, make a Boat Journal and upon all damage of

patrol boat, the commander must states it on the Journal and make the report.

### Find the Operation Target

Hasan the Cook is preparing dinner. After the food is all served, at 19.00 p.m everybody is alternately eating. Some of them keep guarding while some of them eat. Sofyat never forgets his sardine. After they finish eating, they return to stand guard. That is how all activities are carried out, it must be done alternately.

After 7 (seven) hours of surveillance, right at 02.30 am sharp, BC 20002 finally finds the operation targets. It is located on 01° 18' 700" U/ 103° 00' 300" T in Tanjung Kedabu Waters. It shows that there are two tankers, MT STAR with Nigerian Flag and MT BOTAN with Indonesian Flag. All crew on those two tankers look very panic when BC 20002 is approaching them.

Hoses scattered on those ships as the preliminary evidence of gas smuggling. Allegedly, those two tankers conduct the transfer of gas, and to regain one's grip, 5 (five) patrol crew immediately jump out to MT BOTAN to conduct inspection. Meanwhile, MT STAR tries to change the direction to Singapore. Patrol crew directly pursues it.

Customs patrol team tried to approach the smuggler's boat and ordered it to stop. Nevertheless, it was a futile attempt as the boat continued its course to Singapore and, worse, sped up once it realized that it was being chased by Customs. From the control room, Arsyad could see that the smuggler's boat was forcefully trying to turn towards Malaysia. "lean on the right side, capt!! Do not let the boat reach the beach!!" said Heru of the BC 20002 patrol crew.

The first two attempts were unfruitful as the smuggler's boat sped up. In the third attempt, the patrolling speedboat finally managed to get the front part of the boat close to the smuggler's boat for 3-5

seconds. But due to the wave and high speed only Heru and Andri attempted to cross over as they were the closest to the smuggler's boat. Rizal, who stood behind Sofyat, noticed that only one managed to jump across. Sofyat was startled and tried to identify who failed to make the jump, which was very difficult as it was very dark at that time.

"Turn around!!" ordered Sofyat to Arsyad once he noticed that Andri did not make it to the smuggler's boat, leaving Heru alone on the smuggler's boat.

It was such a dilemmatic situation as they needed to choose between prioritizing saving Andri who fell to the water or backing up Heru who was alone on the smuggler's boat against the smugglers. Knowing that Heru is armed with a firearm, the boat decided to firstly search for Andri, and after five minutes they finally saw Andri's hand waving for help. Saving Andri was not an easy task as the boat needed to approach him from the side to prevent him from being hit by the boat's propeller. The first attempt was unsuccessful and they lost sight of Andri again.

Amidst their frustration, while praying for Andri's safety, they found a miracle and saw Andri's waving hand again. Arya and Saut miraculously succeeded in their second attempt and, thus, Andri was saved.

While Andri was in such a severe state, cold, wet, queasy, and pale, all the crew remained thankful that they did not lose Andri. While applying ointment to Andri to keep him warm, the crew sped up to chase the smuggler's boat and worryingly found that it was heading to Singapore where a lot of huge tankers moored. Amidst the crew's fear that Heru could not handle the smugglers by himself, they heard Heru's yelling while holding the boat's steering wheel with his left hand, and pointing his gun the the smugglers with his right hand. "Come on up, guys!! I don't want to end up dead

alone in this boat!" yelled Heru. All crew swiftly crossed over to the smuggler's boat, except for Arsyad who remained in the speedboat. The situation was quickly under control, although one of the smugglers fought back, and had to be punched by Saut.

The MT Star boat was finally led into Indonesian territory. Once they arrived, all patrol crew got on the boat to secure, take control, and conduct further inspection.

Afterwards, BC 20002 leaned on MT Botan and ordered the captain and 16 crew members to board BC 20002, and the rest, accompanied by 5 patrol team members, to drive MT Botan and moor at Ketapang port in Tanjung Balai Karimun, which was under the supervision of Special Customs and Excise Regional Office of Riau Island. MT Star was also ordered to head to Tanjung Balai Karimun, escorted by 7 BC 20002 ship crew.

Both boats were targeted because MT Botan of Indonesian flag was suspected to smuggle fuel in the form of MFO to Singapore by transferring the goods to MT Star of Nigerian flag on the ocean. Upon inspection, it was found that the boat carried double manifest from the shipper and consignee, and do not have export declaration for the exportation of MFO by MT Botan.

To confirm the suspicion and prevent the attempted smuggling, Head of Enforcement Section coordinated with Deputy Director of Enforcement and Investigation and Director of Special Customs and Excise Regional Office of Riau Island, and decided to deploy BC 30001 boat to Tanjung Kedabu waters to aid BC 20002 boat. At dawn, the boats finally approached Batam, and while estimating the amount of fuel transported by MT Botan, Sofyat wondering how the name of the boat reminded him of the brand of his favorite food, sardines.

(inspired by a true story of a DGCE sea patrol crew at Tanjung Balai Karimun)





**KELUARGA BESAR DIREKTORAT JENDERAL  
BEA DAN CUKAI MENGUCAPKAN**

---

SELAMAT HARI RAYA

**WAISAK**

2560







KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI



PUSAT LOGISTIK BERIKAT  
PUSAT LOGISTIK BERIKAT

- ✓ Penanguhan Bea Masuk
- ✓ Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI)
- ✓ Pembebasan Cukai
- ✓ Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- ✓ Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM)



**JOIN US!**



Informasi lebih lanjut, hubungi :

[www.beacukai.go.id](http://www.beacukai.go.id)